



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.39/Menlhk-Setjen/2015**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN, mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga Negara menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2015-2019 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada RPJMN Nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Renstra 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2015-2019

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 mengacu pada Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I terkait

Pasal 4...

Pasal 4

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi arahan dalam hal penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H.LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1195

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

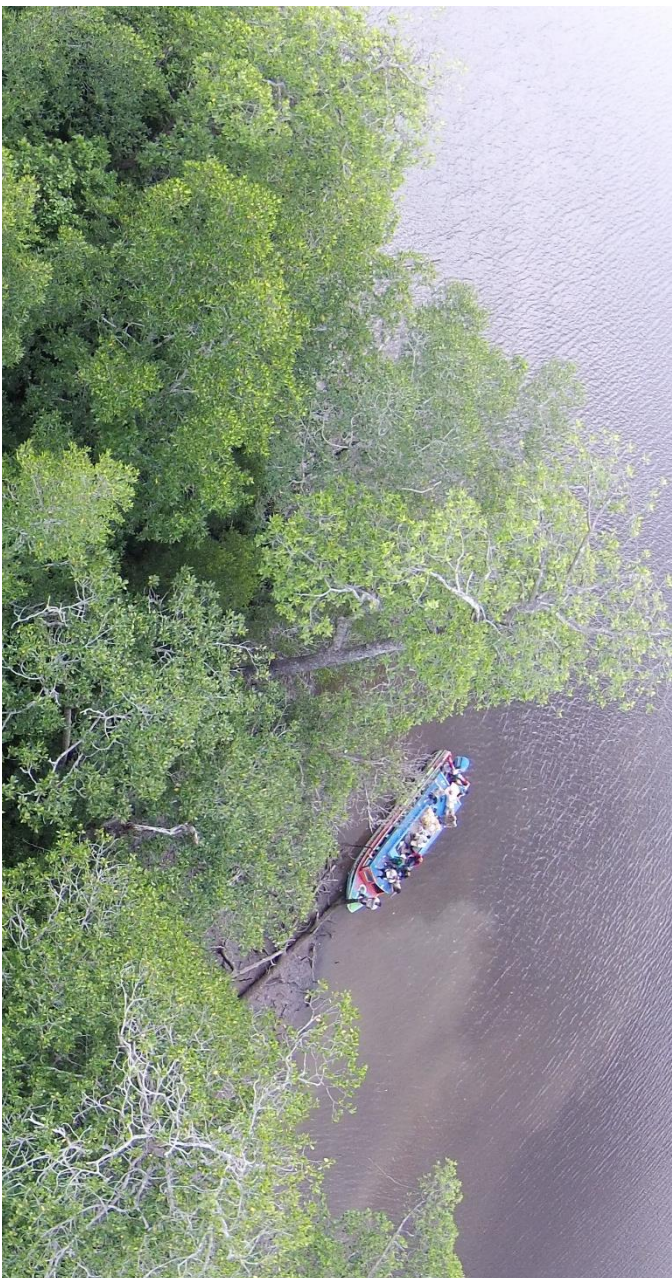
KRISNA RYA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.39/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2015-2019



Lanskap TN. Sembilang, Sumatera Selatan, difoto menggunakan *drone* dalam pemetaan keanekaragaman hayati. Foto disumbangkan oleh *Biological Diversity and Climate Change Programme*. Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Jerman.



Rencana Strategis Tahun 2015-2019
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

Diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Tahun 2015.

Foto-foto disumbangkan oleh (diurutkan
sesuai abjad) : Asri (Balai TN. Taka
Bonerate), Bambang Murti Aji (Biro
Perencanaan), Balai TN. Gunung Halimun
Salak, *Biological Diversity and Climate
Change Programme*, Haryadi (Balai TN.
Kutai), Hendrawan (Dit. Pemanfaatan Jasa
Lingkungan Hutan Konservasi), Imas
Fardilah (Biro Perencanaan), Muhammad
Desbi Adtya (Biro Perencanaan), Panji A
Nuariman (Balai TN. Lorentz), Rochmat
Kurniawan (Balai TN. Kayan Mentarang),
Sandi Kusuma (Biro Perencanaan), Simon
Onggo Hastomo (Balai TN. Laiwangi
Wanggameti), dan Wiratno (Dit.
Penyiapan Perhutanan Sosial),





Salah satu titik Sungai Serayu di Kabupaten Wonosobo. DAS Serayu adalah salah satu DAS prioritas nasional 2015-2019. Foto oleh Sandi Kusuma, Biro Perencanaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Lanskap TN. Kutai. Foto oleh Haryadi, Balai TN. Kutai

Kementerian mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan fasilitator, yang telah membantu merancang proses penyusunan Renstra ini, mengidentifikasi masalah dan merumuskan penyelesaiannya. Perkenanan kami untuk menyebutkannya. Narasumber utama yang membantu merancang proses yaitu Prof. Hariadi Kartodihardjo dan Prof. Yusram Massijaya, dibantu para fasilitator Prof. Sambas Basuni, Dr. Nugroho Maksoem, Ir. Haryanto R. Putro, MS., Ir. Sutrisno, MM. Hasil dari rancangan telah dikonsultasikan di setiap regional, dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara. Keempatnya telah bersedia menjadi tuan rumah dengan melibatkan perguruan tinggi setempat untuk lokakarya regional identifikasi dan konfirmasi masalah. Hasil dari lokakarya di regional, selanjutnya disarikan ke dalam lokakarya nasional di Jakarta.

Untuk memperluas hasil identifikasi dan menyusun rantai nilai, utamanya untuk menyambungkan hasil yang telah diperoleh pada Kabinet Indonesia Bersatu II 2010-2014 dengan Kabinet Kerja Republik Indonesia 2015-2019, Kementerian telah mengundang mantan menteri dari eks Kementerian Kehutanan dan eks Kementerian Lingkungan Hidup, pakar konstitusi, para Gubernur dan Bupati, aktivis lingkungan dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor dan Duta Besar, serta akademisi. Untuk itu, Kementerian mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak dan individu yang telah hadir dan memberikan masukan.

Meski penyusunan Rencana Strategis ini berkelindan dengan penyusunan Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Kementerian masih ingin memastikan bahwa Rencana Strategis ini menjadi bagian dan media pencapaian dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dengan melakukan pertemuan tiga pihak dan penelaahan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Karenanya, Kementerian menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Deputy Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (Kementerian PPN/Bappenas), dan Direktorat Jenderal Anggaran (Kemenkeu).

Di bagian akhir, untuk menyelaraskan upaya pengurusan dan kondisi tapak di lapangan, Kementerian sepenuhnya memandang perlu untuk menginternalisasi hasil dari *The 2014 Indonesia Forest Governance Index*. Karenanya terima kasih dan penghargaan yang tinggi diberikan kepada, ijin kami menyebutnya sebagai, Tim Tata Kelola Kehutanan.

Kementerian tidak mungkin menyebutkan satu persatu, rasa terima kasih, akhirnya, kepada pihak-pihak (baik pribadi maupun lembaga) yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini, Kementerian mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Seorang anak menyambut
mentaridi TN. Laiwangi
Wanggameti, Nusa Tenggara
Timur. Foto disumbangkan oleh
Simon Onggo Hastomo, Balai
TN. Laiwang Wanggameti.

DAFTAR ISI

PENGANTAR MENTERI.....	vii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum	1
B. Hasil Pembangunan Hingga 2014	2
C. Potensi dan Permasalahan	2
II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	7
III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	9
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	9
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian	22
C. Kerangka Regulasi.....	27
D. Kerangka Kelembagaan	27
IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	30
V. PENUTUP	58

LAMPIRAN



Aktifitas memancing dan menjala ikan di Sungai Serayu, salah satu DAS prioritas nasional 2015-2019. Foto diambil di Banjarnegara oleh Sandi Kusuma, Biro Perencanaan.



PENGANTAR MENTERI

Dua Kementerian besar telah ditautkan. Kementerian yang pertama menguasai sumberdaya alam pada seamparan hampir 70% dari luas daratan Indonesia, mulai dari pesisir hingga gunung. Menjadi rumah hayati yang ragamnya menjadi ciri keberadaan sebuah tempat, terhubung dari Sabang sampai Merauke. Kementerian itu sebelumnya bernama Kementerian Kehutanan. Kementerian kedua, sebelumnya bernama Kementerian Lingkungan Hidup, yang kebijakannya menjadi penanda perikehidupan seluruh masyarakat Indonesia, sekaligus pemungkin terhadap keberlangsungan seluruh sektor pembangunan. Tautan dua Kementerian itu bersalin rupa menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Membayangkannya tentang bagaimana Kementerian ini harus menjadi jawaban terhadap seluruh persoalan lingkungan hidup dan kehutanan, pada awalnya sungguh merisaukan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, saya merasa bahwa Kementerian ini ternyata diisi oleh pegawai yang tak hanya mumpuni di bidangnya, tetapi memiliki semangat yang luar biasa untuk menjaga setiap jengkal lingkungan dan hutan meski harus menepi hingga ke pelosok. Semangat inilah yang perlahan menguatkan dan saya yakin bahwa keberhasilan dari Kementerian ini akan mengantarkan seluruh sektor pembangunan pada tujuan yang telah dirumuskannya.

Harus diakui, tantangan utama yang harus dijawab oleh Kementerian ini kedepan adalah bagaimana setiap ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan, ragam hayatinya tidak pernah berkurang baik populasi dan nilainya. Sehingga, setiap upaya Kementerian kedepan akhirnya harus memberi keyakinan kepada generasi sesudah kita bahwa pada saatnya nanti, setiap sumberdaya hayati di dalam ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan saat ini, tidak berubah ketika generasi nanti akan memanfaatkannya. Dari sini sesungguhnya tantangan pertama Kementerian ini adalah meyakinkan para pengambil kebijakan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang. Cara ini yang Kementerian yakini mampu mendorong pembangunan berkelanjutan.

Kedepan, setidaknya tahun 2015-2019, Kementerian ini bermaksud untuk memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang

Rencana Strategis Tahun 2015-2019 ini tak hanya dibaca sebagai gugusan data belaka. Harus diyakini bahwa Rencana Strategis ini berisi komitmen seluruh Kementerian, yang menggerakkan birokrasi untuk senantiasa tak hanya memenuhi kinerja, tetapi justru berusaha untuk mendekatkan jarak antara capaian numerik dengan faktualnya. Kementerian ini sedang berupaya keras mendorong perbaikan sistem tata kelola seiring dengan perbaikan kondisi tapak lingkungan dan hutan.

Barangkali, keinginan keras dari Kementerian ini untuk memberikan gambaran perubahan dalam perbaikan lingkungan hidup dan kehutanan tak cukup diruangi dalam Rencana Strategis ini. Namun demikian, setidaknya Rencana Strategis ini hendak memberikan panduan kemana Kementerian ini akan menuju.

Akhirnya, semoga Allah, SWT, memberikan setiap rahmat NYA kepada kita semua, sehingga kita dapat memenuhi setiap kinerja yang telah dirumuskan dan memperbaiki kondisi tapak seperti yang telah diharapkan.

Jakarta,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

SITI NURBAYA





Pulau Tomia di TN. Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Foto oleh Hendrawan, Dit. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

I. PENDAHULUAN

A.

Pemanfaatan ruang di Indonesia senantiasa menampilkan dua sisi yang saling berlainan : pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dekade terakhir memperlihatkan pencapaian yang relatif baik, dibandingkan negara-negara lain. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,78% di tahun 2013. Namun demikian, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), selama 3 tahun terakhir justru menunjukkan penurunan (Tahun 2011 sebesar 65,50; Tahun 2012 sebesar 64,21; dan Tahun 2013 sebesar 63,1).

Banyak hal menjadi sebab, tapi semestinya kedua sisi itu berjalan beriring, dalam koridor yang sejak dulu disepakati sebagai pembangunan berkelanjutan. Bisa jadi, pemahaman bahwa alam Indonesia yang terkenal kaya harus dimulai dengan resiko-resiko keunikannya. Pembangunan Indonesia harus berdiri di atas alam Indonesia yang senyatanya memang unik, sebuah wilayah yang mempertemukan wilayah barat dan wilayah timur, masing-masing dengan pengaruhnya sendiri-sendiri.

Di sebelah barat dan utara, lempeng itu menjemput lautan Hindia dan Cina Selatan, menguntainya dalam lempeng-lempeng lebih kecil yang kini disebut dengan Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan gugusan Nusa Tenggara. Lempeng besar ini menghadirkan kicau burung, mamalia dan primata yang hampir tak jauh beda dengan super benua induknya, Gondwana, jauh sebelum masa Mesozoikum. Lempengan itu bernama Paparan Sunda, yang menghadirkan Mamalia besar seperti Harimau dan Badak. Berbeda dengan lempeng di sebelah timur dan selatan, yang menjemput Samudera Indonesia dan sebagian Samudera Pasifik, menghadirkan warna burung yang hanya bisa ditemui di lempeng ini. Lempeng ini bernama paparan Sahul, saat ini mencakup Papua, dan kepulauan Maluku. Dari sini tidaklah heran, burung cendrawasih mudah ditemui di Maluku sebelah utara.

Lempeng barat dengan kicau burung, dan lempeng timur dengan warna bulu nya yang mencolok. Lalu saat keduanya bertaut dalam khasanah yang kita beri nama Indonesia, siapa yang tak membanggakannya? Sayur mayur, ikan, palawija dan rempah-rempah bisa dengan mudah hadir di meja makan. Sebuah hasil kerja alam, yang bertolak dari persinggungan kedua lempeng, sinar matahari yang terus menerus, dan tetes hujan yang menyuburkan.

Hasil kerja alam juga membuahkan lingkungan alami Indonesia yang sejatinya indah, bertaut erat dengan lingkungan tak hidupnya (tanah, udara, iklim) menjadi rumah bagi hidupan alami. Berjajar dari pantai hingga gunung. Dan karena keragaman lingkungan tak hidup inilah, ragam hayati Indonesia, meski belum punya hitungan pasti, hanya bisa disamai oleh 2 negara : Brazil dan Kongo.

Setiap komponen di dalam lingkungan, di dalam sistemnya yang rumit itu, akhirnya memutar siklus, yang bermuara pada kemampuan setiap unit lingkungan untuk mendukung siklus besar dimana manusia berada di dalamnya.

Secara normal, tingginya ragam hayati selalu berbanding terbalik dengan kelimpahan individu dari setiap spesiesnya. Karenanya, jumlah ragam hayati yang tinggi, senantiasa menuntut luas areal yang dibutuhkannya sebagai tempat hidup. Pada saat yang sama, kebutuhan manusia akan lahan juga tidak semakin kecil. Dari sinilah sesungguhnya, ragam hayati telah memutar lingkaran tak bertepi dan menjadi lokasi konflik, karena faktanya, keelokan alam Indonesia sesungguhnya bersumbu pada tingginya ragam hayati. Sumbu inilah yg telah menghidupkan kedua kutub untuk saling berbenturan : lingkungan hidup dan manusia. Belum lagi, sebuah kenyataan telah didapatkan bahwa di tempat jumlah manusia berkumpul, di situlah ragam hayati melimpah. Tempat itu bernama dataran rendah.

B. T
a
s
i
l

Hasil-hasil pembangunan diidentifikasi dan disandingkan pada 2 rentang waktu penyusunan Renstra untuk melihat perkembangan pencapaiannya, yaitu periode Renstra Tahun 2005-2009 yang diberikan penanda tahun 2009 dan periode Renstra Tahun 2010-2014 yang diberikan penanda tahun 2014. Selanjutnya, hasil pembangunan disajikan sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan hasil pembangunan tahun 2009 dan tahun 2014

	2009	2014
IKLH	59,79	63,42
Indeks Kualitas Udara	94,68	80,54
Indeks Kualitas Air	42,26	52,19
Indeks Tutupan Hutan	59,23	59,01
Kawasan Hutan yang sudah ditetapkan	12%	58,8%
Laju deforestasi	0,83 juta ha/tahun	0,61 juta ha/tahun
Jumlah <i>hotspot</i>	2005-2009 Rerata 58.890 titik	2010-2014 Rerata 22.500 titik
Luas hutan dan lahan kritis	30,1 juta ha	27,2 juta ha
Produksi kayu	Hutan alam 4,8 juta m ³	Hutan alam 5 juta m ³
	Hutan tanaman 19 juta m ³	Hutan tanaman 26,67 juta m ³
	Hutan rakyat 3,2 juta m ³	Hutan rakyat 3,93 juta m ³
Produksi industri primer	Kayu gergajian 0,7 juta m ³	Kayu gergajian 1,18 juta m ³
	Pulp 4,7 juta ton	Pulp 5,42 juta ton
	Veneer 0,7 juta m ³	Veneer 0,9 juta m ³
	Kayu lapis 3,0 juta m ³	Kayu lapis 3,2 juta m ³
Produksi HHBK	Sutera alam 19.214,66 ton	Sutera alam sebesar 18.713 ton
	Lebah madu 1.931,62 ton	Lebah madu 160.213 ton
	Rotan 12.000 ton	Rotan 269.870 ton
Ekspor kayu	US\$ 1.628.108.434	US\$ 6.078.187.543,74
PNBP	Rp. 2,39 triliun	Rp. 3,3 triliun
PDB	Harga berlaku Rp.44,952 Trilyun	Harga Berlaku Rp. 56,994 Trilyun
	Harga konstan Rp. 16,793 Trilyun	Harga konstan Rp. 17,442 Trilyun

C. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia diidentifikasi bersama para pihak yang dilakukan dengan diskusi secara terfokus (*focus grup discussion*) pada 12-14 November 2014. Para pihak yang menyampaikan pandangan diantaranya : lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, lembaga donor, mantan menteri, pakar kontitusi dan akademisi.

Harapan utama para pihak disarikan sebagai nilai pembangunan Kementerian 2015-2019, nilai itu bernama pembangunan berkelanjutan. Yang bertolak dari pentingnya keberadaan sumberdaya alam sebagai modal pembangunan Indonesia. Meski beberapa permasalahan masih harus diselesaikan, diantaranya : tata kelola, penyelesaian konflik, semakin rendahnya kondisi lingkungan, serta pentingnya sumberdaya untuk mendukung pemenuhan pangan, energi dan obat-obatan.



Identifikasi kondisi terkini Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga dilakukan yang didekati dari anasir kualitas udara, kualitas air, hutan dan lahan, pesisir dan lautan, dan keanekaragaman hayati. Keempat anasir tersebut dirangkum dalam status lingkungan hidup dan kehutanan.

Hasilnya, kualitas udara dipenuhi bahan pencemar yang didominasi oleh NO₂, SO₂ dan CO₂ yang dihasilkan sebagian besar dari kendaraan bermotor. Materi lain yang saat ini berada di udara adalah *particulate matter*(PM), sulfat, nitrat, amonia, natrium klorida, karbon, debu mineral dan air, Partikel debu di bawah 2,5 mikron (PM 2,5) sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan pada tahun 2012 ditemukan telah melampaui baku mutu di Surabaya, Pekanbaru, Bandung dan Jakarta.

Dari parameter COD, di berbagai daerah telah melampaui baku mutu. Limbah domestik menjadi penyumbang terbesar (60-90%) pencemaran air sungai di Pulau Jawa dan Sumatera. Limbah dengan kategori deterjen bahkan secara langsung dibuang dan mempengaruhi tingkat kecerahan air di beberapa wilayah pesisir dan laut.

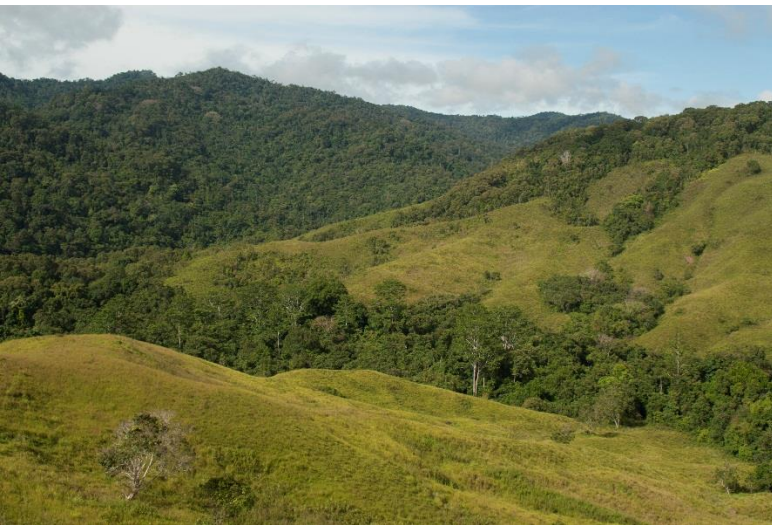
Kebakaran hutan masih menjadi permasalahan hutan dan lahan Indonesia, bersama dengan penataan pola ruang yang tidak terkendali, akhirnya menyebabkan keanekaragaman hayati Indonesia menjadi rentan terhadap kepunahan. Lebih lanjut, status lingkungan hidup dan kehutanan disajikan pada Tabel 2.

Atas ke bawah : Mantan menteri, aktifis lingkungan dan akademisi pada perluasan diskusi hasil identifikasi permasalahan. Sedangkan 2 foto di bawah adalah situasi identifikasi permasalahan dan konsultasi di Solo dan Pontianak oleh fasilitator. Foto disumbangkan oleh Bambang Murti Aji, Muhammad Desbi Adtya dan Sandi Kusuma. Ketiganya staf di Biro Perencanaan.

Tabel 2. Status lingkungan hidup dan kehutanan

BIOFISIK					TATA KELOLA
UDARA	AIR	HUTAN DAN LAHAN	PESISIR DAN LAUT	KEANEKARAGAMAN HAYATI	(disarikan dari The 2014 Indonesia <i>Forest Governance Index</i> , UNDP)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan beberapa pencemar udara terutama NO₂, SO₂ dan CO₂, yang sumbangan terbesarnya adalah kendaraan bermotor (mencapai 50%) 2. Resiko lainnya adalah particulate matter (PM), yang terdiri dari sulfat, nitrat, amonia, natrium klorida, karbon, debu mineral dan air, yang memiliki dampak paling besar kepada manusia. Partikel debu diameter di bawah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas air sungai menurun di Pulau Jawa dan Sumatera, yang disebabkan pencemaran air yang berasal dari limbah domestik yang mempunyai kontribusi sebesar 60-90%. 2. Parameter Chemical Oxygen Demand di sungai yang berada di sebagian besar provinsi di Indonesia telah melebihi baku mutu yaitu sebesar 25 mg/l. 3. Penurunan beban pencemaran dari sektor industri melalui sistem pengawasan dari program peringkat kinerja perusahaan (PROPER) sebesar 52,3% atau 19,88 milyar kg dari total air limbah organik. Sedangkan sektor rumah tangga hanya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh hutan dan lahan mencakup deforestasi, kebakaran, dan lahan kritis. Luas tutupan hutan di Indonesia sebesar 104 juta ha di tahun 2000 menjadi 98 juta ha di tahun 2011. Dengan demikian, total areal mengalami deforestasi seluas 6,5 juta ha selama rentang 11 tahun. 2. Laju penurunan luasan mencapai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada 1.133 lokasi terumbu karang di Indonesia pada tahun 2012, 5,30% terumbu karang beradadalam kondisi sangat baik; 27,19% dalam keadaan baik; 37,25% cukup baik dan 30,45% kurang baik. Selain terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove juga mengalami kerusakan karena alih fungsi lahan, seperti perkebunan, tambak dan pemukiman. 2. Tingkat kecerahan air di Pelabuhan Tanjung Priok, Ciwandan dan Teluk Tomini 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia merupakan rumah dari 17% total spesies yang ada : 35 ribu – 40 ribu spesies tumbuhan (11-15%), 707 spesies mamalia (12%), 350 spesies amfibi dan reptil (15%), 1.602 spesies burung (17%) dan 2.184 spesies ikan air tawar (37%). Sementara untuk kelautan terdapat setidaknya 2.500 spesies molusca, 2000 spesies krustasea, 6 spesies penyu laut, 30 spesies mamalia laut, dan lebih dari 2.500 spesies ikan. Sebagian besar spesies tersebut harus menghadapi ancaman kepunahan karena 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepastian kawasan hutan dan lahan. Penguatan pengurusan, hukum dan kerangka kebijakan untuk mendorong telah dibangun, namun demikian belum diikuti dengan upaya peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat setempat untuk implementasinya, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten. Angka indeks di tingkat nasional, tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten berturut-turut sebesar 36-47-36-32. 2. Keadilan atas sumberdaya hutan. Pengurusan dan kerangka kebijakan telah mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat serta hadirnya undang-undang Desa. Meskipun demikian, hal ini belum diikuti dengan ketepatan dalam pelaksanaannya, utamanya untuk melindungi dan mengakui keberadaan masyarakat adat. Terkait dengan proporsi pengelolaan hutan, pengelolaan hutan oleh perusahaan masih sangat dominan (96%), dibandingkan untuk masyarakat (4%). Nilai indeks untuk nasional, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten : 35-32-36-30.

BIOFISIK					TATA KELOLA
UDARA	AIR	HUTAN DAN LAHAN	PESISIR DAN LAUT	KEANEKARAGAMAN HAYATI	(disarikan dari The 2014 Indonesia <i>Forest Governance Index</i> , UNDP)
<p>2,5 mikron (PM 2,5) bisa berujung pada kematian dibandingkan dengan debu diameter di bawah 10 mikron (PM 10). Sementara, partikel debu 2,5 – 10 mikron berisiko kepada asma dan infeksi saluran pernafasan (ISPA).</p> <p>3. Melalui pemantauan Gent Stacked Filter Unit Sampler, untuk PM_{2,5} tahun 2012 ditemukan telah melampaui baku mutu di Surabaya, Pekanbaru, Bandung dan Jakarta</p>	<p>berhasil menurunkan 5,4% atau 139,69 juta kg beban setiap hari.</p> <p>4. Perbaikan Kualitas di 2 danau (Danau Batur dan Danau Singkarak). Keduanya memiliki kualitas air yang masih alami, belum tercemar nitrogen dan fosfor. Danau Toba dan Danau Kerinci termasuk kategori tercemar ringan. Danau Tempe berstatus cemar berat, dengan kadar nitrogen dan fosfor yang tinggi.</p> <p>5. Penurunan kualitas air sungai dan danau akibat pencemaran dan perubahan tata guna lahan yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia berdampak pada kuantitas ketersediaan air, menyebabkan semakin terbatasnya pilihan untuk digunakan sebagai penyedia air minum.</p>	<p>lebih dari 1%/tahun, terutama Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Bengkulu. Sementara Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Selatan berhasil melakukan reforestasi dalam rentang waktu 2009 hingga 2011.</p> <p>3. Kasus kebakaran hutan cenderung menurun sejak 2002, namun ironisnya, kebakaran masih terjadi dan justru di wilayah konservasi dibandingkan di wilayah lainnya (pada periode 2005-2011).</p>	<p>beradadi bawah tiga meter, melebihi baku mutu air laut (BMAL). Selain itu, kandungan amoniak yang melebihi ambang batas juga terdeteksi di Pelabuhan Tanjung Priok dan outlet Sungai Olaya di Pelabuhan Parigi.</p> <p>3. Tingginya deterjen atau methylene blue active substance (MBAS) yang ditemukan menunjukkan bahwa polutan dari limbah domestik tersebut langsung dibuang ke wilayah sungai atau perairan berakibat pada pencemaran pesisir dan laut.</p>	<p>perusakan habitat dan perburuan untuk beberapa spesies tertentu akibat tingginya permintaan. Jumlah spesies yang dilindungi mencakup 127 spesies mamalia, 382 spesies burung, 31 spesies reptilia, 12 spesies palmae, 11 spesies raflesia dan 29 spesies orchidaceae.</p> <p>2. Berdasarkan data IUCN, untuk satwa ada 2 spesies berkategori punah, 66 spesies berkategori kritis, dan 167 spesies kondisi genting. Untuk tumbuhan, 1 spesies punah, 2 spesies punah in situ, 115 spesies kritis, dan 72 spesies berstatus genting.</p>	<p>3. Transparansi dan Integritas Pengelolaan Hutan. Terobosan penting dalam pencegahan kasus korupsi pada sektor kehutanan seperti proses perijinan telah dilakukan, diantaranya melalui kerjasama bersama KPK dan UKP4. Namun belum ada <i>guideline</i> pencegahan korupsi di tingkat provinsi atau kabupaten. Peningkatan kapasitas di KPH masih harus ditingkatkan. Hingga saat ini, hanya sebanyak 65 unit KPH yang dapat dianggap beroperasi. Terkait dengan sertifikat PHPL, masih belum dapat menunjukkan keterkaitan dengan perbaikan di tingkat tapak, bisa jadi hal ini disebabkan karena perusahaan yang telah memperoleh sertifikat belum menerima insentif yang memadai. Praktik gratifikasi sudah mulai berkurang meski belum bisa menekan ekonomi biaya tinggi terutama dalam proses perijinan. Nilai indeks dari level nasional, pusat, provinsi dan kabupaten, berturut-turut : 34-50-28-25.</p> <p>4. Kapasitas penegakan hukum. Peningkatan upaya penegakan hukum sudah mulai dilakukan melalui multidoors approach, namun implementasinya masih memerlukan koordinasi yang sinergis. Selain itu, upaya penegakan hukum masih belum menyentuh aktor kunci. Nilai indeks untuk nasional, pusat, provinsi dan kabupaten, berturut-turut adalah 36-49-32-27.</p>



Pandangan berbagai pihak dan hasil identifikasi lapangan akhirnya dipetakan untuk mengetahui lingkungan strategis Kementerian, yang komponen pembangunannya dipetakan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa dengan adanya penggabungan 2 Kementerian, ruang lingkup tugas yang diembannya justru semakin luas, membawa konsekuensi dan keyakinan bahwa pembangunan yang akan dilakukan senantiasa mempertimbangkan kemampuan sumberdaya untuk memulihkan dirinya sehingga generasi nanti tetap memiliki akses yang sama terhadap sumberdaya, baik jumlah maupun nilainya .

KEKUATAN :

- Wilayah yang menjadi tanggung jawab kementerian sangat luas dengan keanekaragaman hayati yang tinggi
- Mandat dan instrument pelaksanaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan menjaga kualitas lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia.
- Keberhasilan pembangunan 2010-2014, yang menjadi modal dalam pelaksanaan pemenuhan kinerja

KELEMAHAN :

- Terbatasnya pengetahuan tentang spesies sebagai individu maupun komunitas.
- Jumlah penduduk yang tinggi dengan penyebaran yang tak merata sementara itu keanekaragaman hayati yang tinggi umumnya dibarengi dengan rendahnya kelimpahan individu dari tiap spesies
- Pengembangan kapasitas daerah bersifat jangka pendek dan kurang mencerminkan target strategis.
- Kapasitas penegak hukum lingkungan dan kehutanan belum bisa menanggulangi pelanggaran hukum lingkungan hidup & kehutanan yang terkait dengan penataan ruang, pencegahan kerusakan hutan, pencucian uang dan tindak pidana korupsi

PELUANG :

- Pembangunan berkelanjutan yang menjadi inti dari pembangunan global pasca-2015 memungkinkan instrumen kebijakan lingkungan meningkatkan peran KLHK dalam pembangunan
- pengalaman berkaitan dengan upaya melestarikan lingkungan. Kegiatan-kegiatan pro-lingkungan swadaya masyarakat semakin sering dilaksanakan
- Kebutuhan akan pangan, energi dan obat-obatan yang dimungkinkan dapat dipenuhi dari keanekaragaman hayati

ANCAMAN :

- Ketidakadilan pemanfaatan SDA yang berujung pada konflik sosial terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan mempertajam ketidakpastian pengelolaan SDA
- Kondisi lingkungan yang semakin memburuk, ditandai dengan semakin rendahnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia
- Kalkulasi nilai lingkungan dan hutan yang senantiasa disandingkan dengan nilai langsung yang diperoleh

Foto atas adalah lanskap TN. Kayan Mentarang. Foto oleh Rochmat Kurniawan, staf Balai TN. Kayan Mentarang

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah : (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan 9 agenda pembangunan Tahun 2015-2019, yang di dalamnya memuat sub agenda dan sasaran yang hendak dicapai dan menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan pembangunan dibagi ke dalam : prioritas nasional, yang memuat sasaran pembangunan yang memiliki kaitan langsung dengan janji Presiden dan Wakil Presiden; prioritas bidang, yang memuat sasaran yang memiliki kaitan terhadap bidang sumberdaya alam dan lingkungan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan lintas bidang yang sarannya merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian.

Foto adalah Elang Brontok di TN. Gunung Halimun Salak. Foto adalah dokumentasi Balai TN. Gunung Halimun Salak



Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu **memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.**

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan

Foto adalah kehidupan masyarakat di TN. Taka Bonerate, Sulawesi Selatan. Foto disumbangkan oleh Asri, staf Balai TN. Taka Bonerate



dan kualitas lingkungan hidup, dengan toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

devisa dan PNPB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).



hutan melalui kemitraan, termasuk pengembangan hutan adat.

Kayu Sengon hasil produksi Hutan Rakyat di Kabupaten Wonosobo siap diangkut ke industri pengolahan kayu. Foto oleh Sandi Kusuma, Biro Perencanaan

Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

SUB AGENDA	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional	Peningkatan kualitas tata kelola a. Berkurangnya kawasan hutan berstatus <i>open acces</i> dengan mengembangkan KPHP menjadi 347 unit b. Meningkatkan penerapan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari untuk KPHP dan hutan produksi di bawah IUPHHK-HA	Meningkatkan tata kelola kehutanan (<i>good forest governance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Pemisahan peran administrator (regulator) dengan pengelola (operator) kawasan hutan melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan operasionalisasinya Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari Pemberian jaminan legalitas hasil hutan kayu dan produk kayu Memperkuat sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung operasionalisasi KPH Pengembangan forest based <i>cluster industry</i> Memperkuat fungsi pemerintah sebagai fasilitator.
	Peningkatan produksi kayu dalam periode 2015-2019 a. Meningkatkan produksi kayu buat dari hutan alam menjadi 29 juta m ³ b. Meningkatkan produksi kayu bulat dari hutan menjadi 160 juta m ³ c. Meningkatkan produksi kayu hutan rakyat menjadi 100 juta m ³ d. Meningkatkan nilai ekspor produk kayu menjadi USD40,37 miliar	Meningkatkan produksi dan produktivitas sumber daya hutan	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk kayu serta diversifikasi produk Peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha dalam bentuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR).
		Mengembangkan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Deregulasi dan debottlenecking peraturan perundang-undangan yang birokratis dan tidak pro investasi serta mendesentralisasikan keputusan kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan pada tingkat tapak Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan untuk industri hulu hingga industri hilir dengan mengembangkan keterpaduan industri berbasis hasil hutan (<i>forest based cluster industry</i>) guna meningkatkan nilai tambah, meningkatkan efisiensi industri serta meningkatkan <i>value supply chain</i>.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomidomestik

SUB AGENDA	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan	Konservasi hutan : a. Meningkatnya populasi 25 spesies satwa terancam punah (sesuai <i>The IUCN Red Lists of threatened species</i>) sebesar 10 persen sesuai baseline data tahun 2013 dalam rangka pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya b. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi seluas 27,12 juta ha termasuk perlindungan kawasan karst, gambut, dan mangrove c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik serta menurunkan jumlah hot spots kebakaran hutan d. Peningkatan kualitas data dan informasi keanekaragaman hayati.	Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya spesies, dan sumber daya genetik,	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efektivitas pengelolaan Resort Based Management (RBM) pada seluruh kawasan hutan konservasi sehingga fungsi pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan sumber daya hutan dapat berjalan dengan baik; Pembentukan pusat penelitian terintegrasi tentang keanekaragaman hayati di dalam taman nasional, dan KPHK; Peningkatan kerja sama (kemitraan) dengan pihak ketiga dalam pengelolaan penangkaran ex-situ tanaman dan satwa liar, serta penyelamatan 20 satwa dan tumbuhan langka; Pengembangan skema pendanaan (trust fund) bagi kawasan hutan konservasi berikut mekanisme pengawasannya; Meningkatkan sarana dan prasarana perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan; Peningkatan kuantitas dan kualitas Manggala Agni dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan; Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; dan Peningkatan inventarisasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
	Tata kelola hutan : a. Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan 100 persen b. Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000km c. Operasionalisasi 629 KPH yang terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL, 50 Taman Nasional, dan 100 KPHK bukan Taman Nasional (TN) d. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR (dari 500.000 ha pada tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha pada tahun 2019)	Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak.	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas, pemetaan dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak; Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di tingkat tapak pada seluruh kawasan hutan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mendukung fungsi produksi, lindung dan konservasi dikelola secara optimal, efisien, dan efektif; Meningkatkan kapasitas pengelola KPH sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan; dan Meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan.
Perbaikan kualitas lingkungan hidup	a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam indeks kualitas lingkungan hidup (iklh) menjadi sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019 b. Meningkatnya role model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan	Kebijakan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup meliputi: (i) Penguatan mekanisme pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup; (ii) Penyempurnaan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH); (iii) Pengembangan metodologi perhitungan, penyusunan peta dan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan daerah; (iv) Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan penegakan hukum lingkungan; dan (v) Pengembangan sistem neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang bersifat lintas sektor.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomidomestik

SUB AGENDA	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, antara lain mencakup: kelembagaan, sumber daya manusia, penegakan hukum lingkungan, dan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas lingkungan hidup: a. Peningkatan kualitas air melalui: (i) pengendalian pencemaran akibat limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari limbah domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (danau, sungai, situ/embung, waduk). b. Peningkatan kualitas udara melalui: (i) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; (ii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca; dan (iii) pemantauan kualitas udara ambien; dan c. Peningkatan tutupan lahan/hutan melalui: (i) penguatan upaya rehabilitasi hutan; (ii) peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan; (iii) rehabilitasi lahan kritis dan terlantar; (iv) pengendalian kerusakan ekosistem; dan (v) pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3, serta kawasan pesisir dan laut. • Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati. Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dilakukan dengan mengacu kepada dokumen Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2003-2020 yang telah diperbarui yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan kesepakatan global (Aichi Target). Untuk itu, srategi pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan terus ditingkatkan untuk mengendalikan kerusakan dan punahnya keanekaragaman hayati yang akan menjadi basis bio-resources (pangan, biofarmaka, kesehatan, kosmetik, dll); serta pengembangan keekonomian keaneka- ragaman hayati dan jasa lingkungan untuk memperkuat pembangunan perekonomian dan kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat; • Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan sebagai upaya efisiensi penggunaan sumberdaya dan pengurangan beban pencemaran terhadap lingkungan hidup serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Langkah ini didukung dengan perubahan pola produksi dan konsumsi serta gaya hidup masyarakat melalui edukasi, kampanye, penerapan prinsip- prinsip pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dalam business cycle dan business process, pengembangan standar produk yang ramah lingkungan dan pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi yang berkelanjutan; 5. Penguatan instrumen pengelolaan lingkungan serta sistem insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: memperkuat kriteria penilaian Adipura, memperluas cakupan PROPER dan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), mobilisasi pendanaan lingkungan hidup melalui kerjasama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat; 6. Penegakan hukum lingkungan, meliputi: penyelesaian peraturan

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomidomestik

SUB AGENDA	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			operasional turunan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta penyelesaian sengketa, kasus, tindak pidana dan perdata lingkungan secara tuntas.
Penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan informasi kebencanaan sasaran	Meningkatnya penanganan perubahan iklim, baik berupa kegiatan mitigasi untuk menurunkan emisi GRK sebesar mendekati 26 persen pada tahun 2019 di lima sektor prioritas, yaitu: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, maupun kegiatan adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di 15 (lima belas) daerah rentan	Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan dan mendukung pelaksanaan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon Melaksanakan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mengurangi/menurunkan emisi GRK Melaksanakan inventarisasi GRK yang berkesinambungan Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK Mendorong pemerintah daerah menyusun strategi/rencana aksi adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API dan kajian kerentanan daerah Melaksanakan upaya adaptasi berdasarkan dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), terutama di 15 (lima belas) daerah rentan Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim
	Meningkatnya sistem peringatan dini cuaca dan iklim, serta kebencanaan	Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana)	<ul style="list-style-type: none"> Menambah kerapatan jaringan peralatan dan sensor Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia/forecaster Mengembangkan sarana/media komunikasi/diseminasi informasi peringatan dini Melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan secara rutin Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas informasi peringatan dini antar instansi terkait Meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam memahami informasi peringatan dini
	Tersedianya data dan informasi untuk mendukung penanganan perubahan iklim	Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan	<ul style="list-style-type: none"> Mempercepat pengolahan data adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara terus menerus dan akurat Mendiseminasikan data dan informasi iklim kepada para pemangku kepentingan Mengembangkan proyeksi iklim untuk seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung penanganan perubahan iklim
	Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG).	Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG yang mudah diakses dan berkesinambungan,; dan (5) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dan informasi MKG.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui instalasi peralatan otomatis/digital Meningkatkan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi yang mendukung kelancaran dan keselamatan penerbangan dan maritim, serta mendukung ketahanan pangan dan energi Memperkuat database MKG yang terintegrasi dan memperluas jaringan diseminasi informasi MKG Menambah kerapatan jaringan peralatan dan sensor peralatan MKG
Peningkatan ketahanan air	Penanganan DAS yang meliputi: penyelesaian status DAS lintas negara, pemulihan kesehatan dan peningkatan perlindungan mata air di 4 DAS Prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS	Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kawasan hulu DAS secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan kapasitas sumber daya air, melalui: (i) Pengelolaan DAS terpadu, yang dilakukan melalui penyelesaian status DAS Lintas Negara, Implementasi pemulihan dan perlindungan mata air 4 (empat) DAS prioritas

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomidomestik

SUB AGENDA	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	Kapuas, dan DAS Siak) dan 26 DAS Prioritas lainnya melalui konservasi sumber daya air secara vegetatif, pembangunan embung, pembangunan dam pengendali dan penahan, gully plug, serta sumur resapan di daerah hulu DAS		nasional dan 26 DAS prioritas lainnya; (ii) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS; (iii) Rehabilitasi hutan di dalam KPH dengan mempertimbangkan jenis tanah dan jenis tanamannya; (iv) Peningkatan kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah (kabupaten/kota) dengan berbasis DAS melalui perbaikan koordinasi dan pemahaman para pihak; (v) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mendorong keseimbangan pendekatan non struktural dan struktural melalui penerapan paradigma <i>eco- sustainable water infrastructure</i> (ESWIN) dan <i>more room for river</i> ; dan (vi) Penataan aktivitas masyarakat, pertanian, industri berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah dalam rangka menjamin ketersediaan dan kualitas air.
	Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar		<ul style="list-style-type: none"> Konservasi sumber daya air, melalui: (i) Menyelesaian hambatan perizinan, pembiayaan, penyediaan lahan termasuk lahan hutan, dan penanggulangan masalah sosial penduduk; (ii) Peningkatan dan pelestarian sumber-sumber air, antara lain melalui penetapan status sumber air serta fasilitasi penyusunan rencana aksi terintegrasi dan terkonsolidasi berdasarkan dokumen perencanaan pemangku kepentingan (RP-DAS, Pola Rencana, RKPd); (iii) Perbaikan Sistem Monitoring Hidrologis dan Kualitas Air di 15 Danau prioritas/Situ-Situ kritis, dan danau cemar sedang; (iv) Melanjutkan revitalisasi 15 Danau Prioritas melalui pemberdayaan masyarakat di <i>catchment area</i> dan sekitar danau, serta penataan Garis Sempadan Danau; (v) Mitigasi pencemaran sungai melalui upaya struktural dan non struktural seperti percepatan pembangunan sanitasi dan pengolahan limbah di wilayah bantaran Sungai; dan (vi) Pengembangan metode pengelolaan rawa berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan dan konservasi secara adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan yang dituangkan dalam RTRW
	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS seluas 12,7 juta hamelalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), pengembangan ekowisata skala kecil, serta hasil hutan bukan kayu		
	Internalisasi 108 rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam RTRW		



Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk mempertahankan keanekaragaman dengan tetap memberikan pilihan ekonomi bagi masyarakat Sumatera Selatan. Foto disumbangkan oleh *Biological Diversity and Climate Change Programme*. Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Jerman.

Untuk prioritas pembangunan bidang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masuk pada bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, yang merupakan modal utama pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi berbasis SDA dan LH.

NO	SASARAN BIDANG	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan			
1.	Pengembangan KPH produksi dan produk kayu : <ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan 347 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Berproduksinya kayu bulat dari hutan alam sebesar 29 juta m³ Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan tanaman menjadi 160 juta m³ Meningkatnya nilai ekspor produk kayu menjadi USD 40,4 miliar 	Peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya hutan, penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari, penerapan prinsip tata kelola hutan yang baik (good forest governance), pemberian jaminan legalitas hasil hutan kayu dan produk kayu, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas tata kelola kehutanan (good forest governance) dengan melakukan pemisahan peran administrator (regulator) dengan pengelola (operator) kawasan hutan melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Deregulasi dan de-bottlenecking peraturan perundang-undangan yang birokratis dan tidak pro investasi serta mendesentralisasikan keputusan kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan pada tingkat tapak Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan sejak industri hulu hingga industri hilir dengan mengembangkan keterpaduan industri berbasis hasil hutan (forest based cluster industry) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri hulu dan hilir untuk meningkatkan nilai tambah melalui aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia yang berkompeten serta penerapan good corporate governance.
2.	Pengembangan KPH lindung dan hasil hutan bukan kayu : <ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan 182 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Meningkatnya HKm, HD dan HR Meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari hutan lindung Meningkatnya pendapatan dari ekowisata dan jasa lingkungan khususnya air baku untuk domestik, pertanian, dan industri Meningkatnya kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan, khususnya dari jasa air baku, karbon, pariwisata alam, dan bio-prospecting untuk produksi obat-obatan, kosmetika, dan bahan makanan. 	Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat/peningkatan pendapatan dan kelestarian hutan lindung, maka akses masyarakat terhadap sumber daya hutan lindung perlu ditingkatkan. HKm dan HD perlu ditingkatkan dan diperluas cakupannya dengan disertai peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaannya. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan di luar kawasan hutan lindung juga perlu ditingkatkan dengan pengembangan Hutan Rakyat.	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan perluasan HKm dan HD Penegakan hukum dengan tegas Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan Reboisasi dan penghijauan dengan jenis tanaman sesuai keinginan masyarakat dalam pemilihan jenisnya Pengembangan agro-forestry Fasilitasi permodalan dan teknologi tepat guna.
Peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS			
1.	Peningkatan kinerja tata kelola kehutanan : <ol style="list-style-type: none"> Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan mencapai 100 persen; 	Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas, pemetaan

NO	SASARAN BIDANG	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	b. Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000 km; c. Operasionalisasi 629 KPH yang terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL dan 100 KPHK Bukan Taman Nasional; d. Peningkatan kinerja pengelolaan KPH; e. Tertanganinya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan; f. Menurunnya jumlah hotspots kebakaran kawasan hutan.	batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan dengan melibatkan semua stakeholders, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan mempermudah perizinan dalam melakukan investasi di sektor kehutanan.	dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak. <ul style="list-style-type: none"> Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di seluruh areal kawasan hutan yang mendukung fungsi produksi, lindung dan konservasi. Meningkatkan kapasitas pengelola KPH sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan. Meningkatkan sarana dan prasarana KPH dalam rangka perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan. Meningkatkan penelitian dan pengembangan kehutanan untuk mendukung peningkatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan hutan dalam KPH. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam mengelola hutan di dalam KPH.
2.	Peningkatan konservasi dan keanekaragaman hayati : a. Meningkatnya kualitas fungsi dan kelestarian hutan konservasi serta keanekaragaman hayati di dalamnya. b. Terbentuknya dan beroperasinya KPHK Non Taman Nasional sebanyak 100 unit. c. Penyelesaian seluruh tata batas dan penetapan kawasan konservasi khususnya di 50 Taman Nasional. d. Evaluasi seluruh Rencana Pengelolaan 50 Taman Nasional. e. Terselenggaranya kegiatan pusat pengembangbiakan dan suaka satwa liar (<i>sanctuary</i>) di seluruh 50 Taman Nasional untuk 25 jenis spesies langka f. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai keekonomian KEHATI. g. Selesainya panduan pengelolaan dan pemanfaatan KEHATI secara berkelanjutan. h. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati (KEHATI) dan jasa lingkungan secara berkelanjutan sebagai sumber bahan baku untuk sandang, pangan, papan, obat-obatan, kosmetik, energi alternatif, dan ekowisata. i. Termanfaatkannya produk hasil keanekaragaman hayati dan jasa	Memberikan kewenangan dan keleluasan bagi pengelola kawasan hutan konservasi di tingkat tapak untuk melindungi, meningkatkan kualitas habitat, mengawetkan spesies serta sumber daya genetik dan mendorong terselenggaranya pemanfaatan jasa lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan di dalam kawasan hutan konservasi.	<ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan seluruh tata batas dan proses pengukuhan kawasan hutan konservasi (KPHK) Meningkatkan efektivitas pola Resort Based Management (RBM) pada seluruh KPHK sehingga fungsi pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan dapat berjalan dengan baik Mengembangkan berbagai pola kemitraan dengan masyarakat setempat, khususnya pada wilayah konflik di kawasan hutan konservasi Meningkatkan sarana dan prasarana KPHK untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan hutan konservasi Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan diseluruh KPHK-TN dan KPHK lainnya untuk mendapatkan profil potensi sumber daya hutan, termasuk jasa lingkungan didalamnya Mengembangkan skema pendanaan dan untuk mendukung kawasan konservasi berikut mekanisme pengawasannya; Mengoptimalkan kerjasama dengan pihak ke tiga dalam pengelolaan penangkaran tanaman

NO	SASARAN BIDANG	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	<p>lingkungan secara optimal, adil, dan lestari bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>j. Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan konservasi, khususnya pada pengawetan spesies langka dan pengembangan teknologi plasma nutfah serta pemanfaatan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan secara berkelanjutan.</p> <p>k. Meningkatnya jumlah kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan khususnya dari jasa lingkungan air, karbon, pariwisata alam, dan bioprospecting untuk produksi obat-obatan, kosmetika dan bahan makanan;</p> <p>l. Meningkatnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ekspor tanaman dan satwa liar serta bioprospecting.</p>		dan satwa liar dan penyelamatan 25 satwa dan tumbuhan langka.
3.	<p>Peningkatan pengelolaan DAS :</p> <p>a. Menyelesaikan status DAS lintas Negara</p> <p>b. Mengurangi luasan lahan kritis seluas 5,5 juta hektar, melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS Prioritas.</p> <p>c. Memulihkan kesehatan 5 DAS prioritas (DAS Ciliwung, DASCitarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo, dan DAS Brantas) sejak tahun 2015, dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019 melalui kegiatan lintas sektor dengan indikator: (a) menurunnya Koefisien Regim Sungai (KRS) Qmax/Qmin selama 5 tahun; (b) meningkatnya Indeks Penutupan Lahan Permanen (IPLP) secara proporsional dalam DAS selama 5 tahun dan (c) meningkatnya kualitas air melalui penurunan kadar Biological Oxygen Demand (BOD) selama 5 tahun.</p> <p>d. Meningkatkan perlindungan mata air di 5 DAS prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo, dan DAS Brantas) sejak tahun 2015 dan 10 DAS prioritas lainnya sampai tahun 2019 melalui konservasi sumber daya air secara vegetatif, pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan, gully plug, di daerah hulu DAS, serta sumur resapan.</p> <p>e. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS seluas 12,7 Juta Ha melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).</p>	<p>Percepatan implementasi pemulihan kualitas DAS Prioritas Nasional</p> <p>Mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan DAS</p> <p>Internalisasi dokumen RPDAST yang telah disusun ke dalam rencana tata ruang wilayah.</p>	<p>Percepatan implementasi pemulihan DAS Prioritas Nasional melalui penyelesaian status DAS lintas negara, rehabilitasi dan restorasi hutan dan lahan berbasis DAS, pengadaan peralatan dan perlengkapan Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS) pada 15 DAS Prioritas, serta peningkatan kapasitas pengelola DAS.</p> <p>Mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan DAS melalui peningkatan luasan HTR, HD, dan HKm serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam proses implementasi pemulihan RPDAST Prioritas Nasional dan perlindungan mata air.</p> <p>Internalisasi Dokumen RPDAST yang telah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah melalui peningkatan pemahaman dan kualitas koordinasi pemangku kepentingan dalam penyusunan dan implementasi rencana tata ruang wilayah (provinsi/kabupaten/kota) agar berbasis ekosistem DAS dan RPDAST yang telah disusun.</p>

NO	SASARAN BIDANG	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	f. Internalisasi 108 RPDAST yang sudah disusun ke dalam RTRW. g. Pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah di daerah hulu 15 DAS Prioritas melalui kemitraan dengan petani h. Pembinaan dan pengelolaan 182 KPHL. i. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan 15 DAS prioritas j. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan k. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi 15 DAS prioritas.		
Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian kehati			
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup : 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5- 68,5 pada tahun 2019 yang didukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang handal; 2. Menguatnya kerangka pengendalian dan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup; 3. Meningkatnya pemanfaatan IPTEK dan SDM untuk peningkatan nilai ekonomi keanekaragaman hayati dan menyempurnakan panduan mengenai langkah-langkah untuk pengelolaan dan pemanfaatan KEHATI secara berkelanjutan; 4. Mengarusutamakan keanekaragaman hayati (KEHATI) pada kegiatan perencanaan pembangunan nasional.	Menerapkan IKLH sebagai ukuran kualitas lingkungan hidup nasional. Menerapkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dengan peningkatan kesadaran dan kapasitas para pihak terhadap pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; penyusunan konsep kebijakan operasional pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dan pengembangan sistem pendukungnya; dan penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan di sektor-sektor prioritas, serta pola konsumsi masyarakat yang berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> Menjaga kualitas dan ketersediaan data dan informasi parameter yang dipergunakan di dalam IKLH Memantapkan metodologi analisis yang digunakan untuk penilaian Memantapkan aspek kriteria dan ukuran yang lebih komprehensif dan konsisten Inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan Penyediaan dan penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen/masyarakat melalui berbagai media Penyediaan pusat-pusat pelayanan masyarakat; Penerapan prinsip-prinsip Sustainable Consumption and Production/SCP dalam "business cycle" dan "business process" di pihak Pemerintah, Swasta dan masyarakat termasuk dalam hal pendanaan; Menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah Pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan.
2.	Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Memperluas kriteria program Adipura yang komprehensif (matra air, udara, lahan, sampah, kelembagaan, dan kapasitas SDM) memperluas cakupan program Proper yang mengarah pada industri yang lebih ramah lingkungan; mengembangkan dan

NO	SASARAN BIDANG	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			<p>mengimplementasikan skema insentif dan disinsentif untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> menyusun Inpres dan Road Map pencegahan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
		Mengelola limbah dan bahan B3,	<ul style="list-style-type: none"> Menerapkan standar/aturan mengenai limbah dan bahan B3 Memperkuat pengawasan limbah dan bahan B3.
		Meningkatkan pengelolaan sampah yang terpadu	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan upaya 3R (reduce, reuse, dan recycle); Pengembangan bank sampah dan pengomposan Pengembangan sistem pengolahan sampah yang terpadu, baik skala komunal maupun nasional Peningkatan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui "Gerakan Tiga Jari" pengelolaan sampah.
		Melakukan upaya pemulihan pada kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi,	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan inventarisasi dan penilaian (assessment) Secara terkoordinasi melakukan pemulihan kawasan bekas tambang, hutan/tutupan lahan, pesisir dan laut serta badan air yang kritis.
3.	Memperkuat kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	Membina dan meningkatkan kapasitas SDM lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan PPNS, termasuk di dalamnya jabatan fungsional pengawasan lingkungan hidup (PPLH) Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada PPNS dan PPLH secara berkesinambungan
		Meningkatkan kepastian hukum lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Menyelesaikan peraturan pelaksanaan turunan UU No. 32/2009 tentang PPLH Meningkatkan pelayanan penyelesaian kasus dan sengketa lingkungan hidup Meningkatkan kerjasama dengan instansi penegak hukum.
4.	Melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi kehati, sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP 2003-2020	Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan KEHATI berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan pemanfaatan KEHATI yang berkelanjutan dan ramah lingkungan Pengembangan potensi keekonomian KEHATI Peningkatan hubungan antara industri dan hasil penelitian lembaga riset Indonesia Peningkatan hubungan antara industri dan hasil penelitian lembaga riset Indonesia Pengembangan kebijakan yang mendukung keunggulan komparatif industri hilir (nilai tambah) Industri berbasis bioresource (energi, farmasi, kesehatan,

NO	SASARAN BIDANG	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			kosmetik, pangan, dan biomaterial).
		Meningkatkan upaya pelestarian fungsi KEHATI agar terjaga daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihannya (restorasi),	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan kuantitas kehati dengan melakukan perlindungan spesies, ekosistem, dan genetik • Pengembangan dan penerapan kebijakan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in-situ maupun eks-situ • Penangkaran flora dan fauna yang terancam punah untuk pelestarian flora dan fauna di habitat alamnya, serta memenuhi permintaan pasar
		Memantapkan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang, serta meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam mendukung implementasi pengelolaan kehati	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan pendanaan pengembangan riset, data base, dan tenaga ahli • Penelitian mendasar pemanfaatan dan pengelolaan kehati, serta pengembangan IPTEK dan inovasi teknologi terapan yang tepat (termasuk local wisdom) secara terintegrasi • Valuasi kehati terkait kontribusinya terhadap pembangunan • Kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat dan institusi penelitian dalam pengembangan bio-based ekonomi • Implementasi konvensi melalui perencanaan, manajemen pengetahuan, dan capacity building.
		Meningkatkan kualitas SDM, serta dukungan politik, regulasi, dan anggaran dalam pengelolaan kehati melalui pengarusutamaan isu kehati pada setiap tataran kelembagaan dan masyarakat	Gerakan penyadaran pentingnya bioresources dan kehati dalam sektor pangan, bioenergi, obat-obatan dan jasa lingkungan.
Penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.			
1.	Meningkatnya penanganan perubahan iklim baik kegiatan mitigasi tercermin dengan menurunnya emisi GRK di lima sektor prioritas : kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, sebesar mendekati 26 persen pada tahun 2019, maupun kegiatan adaptasi dengan meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim khususnya di 15 (lima belas) daerah rentan yang merupakan daerah percontohan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API).	Melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mengurangi/menurunkan emisi GRK • Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) • Melaksanakan inventarisasi GRK yang berkesinambungan setiap tahunannya melalui Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIG GRK center) • Menerapkan sistem MRV di setiap bidang • Menyempurnakan indeks kerentanan dan indikator adaptasi; • Melaksanakan strategi adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API di lima belas daerah rentan

NO	SASARAN BIDANG	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim.



Gunung Merapi difoto dari Puncak Gunung Merbabu. Foto oleh Imas Fardilah, Biro Perencanaan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

SUB AGENDA	KONDISI	PROSES BISNIS KEMENTERIAN		HARAPAN PARA PIHAK
		KINERJA	LOKUS	
Ketahanan air	Tingginya frekuensi banjir dan tanah longsor	Menurunnya koefisien regim sungai (QMAX-QMIN)	1. DAS Citarum 2. DAS Ciliwung 3. DAS Serayu 4. DAS Solo 5. DAS Brantas 6. DAS Cisadane 7. DAS Kapuas 8. DAS Siak 9. DAS Musi 10. DAS Asahan Toba 11. DAS Jeneberang	Potensi banjir dan tanah longsor menurun
		Berkurangnya jumlah sampah yang masuk ke lingkungan air		
	Kualitas air di berbagai sungai semakin turun	Meningkatnya kualitas air : BOD, COD dan E-COLI melalui pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah dan restorasi		Kualitas air sungai meningkat dan dapat dikonsumsi untuk memenuhi

SUB AGENDA	KONDISI	PROSES BISNIS KEMENTERIAN		HARAPAN PARA PIHAK
		KINERJA	LOKUS	
	Ketersediaan air semakin sedikit untuk mendukung ketahanan pangan dan energi	Meningkatnya perlindungan mata air melalui konservasi air secara vegetatif, pembangunan embung, DAM pengendali, DAM penahan, gully plug	12. DAS Saddang 13. DAS Moyo 14. DAS Way Sekampung 15. DAS Limboto	kebutuhan dasar rumah tangga (mandi dan cuci)
		Menurunnya luas lahan kritis 5,5 juta ha di KPH dan DAS		Ketersediaan air meningkat, menjadi kondisi pemungkin untuk ketahanan pangan dan energi
		Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS seluas 12,7 Juta Ha melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).		
		Meningkatnya ekosistem di hutan produksi dan hutan konservasi yang direstorasi	Hutan produksi yang belum dibebani ijin, dan hutan konservasi yang terdgradasi	
Kesehatan	Tingginya Resiko Kesehatan (kanker) akibat paparan Logam Berat	Meningkatnya Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Pemulihan Tanah terkontaminasi Limbah B3	15 provinsi	Jumlah penderita penyakit kanker dan <i>minamata dease</i> akibat terpaparnya B3 dan Limbah B3 menurun
	Tingginya jumlah penderita ISPA karena kualitas udara menurun	Meningkatnya Kualitas Udara Perkotaan	Seluruh provinsi	Jumlah penderita ISPA menurun akibat meningkatnya kualitas udara
		Menurunnya Hotspot kebakaran hutan dan lahan	Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi	
Ketahanan Pangan	Produksi pangan belum mencukupi kebutuhan masyarakat	Meningkatnya luas lahan garapan petani di areal kerja pengelola hutan untuk tanaman padi seluas 100.000 Ha	Seluruh wilayah Perum Perhutani	Sumbangan terhadap produksi pangan, meski angka belum dapat diprediksi
		Meningkatnya luas lahan garapan petani di areal kerja pengelola hutan untuk tanaman jagung seluas 167.000 ha	Seluruh wilayah Perum Perhutani	
		Meningkatnya luas hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan seluas 100.000 ha	Seluruh taman nasional	
		Meningkatnya luas akses pengelolaan hutan kepada masyarakat sebesar 12,7 juta ha dalam bentuk HKm, HD, HTR dan HD	Seluruh provinsi	
Ketahanan Energi	Produksi energi belum mencukupi kebutuhan masyarakat	Meningkatnya luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk biomassa sebesar 100.000 ha	Sumatera, Kalimantan dan Papua	Produksi listrik setara 200 Megawatt dari bioenergi untuk membantu sasaran pemanfaatan bahan bakar nabati

SUB AGENDA	KONDISI	PROSES BISNIS KEMENTERIAN		HARAPAN PARA PIHAK
		KINERJA	LOKUS	
		Meningkatnya pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/mikro hydro power plant sebanyak minimal 50 unit	Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua barat dan Papua	Produksi listrik setara \pm 200 Megawatt dari mini/mikro hydro untuk membantu pencapaian salah satu sasaran utama penguatan ketahanan energi, yaitu rasio elektrifikasi sebesar 96,6% di tahun 2019
		Meningkatnya jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi minimal 5 unit	Jawa, Sumatera, Bali, NTB, NTT dan Maluku	Produksi energi setara \pm 300 Megawatt untuk membantu produksi energi baru dan terbarukan
		Meningkatnya pemanfaatan sampah dan limbah B3 untuk energi listrik	Jawa dan Sumatera	Produksi energi setara ... Untuk membantu produksi energi
Pariwisata	Jumlah wisatawan masih sangat sedikit berkunjung ke Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan konservasi minimal 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	Seluruh hutan konservasi	Kawasan hutan memberikan sumbangan terhadap jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan konservasi minimal 20 juta orang wisatawan nusantara		
Pelestarian SDA, LH dan Pengelolaan Bencana	Tingginya ancaman kepunahan spesies yang menyebabkan kekayaan hayati turun, baik skala ekosistem, spesies dan genetik	Meningkatnya persentase peningkatan populasi 25 spesies satwa terancam punah sesuai RED List IUCN sebesar 10%	Seluruh hutan konservasi	Menjamin keberadaan keanekaragaman hayati di Indonesia
		Meningkatnya jumlah taman nasional yang memiliki sanctuary spesies terancam punah	Seluruh taman nasional	
		Meningkatnya jumlah kawasan ekosistem bernilai penting di luar kawasan hutan yang ditata pengelolannya (6 karst, 6 mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, dan 30 taman kehati)	Seluruh Indonesia	
		Meningkatnya jumlah koleksi spesies endemik lokal dan langka diupayakan konservasinya sebanyak 75 spesies	Seluruh Indonesia	
		Meningkatnya nilai indeks efektivitas pengelolaan KPA, KSA dan taman buru minimal 70 point (kategori baik)	Seluruh Indonesia	
Tata kelola	Tingginya kerusakan hutan akibat luasnya hutan open access yang tidak dikelola	Meningkatnya persentase penetapan Kawasan Hutan menjadi 100%	Seluruh Kawasan Hutan	Menjamin kelestarian hutan
		Meningkatnya panjang tata batas kawasan dan tata batas	Seluruh Kawasan Hutan	

SUB AGENDA	KONDISI	PROSES BISNIS KEMENTERIAN		HARAPAN PARA PIHAK
		KINERJA	LOKUS	
		fungsi sepanjang 40.000 km		
		Meningkatnya jumlah KPHP yang beroperasi sebanyak 629 KPH (347 KPHP, 182 KPHL, 100 KPHK non Taman Nasional)	Seluruh Kawasan Hutan	
		Meningkatnya jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari sebanyak 20 KPHP	Kawasan hutan produksi	
		Meningkatnya luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem meningkat di tahun 2019 selama 500.000 Ha	Kawasan hutan produksi dan hutan konservasi	
		Meningkatnya akses masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR seluas 12.700.000 ha	Seluruh kawasan hutan	
		Meningkatnya jumlah wilayah kerja yang memiliki model pengelolaan hutan mangrove di dalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun	Kawasan hutan lindung	
		Meningkatnya pengelolaan KPH (KPHK, KPHL dan KPHP) sebanyak	Seluruh provinsi, kecuali Pulau Jawa	
		Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman menjadi sebesar 189 juta m3 selama 5 tahun	Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Papua	Kawasan hutan memberikan sumbangan bahan baku yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
Produksi dan produktifitas yang berdaya saing	Produksi hasil hutan belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya jumlah produksi HHBK meningkat 20% dari produksi tahun 2014 (225.000 ton)		
		Meningkatnya nilai Eksport kayu menjadi US\$ 40,47 miliar		
		Meningkatnya ekspor tumbuhan dan satwa liar serta bioprospecting sebesar Rp. 25 trilyun selama 5 tahun		
		Meningkatnya persentase produksi HHBK, sutera alam dari Kawasan Hutan meningkat 15% dari tahun 2014		
		Menurunnya jumlah pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan menurun mencapai 20% dari basis data tahun 2014	Sumatera, Jawa dan Sulawesi	

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SUB AGENDA	KONDISI	PROSES BISNIS KEMENTERIAN		HARAPAN PARA PIHAK
		KINERJA	LOKUS	
Pemberantasan penebangan liar	Tingginya kerugian negara akibat hak-hak negara hilang atas keberadaan sumberdaya	Menurunnya jumlah pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan menurun mencapai 20% dari basis data tahun 2014	Seluruh provinsi	Meningkatkan upaya penegakan hukum untuk mendorong kehadiran negara dalam pengelolaan sumberdaya

Tahapan pembangunan 2015-2019, diurai sebagai berikut :



2019

15 DAS, 429KPH dan 50 Taman nasional serta peningkatan akses masyarakat telah dapat diartikulasikan sebagai dukungan kementerian terhadap pembangunan nasional yang ditunjukkan dengan pencapaian 3 sasaran strategis pada tingkat nasional

2018

15 DAS sudah mampu memberikan gambaran dukungan Kementerian untuk ketahanan air. 329 KPH yang dioperasikan tahun 2016-2017 dan 50 Taman Nasional mampu memberikan sumbangan terhadap penyerapan tenaga kerja, dan dukungan terhadap akselerasi pembangunan ekonomi nasional. Hutan yang dikelola masyarakat sudah memberikan keyakinan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan produksi hasil hutan

2017

15 DAS mampu memberikan gambaran peningkatan kualitas DAS, 229 KPH yang dioperasikan di tahun 2016 mulai memberikan gambaran penurunan degradasi hutan, peningkatan produksi hutan. 100 KPH lagi dioperasikan dan diberikan intervensi secara langsung. Produksi TSL diharapkan sudah meningkat. IKLH berangsur naik di setiap anasir. Sebagian luas hutan yang dikelola masyarakat sudah mulai terlihat perbaikannya dan konflik tenurial mulai berkurang

2016

Perbaikan lingkungan secara nyata di 15 DAS guna mendorong peningkatan IKLH dan ketahanan air, untuk : tutupan hutan, BOD-COD-Ecoli, udara. Setidaknya 229 KPH mulai diintervensi secara langsung berdasarkan RPHJP, untuk mendorong produksi kayu, HHBK, dan jasa lingkungan air. 20 taman nasional sudah memiliki pusat *sanctuary* sebagai dasar peningkatan populasi 25 spesies terancam punah. Penyiapan modal sosial untuk peningkatan akses pengelolaan hutan kepada masyarakat

2015

Reorganisasi selesai di triwulan II, internalisasi dan adaptasi sistem di triwulan III termasuk penentuan lokasi dan data dasar parameter kunci di 15 DAS dan persiapan KPH yang akan dioperasikan. Triwulan IV persiapan peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan seluas 12,7 juta ha, serta persiapan dan pelaksanaan reformasi agraria dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi berupa legalisasi aset seluas 0,6 juta ha dan redistribusi tanah seluas 3,5 juta ha

C. Pelaksanaan program akan ditopang oleh regulasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis yang telah dirumuskan. Beberapa regulasi pada pokoknya diarahkan untuk mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan, pengelolaan hutan di tingkat tapak kesehatan DAS dan peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendorong peningkatan kontribusi terhadap produk domestik bruto nasional, serta pengawasan kinerja yang bernuansa *early warning system*.

UU 32/2009 mengamanatkan 20 PP sebagai peraturan pelaksanaannya yang bentuknya berupa peraturan perundang-undangan yang lebih rinci. Hingga saat ini terdapat tiga PP yang berhasil ditetapkan, yaitu PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang muatannya mencakup dua PP sekaligus, yaitu izin lingkungan dan Amdal, PP tentang Pengelolaan Limbah B3 dan PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Sedangkan UU 18/2008 mengamanatkan 3 PP sebagai peraturan pelaksanaannya. Hingga saat ini terdapat satu PP yang berhasil diterapkan, yaitu PP nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

D. Penataan fungsi dan struktur organisasi lingkungan hidup dan kehutanan dengan SDM yang berkualitas perlu dilakukan agar program dapat dijalankan efektif dan efisien sehingga mencapai sasaran strategis yang ditargetkan. Penataan fungsi dan struktur organisasi lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan baik di tingkat pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), organisasi lingkungan hidup dan kehutanan tingkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (dinas yang menangani lingkungan hidup dan kehutanan), dan organisasi KPH di tingkat tapak. Penataan fungsi dan struktur organisasi juga berkaitan dengan upaya debirokratisasi dan desentralisasi pelayanan publik. Fungsi organisasi lingkungan hidup dan kehutanan yang baru harus mencerminkan pemisahan yang tegas antara kewenangan penetapan regulasi dan pengambilan kebijakan, termasuk hubungannya dengan kebijakan sektor lain, kewenangan administrasi pemerintahan, kewenangan fasilitasi dan bantuan teknis, kewenangan pengelolaan hutan, dan penegakan kewenangan penegakan hukum dalam hubungannya dengan lembaga penegakan hukum lainnya.

Fungsi dan struktur organisasi KPH perlu segera dipastikan. Selama ini terdapat organisasi KPH dalam bentuk UPTD, sebagian lain dalam bentuk SKPD (mengacu pada Permendagri No. 61 Tahun 2010). Gagasan yang sedang bergulir untuk mewujudkan kemandirian KPH adalah menjadikan KPH sebagai suatu institusi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Sesuai dengan sasaran strategis KLHK dan arah kebijakan dan strategi nasional, maka program yang relevan dengan urusan dan tugas Kementerian LHK dan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ditetapkan program-program dan penanggungjawab program.

Program	Penanggungjawab Program
Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (P1)	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (P2)	Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
Program Hutan Lestari dan Usaha Kehutanan (P3)	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (P4)	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (P5)	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pengendalian Perubahan Iklim (P6)	Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P7)	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P8)	Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi
Program Planologi dan Tata Lingkungan (P9)	Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P10)	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (P11)	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P12)	Inspektorat Jenderal
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian LHK (P13)	Sekretariat Jenderal



Lanskap TN. Lorentz, Papua. Foto oleh Panji A Nuariman, Balai TN. Lorentz

IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Sasaran strategis tahun 2015-2019 dipastikan pencapaiannya dengan mengurai langkah-langkah pencapaiannya di setiap program yang relevan, sebagai sasaran program, sedemikian rupa sehingga seluruh program memiliki kontribusi yang relevan terhadap pencapaian sasaran strategis. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan tata kelola pengurusan lingkungan hidup dan kehutanan, yang disadari merupakan komponen penting dalam pencapaian sasaran dan kinerja pembangunan.

Terkait dengan hal itu, perbaikan tata kelola yang diberikan kriteria khususnya terhadap kepastian kawasan hutan, keadilan sumberdaya hutan, transparansi dan integritas pengelolaan hutan, dan kapasitas penegakan hukum, akan diintegrasikan ke dalam kinerja baik sebagai input, kapasitas yang dapat dilihat dan kinerja yang diharapkan.

KINERJA KEMENTERIAN		KINERJA PROGRAM	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat (S1)	Indeks kualitas lingkungan hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5	Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (P2)	
		Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan (S1.P2.1)	Luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun (S1.P2.1.IKP)
		Meningkatnya kesehatan DAS prioritas (S1.P2.2)	Kualitas DAS prioritas meningkat setiap tahun(S1.P2.2.IKP)
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan (P3)	
		Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi (S1.P3)	Luas restorasi ekosistem di hutan produksi meningkat setiap tahun(S1.P3.IKP)
		Pengendalian Perubahan Iklim (P6)	
		Meningkatnya efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (S1.P6)	Persentase penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan, gambut dan limbah sebesar 21,7%(S1.P6.IKP)
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P7)	
		Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum (S1.P7)	Persentase penanganan kasus pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum meningkat setiap tahun (S1.P7.IKP)
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P8)	

KINERJA KEMENTERIAN		KINERJA PROGRAM	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
		Tersedianya iptek bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung pencapaian kualitas lingkungan hidup (S1.P8.1)	Jumlah paket iptek untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup meningkat setiap tahun (S1.P8.1.IKP)
		Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P10)	
		Meningkatnya kualitas udara (S1.P10.1)	Indeks kualitas udara meningkat menjadi 84 di tahun 2019 (S1.P10.1.IKP)
		Meningkatnya kualitas air (S1.P10.2)	Indeks kualitas air meningkat menjadi 55 di tahun 2019 (S1.P10.2.IKP)
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan (S1.P10.3)	Indeks tutupan lahan meningkat menjadi 62 di tahun 2019 (S1.P10.3)
		Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (P11)	
		Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya risiko akibat paparan B3, limbah B3, dan sampah (S1.P11)	Jumlah sampah yang dikelola sebesar 124,6 juta ton di 380 kota (S1.P11.IKP1)
			Jumlah bahan berbahaya dan beracun yang dikelola sebesar 3 juta ton selama 5 tahun (S1.P11.IKP2)
			Jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dikelola sebesar 755.595.000 ton dalam 5 tahun (S1.P11.IKP3)
Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (S2)	Peningkatan kontribusi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBP sebagai masukan terhadap PDB Nasional	Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (P1)	
		Meningkatnya penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati (S2.P1)	Sumbangan hutan konservasi pada devisa dan penerimaan negara (termasuk industri) meningkat setiap tahun (S2.P1.IKP)
		Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (P2)	
		Meningkatnya sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara (S2.P2)	Sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun (S2.P2.IKP)
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan (P3)	
		Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara (S2.P3)	Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun (S2.P3.IKP)
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (P5)	
		Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan untuk mendukung peningkatan devisa dan penerimaan negara (S2.P5)	Jumlah SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang meningkat kompetensinya bertambah setiap tahun untuk mendukung peningkatan devisa dan penerimaan negara (S2.P5.IKP)
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)	Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P8)	
		Tersedianya iptek bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung pencapaian pada devisa dan penerimaan negara (S2.P8)	Jumlah paket iptek untuk mendukung peningkatan kontribusi hutan dan lingkungan hidup pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun (S2.P8.IKP)
		Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (P1)	
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati (S3.P1)	Indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi meningkat setiap tahun (S3.P1.IKP1) Populasi spesies terancam punah meningkat setiap tahun (S3.P1.IKP2)
		Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (P2)	
		Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak dan hutan rakyat (S3.P2.2)	Jumlah unit pengelolaan hutan lindung yang beroperasi meningkat setiap tahun (S3.P2.2.IKP1) Persentase pemenuhan kayu bulat dari hutan rakyat meningkat setiap tahun (S3.P2.2.IKP2)

KINERJA KEMENTERIAN		KINERJA PROGRAM	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan (P3)	
		Meningkatnya pengelolaan hutan Produksi di tingkat tapak secara lestari (S3.P3)	Jumlah unit pengelolaan hutan produksi yang beroperasi meningkat setiap tahun (S3.P3.IKP1)
			Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikat PHPL meningkat setiap tahun (S3.P3.IKP2)
		Perhutanan sosial dan Kemitraan Lingkungan (P4)	
		Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat (S3.P4.1)	Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun (S3.P4.1.IKP)
		Meningkatnya upaya penyelesaian konflik dan tenurial di kawasan hutan (S3.P4.2)	Luas hutan yang diselesaikan konfliknya meningkat setiap tahun (S3.P4.2.IKP)
		Meningkatnya Perilaku Peduli Lingkungan dan Kehutanan (S3.P4.3)	Jumlah role model peduli lingkungan hidup dan kehutanan meningkat setiap tahun (S3.P4.3.IKP)
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (P5)	
		Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan mendukung peningkatan keseimbangan ekosistem (S3.P5)	Jumlah SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang meningkat kompetensinya bertambah setiap tahun untuk mendukung peningkatan keseimbangan ekosistem (S3.P5.IKP)
		Pengendalian perubahan iklim (P6)	
		Menurunnya luas areal kebakaran hutan (S3.P6.1)	Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun (S3.P6.1.IKP)
		Meningkatnya wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim (S3.P6.2)	Jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim meningkat setiap tahun (S3.P6.2.IKP)
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P7)	
		Meningkatnya pencegahan dan pengamanan hutan (S3.P7)	Luas hutan yang dapat dipertahankan dari gangguan keamanan hutan meningkat setiap tahun (S3.P7.IKP)
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P8)	
		Tersedianya iptek bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung keseimbangan ekosistem (S3.P8)	Jumlah paket iptek untuk mendukung peningkatan kontribusi hutan dan lingkungan hidup untuk mendukung keseimbangan ekosistem (S3.P8.IKP)
		Planologi dan Tata Lingkungan (P9)	
		Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual (S3.P9.1)	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (S3.P9.1.IKP1)
			Jumlah konflik di dalam kawasan hutan turun setiap tahun (S3.P9.1.IKP2)
		Tersedianya data dan informasi SDH (S3.P9.2)	Seluruh SDH di up date di seluruh KPH setiap tahun (S3.P9.2.IKP)
		Terkendalinya penggunaan kawasan hutan (S3.P9.3)	Persentase optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mendukung ketahanan pangan, energi dan air sebesar 100% (S3.P9.3.IKP)
		Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung (S3.P9.4)	Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan (S3.P9.4.IKP)
		Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P10)	
		Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut (S3.P10.1)	Kualitas pesisir dan laut meningkat setiap tahun (S3.P10.1.IKP)
		Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut (S3.P10.2)	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan meningkat setiap tahun (S3.P10.2.IKP)
		Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P12)	

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KINERJA KEMENTERIAN		KINERJA PROGRAM	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
		Pengawasan yang berkualitas dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK (S3.P12)	Tingkat kapabilitas APIP Kementerian LHK berada pada klas 3 pada tahun 2019 (S3.P12.IKP1)
			Tingkat kematangan implementasi SPIP berada pada klas 3 pada tahun 2019 (S3.P12.IKP2)
			Nilai LAKIP Kementerian berada pada kategori A (S3.P12.IKP3)
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian LHK (P13)	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (S3.P13)	Keterbukaan informasi dan komunikasi publik meningkat setiap tahun (S3.P13.IKP1)
			Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan meningkat setiap tahun (S3.P13.IKP2)
			Kapasitas birokrasi meningkat setiap tahun (S3.P13.IKP3)
			Kualitas pelayanan publik meningkat setiap tahun (S3.P13.IKP4)
			Nilai SAKIP Kementerian LHK memperoleh nilai 78 (kategori A) pada tahun 2019 (S3.P13.IKP5)



Pulau Kapota di TN. Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Foto oleh Hendrawan, Dit. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

SASARAN STRATEGIS 1		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan (S1.P2.1)	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (P2)	
	Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air (K1)	
	Pulihnya Kesehatan DAS kritis (S1.P2.1.K1)	Luas lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS (S1.P2.1.K1.IKK.a) Tanaman Hutan Kota seluas 5.000 Ha (S1.P2.1.K1.IKK.c)
	Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan (K4)	
	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan (S1.P2.1.K4)	Luas sumber benih berkualitas yang dibangun melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 490 Ha (S1.P2.1.K4.IKK.a)
		Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan didistribusikan dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya sebanyak 187,5 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019 (S1.P2.1.K4.IKK.b)
		Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha (S1.P2.1.K4.IKK.c)
	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS serta pengendalian perusakan Darat (K6)	
	Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas DAS (S1.P2.1.K6.1)	Luas Hutan Kota dan pemeliharaannya seluas 5.000 Ha (S1.P2.K6.1.IKK.b)
		Lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS (S1.P2.K6.1.IKK.c)
		Produksi dan distribusi bibit sebanyak 135 juta bibit berkualitas (S1.P2.K6.1.IKK.f)
	Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (K7)	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan (S1.P2.1.K7.2)	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan (S1.P2.1.K7.1)	Luas sumber benih berkualitas yang terbangun melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 490 Ha (S1.P2.K7.1.IKK.a)
		Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan didistribusikan dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya sebanyak 52,5 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019 (S1.P2.K7.1.IKK.b)
		Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha (S1.P2.K7.1.IKK.c)
	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan (S1.P2.1.K7.2)	Luas sumber benih berkualitas yang terbangun melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 490 Ha (S1.P2.K7.2.IKK.a)
		Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan didistribusikan dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya sebanyak 52,5 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019 (S1.P2.K7.2.IKK.b)
		Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha (S1.P2.K7.2.IKK.c)
Meningkatnya kesehatan DAS prioritas (S1.P2.2)	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (P2)	
	Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS (K3)	
	Menurunnya Kekritisitas DAS Prioritas	Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki MoU/status sebanyak 19

SASARAN STRATEGIS 1		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
	(S3.P2.2.K3.2)	DAS Lintas Negara (S3.P2.K3.2.IKK.a) Jumlah DAS prioritas yang memiliki data dan Informasi penurunan Qmax/Qmin, kadar BOD, dan peningkatan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas selama 5 tahun (S3.P2.K3.2.IKK.b) Jumlah RPDAST yang di internalisasi ke dalam RTRW sebanyak 108 RDAST (S3.P2.K3.2IKK.c)
	Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (K5)	
	Terpulihkannya fungsi ekosistem di segmen sungai pada 15 DAS Prioritas (S3.P2.2.K5.1) Meningkatnya kualitas ekosistem danau di 15 danau prioritas (S3.P2.2.K5.2.)	Jumlah segmen sungai serta mata air yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 15 DAS Prioritas (S3.P2.2.K2.1.IKK.a)
		Jumlah danau yang diturunkan laju sedimentasi atau erosinya (S3.P2.2.K2.2.IKK.a)
		Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya (S3.P2.2.K2.2.IKK.b)
	Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air (K1)	
	Pulihnya Kesehatan DAS kritis (S1.P2.2.K1)	Jumlah DAS prioritas yang melakukan pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah di daerah hulu selama 5 tahun di 15 DAS prioritas (S1.P.2.2.K1.b)
	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS serta pengendalian perusakan Darat (K6)	
	Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas DAS (S1.P2.K6.1)	Jumlah RPDAST yang di Internalisasi ke dalam RTRW sebanyak 108 RDAST (S1.P2.2.K6.1.IKK.d)
		Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki MoU/status sebanyak 19 DAS Lintas Negara (S1.P2.2.K6.1.IKK.e)
Pulihnya Kesehatan DAS kritis (S1.P2.K6.2)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah di daerah hulu sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019 (S1.P2.2.K6.2.IKK.a)	
	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air secara vegetatif, pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan, dan gully plug di daerah hulu DAS serta sumur resapan sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019 (S1.P2.2.K6.2.IKK.b)	
	Jumlah DAS prioritas yang memiliki Data dan Informasi penurunan Qmax/Qmin, kadar BOD, dan peningkatan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas selama 5 tahun (S1.P2.K6.2.IKK.c)	
Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi (S1.P3)	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan (P3)	
	Peningkatan Usaha Hutan Produksi (K2)	
	Meningkatnya Kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman(S1.P3.K2)	Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi seluas 100.000 Ha (S1.P3.K2.IKK.c)
	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK (K3)	
	Meningkatnya Produksi HHBK dan Investasi usaha jasa lingkungan (S1.P3.K3)	Luas Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem meningkat di Tahun 2019 seluas 500.000 Ha (S1.P3.K3.IKK.c)
Meningkatnya efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan (S1.P6)	Pengendalian Perubahan Iklim (P6)	
	Adaptasi Perubahan Iklim (K1)	
	Meningkatnya kemampuan adaptasi perubahan iklim di 15 wilayah (S1.P6.1.K1)	Pengembangan dan Operasionalisasi SIDIK yang terintegrasi dengan data iklim dan data kerentanan sektor prioritas (S1.P6.1.K1.IKK.d)
	Mitigasi Perubahan Iklim (K2)	
	Ketersediaan kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim di bidang kehutanan, lahan gambut, dan limbah (S1.P6.1.K2.1)	Jumlah kebijakan yang termutakhirkan dalam penurunan emisi GRK di bidang kehutanan, lahan gambut, dan limbah (S1.P6.K2.1.IKK.a)
		Jumlah perangkat mitigasi perubahan Iklim yang termutakhirkan di bidang kehutanan dan lahan gambut: baseline, faktor emisi, data aktivitas, skenario mitigasi, safeguards (S1.P6.1.K2.1.IKK.b)
		Jumlah provinsi yang menerapkan RAD-GRK di bidang kehutanan dan lahan gambut (S1.P6.1.2.K2.1.IKK.c)

SASARAN STRATEGIS 1		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Meningkatnya penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum (S1.P7)	Penurunan konsumsi bahan perusak ozon (S1.P6.1.K2)	Persentase tingkat penurunan konsumsi bahan perusak ozon jenis HCFC dari 403,9 ODP ton tahun 2013 menjadi 282,71 ODP ton atau 30% (S1.P6.1.K2.2.IKK.a)
	Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (K3)	
	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK, serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan secara berkala setiap tahun (S1.P6. K3.)	Jumlah laporan hasil inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (S1.P6.K3.IKK.a)
		Jumlah laporan Komunikasi nasional perubahan iklim (S1.P6.K3.IKK.b)
		Jumlah bidang mitigasi yang ter Measurement Reporting and Verification (MRV) (S1.P6.K3.IKK.c)
		Jumlah bidang aksi mitigasi yang terdaftar dalam Sistem Registry Nasional (S1.P6.K3.IKK.d)
	Kegiatan Mobilisasi Sumber Daya Untuk Perubahan Iklim (K4)	
	Meningkatnya ketersediaan pendanaan dan kapasitas pengembangan sains perubahan iklim dan teknologi rendah karbon, sebesar 60% dari kebutuhan dengan baseline 2015 (S1.P6.2.K4)	Diterapkannya mekanisme pengembangan manfaat dan penanganan deforestasi dan degradasi hutan di 25 lokasi (S1.P6.2.K4.IKK.a)
		Jumlah kerjasama dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga lainnya terkait perdagangan carbon, teknologi rendah karbon dan Sains perubahan iklim sebanyak 15 kerja sama (S1.P6.2.K4.IKK.b)
		Jumlah kegiatan/proyek yang mendapat rekomendasi teknis untuk investasi penurunann emisi GRK di bidang energi, dan limbah sebanyak 200 yang akan dibiayai melalui pusat pembiayaan pembangunan hutan dan lingkungan(S1.P6.2.K4.IKK.c)
		Persentase Posisi Indonesia dalam perjanjian dan forum internasional bidang perubahan iklim diterima sebesar 80% per tahun(S1.P6.2.K4.IKK.d)
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (K6)	
	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPI(S1.P6.2.K6)	SAKIP Ditjen PPI dengan nilai minimal 78 (A) di tahun 2019 (S1.P6.2.K6. IKK.a)
	Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (P7)	
	Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi (K1)	
	Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan; Pengawasan izin lingkungan Izin PPLH, dan PUU; ketaatan terhadap sanksi administrasi. (S1.P7.K1)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (S1.P7.K1.IKK.a)
		Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan/atau izin-izin serta PUU terkait LHK sebesar 100% per tahun dari izin yang diterbitkan oleh KLHK (S1.P7.K1.IKK.b)
		Persentase sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan meningkat tiap tahun (S1.P7.K1.IKK.c)
		Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum sebanyak 120 PPLH per tahun (S1.P7.K1.IKK.d)
		Jumlah Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 100 orang PPLH (S1.P7.K1.IKK.e)
	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH) (K2)	
	Meningkatnya efektivitas PSLH (S3.P7.K2)	Persentase PSLH di luar pengadilan sebesar 75% per tahun dari jumlah sengketa lingkungan hidup yang terjadi (S1.P7.K2.IKK.a)
		Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan minimal sebanyak 10 gugatan per tahun (S1.P7.K2.IKK.b)
	Penegakan Hukum Pidana (K3)	
	Meningkatnya efektifitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan (S1.P7.K3)	Persentase penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21 sebesar 75% per tahun dari jumlah kasus (S1.P7.K3.IKK.a)
		Jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 200 kasus lingkungan hidup dan kehutanan per tahun (S1.P7.K3.IKK.b)
		Persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus

SASARAN STRATEGIS 1		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		yang ditangani (S1.P7.K3.IKK.c)
		Persentase pelaksanaan eksaminasi kasus Tindak Pidana LHK sebanyak 100 % (S1.P7.K3.IKK.d)
		Fasilitasi penegakan hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terpadu sebanyak 30 kasus per tahun (S1.P7.K3.IKK.e)
		Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 orang/tahun (S1.P7.K3.IKK.f)
		Persentase penurunan kasus penyelundupan limbah B3 dan limbah B3 ilegal lintas batas minimal 75% (S1.P7.K3.IKK.g)
		Persentase penurunan kasus pembuangan dan <i>dumping</i> B3 dan limbah B3 ilegal ke laut minimal 75% (S1.P7.K3.IKK.h)
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K5)		
	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S1.P7.K5)	SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S1.P7.K5.IKK.a)
Meningkatnya kualitas udara (S1.P10.1)	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P10)	
	Pengendalian Pencemaran Udara (K1)	
	Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014 (S1.P10.K1.1)	Persentase Penurunan beban pencemaran ke udara sebesar 15 % dari basis data 2014 (S1.P10.K1.1.IKK.a)
		Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi secara kontinyu sejumlah 45 Kota (S1.P10.K1.1.IKK.b)
		Jumlah Kota yang menerapkan "green transportation" sebanyak 45 kota (S1.P10.K1.1.IKK.c)
Meningkatnya kualitas air (S1.P10.2)	Pengendalian Pencemaran Air (K2)	
	Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30 % dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BOD _e) (S1.P10.2.K2.2)	Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu (S1.P10.2.K2.2.IKK.a)
		Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya (S1.P10.2.K2.2.IKK.b)
		Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli) (S1.P10.2.K2.2.IKK.c)
	Beban Pencemaran Air turun 16% melalui pilot project dan pembinaan sumber pencemar (S1.P10.2.K2.2.IKK.d)	
Meningkatnya kualitas tutupan lahan (S1.P10.3)	Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (K4)	
	Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir (S1.P10.3.K4.3)	Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access) (S1.P10.3.K4.3.IKK.a)
		Luas Lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014 (S1.P10.3.K4.3.IKK.b)
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (K6)	
Tersedianya iptek bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian LHK (S1.P8.1)	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S1.P10.3.K6)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point) (S1.P10.3.K6.IKK.a)
	Penelitian dan Pengembangan LHK (P8)	
	Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (K3)	
Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Kualitas Lingkungan (S1.P8.1.K3.1)	Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Kualitas Lingkungan (S1.P8.1.K3.1)	Jumlah capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK: Kualitas Lingkungan (air, tanah, udara dan kebisingan) untuk IKLH; Kualitas Lingkungan untuk indeks pembangunan berkelanjutan; dan pola

SASARAN STRATEGIS 1		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		konsumsi dan produksi berkelanjutan (3 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% Hasil Penelitian termanfaatkan)(S1.P8.1.K3.1.IKK.a)
	Pengelolaan Laboratorium Rujukan Nasional(S1.P8.1.K3.2)	Jumlah pengelolaan laboratorium rujukan (pengembangan metode pengujian kualitas lingkungan dan metodologi lingkungan)(S1.P8.1.2.IKK.a)
		Peningkatan kapasitas pengembangan laboratorium lingkungan di daerah pada 15 provinsi (S1.P8.1.K3.2.IKK.b)
	Terlaksananya Pengembangan IPTEK di bidang Kualitas Lingkungan(S1.P8.1.K3.3)	Persen capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (1 Paket Pengembangan Iptek) (S1.P8.1.K3.3.IKK.a)
	Penelitian dan Pengembangan Sosejak dan Perubahan Iklim (K4)	
	Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Sosejak dan Perubahan Iklim (S1.P8.1.K4.1)	Kebijakan Tata Kelola LHK; Politik dan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; (3 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% Hasil Jumlah capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK Sosejak dan Perubahan Iklim: Sosek, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat dan resolusi konflik kawasan hutan; Keekonomian dan daya saing industri serta Penelitian termanfaatkan) (S1.P8.1. K4.1.IKK.a)
	Terlaksananya Pengembangan IPTEK di bidang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim(S1.P8.1.K4.2)	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang LHK (5 Paket Rekomendasi)(S1.P8.1.K4.2.IKK.a)
		Persen capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (1 Pilot Iptek di KPH, 1 Paket Pengembangan Iptek, serta Demonstration Activity di 10 ekosistem)(S1.P8.1.K4.2.IKK.b)
	Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (P11)	
	Pengelolaan Sampah (K1)	
Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya risiko akibat paparan B3, limbah B3, dan sampah (S1.P11)	Berkurangnya jumlah timbulan sampah pada sumbernya sebesar 20% dari 124,6 juta ton atau sebesar 24,5 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota (S1.P11.K1.1)	Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui penerapan EPR sebesar 85 ton dalam 5 tahun (S1.P11.K1.IKK.a)
		Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pusat daur ulang (recycle center) kapasitas 20 ton/hari sebesar 124.100 ton dalam 5 tahun (S1.P11.K1.IKK.b)
		Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pusat daur ulang (recycle center) kapasitas 10 ton/hari sebesar 131.400 ton dalam 5 tahun (S1.P11.K1.IKK.c)
		Pengurangan jumlah timbulan sampah melalui bank sampah kapasitas 1 ton/hari sebesar 113.150 ton dalam 5 tahun (S1.P11.K1.IKK.d)
		Jumlah kota berwawasan lingkungan berbasis 3 R sebagai destinasi wisata sebanyak 20 kota (S1.P11.K1.IKK.d)
	Tertanganinya jumlah sampah sebesar 75% dari 124,6 jt ton atau sebesar 97,8 jt ton dalam 5 tahun di 380 kota (S1.P11.K1.2)	Jumlah sampah tertangani di 380 kota melalui pemantauan dan evaluasi kota bersih, teduh dan sehat berkelanjutan (S1.P11.K1.2.IKK.a)
		Jumlah sampah yang tertangani melalui kegiatan composting yang terpadu dengan pertanian perkotaan kapasitas 0,5 ton per hari = 6 lokasi (S1.P11.K1.2.IKK.b)
		Jumlah timbunan sampah yang dikelola menjadi energi terbarukan di 380 kota (S1.P11.K1.2.IKK.c)
		Jumlah kota yang membangun <i>urban farming</i> sebanyak 100 kota (S1.P11.K1.2.IKK.d)
		Persentase produksi biomassa dari industri sebagai sumber energi sebesar 80% (S1.P11.K1.2.IKK.d)
	Pengelolaan B3 (K2)	
	Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional mengenai B3 sebesar 100% (S1.P11.K2.1)	Persentase jumlah dan Jenis B3 yang beredar dan digunakan melalui registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100 % (S1.P11.K2.1.IKK.a)
		Presentase kapasitas layanan registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100 % (S1.P11.K2.1.IKK.b)
	Meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan menjadi 100% (S1.P11.K2.2)	Persentase jumlah dan jenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya meningkat setiap tahun (S1.P11.K2.2.IKK.a)
		Jumlah Jenis B3 yang dibatasi peredaran dan penggunaannya sebanyak 2 jenis (S1.P11.K2.2.IKK.b)
		Jumlah Jenis B3 yang dihapuskan sebanyak 2 jenis

SASARAN STRATEGIS 1		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		(S1.P11.K2.2.IKK.c)
	Kegiatan Verifikasi Pengelolaan Limbah B3, dan Limbah non B3 (K3)	
Meningkatnya penetapan limbah B3 dan limbah non B3 melalui kegiatan pelayanan pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 menjadi 100% (S1.P11.K3.1)		Persentase layanan perizinan pengumpulan limbah B3 nasional 100% (S1.P11.K3.1.IKK.a)
		Persentase layanan perizinan pengangkutan limbah B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.b)
		Persentase layanan perizinan pemanfaatan limbah B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.c)
		Persentase layanan usaha pengolahan limbah B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.d)
		Persentase layanan perizinan penimbunan limbah B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.e)
		Persentase layanan perizinan dumping limbah B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.f)
		Persentase layanan perizinan ekspor limbah B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.g)
		Persentase layanan perizinan impor limbah Non B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.h)
		Persentase layanan penetapan status limbah B3 dan limbah Non B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.i)
		Persentase penanganan kegiatan limbah lintas batas ilegal dan pembuangan limbah B3 ke laut ilegal (S1.P11.K3.1.IKK.j)
Meningkatnya pemanfaatan limbah B3 dan limbah non B3 yang dikelola sebagai sumber daya sebesar 30% melalui fasilitasi (S1.P11.K3.2)		Volume dan jenis limbah yang dimanfaatkan sebagai sumber daya meningkat setiap tahun (S1.P11.K3.2.IKK.a)
	Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 (K4)	
Meningkatnya jumlah limbah B3 dan Limbah Non B3 yang dipantau pengelolaannya (S1.P11.K4)		Persentase peningkatan limbah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional sebesar 100% dari baseline 2014 (S1.P11.K4.IKK.a)
		Jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 80% dari baseline 2014 (S1.P11.K4.IKK.b)
		Jumlah limbah B3 cair dan padat (oli bekas dan sludge oil) yang dimanfaatkan mencapai 1.014.000 ton sebagai bahan bakar alternatif (setara penurunan emisi Gas rumah kaca sebesar 121 ribu ton CO ₂ e/tahun) (S1.P11.K4.IKK.c)
	Kegiatan Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 (K5)	
Meningkatnya Volume lahan terkontaminasi yang terpulihkan (S1.P11.K5)		Sistem dan mekanisme inventarisasi dan identifikasi lahan terkontaminasi limbah B3 tersedia (S1.P11.K5.IKK.a)
		Lahan terkontaminasi limbah B3 terinventarisasi dan teridentifikasi setiap tahun (S1.P11.K5.IKK.b)
		Lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan oleh penanggung jawab Usaha /kegiatan meningkat setiap tahun (S1.P11.K5.IKK.c)
		Lahan terkontaminasi limbah B3 yang difasilitasi pemulihannya meningkat setiap tahun (S1.P11.K5.IKK.d)
		Sistem dan mekanisme tanggap darurat Limbah B3 tersedia dan beroperasi (S1.P11.K5.IKK.e)
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (K6)	
Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Sampah, Limbah dan B3		Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 (S1.P11.IKK.a)



Gunung Pangrango difoto dari Puncak Gunung Gede. Foto oleh Iskandar, Sekretariat Ditjen KSDAE

SASARAN STRATEGIS 2		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Meningkatnya penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati (S2.P1)	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (P1)	
	Konservasi Spesies dan Genetik (K3)	
	Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan genetik (S2.P1.K3)	Jumlah unit penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan ke luar negeri bersertifikat sebanyak 50 Unit (S2.P1.K3.IKK.c)
		Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta <i>bioprospecting</i> sebesar Rp25 Trilyun (S2.P1.K3.IKK.d)
		Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp50 M (S2.P1.K3.IKK.e)
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (K4)	
	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun (S2.P1.K4. IKK.a)

SASARAN STRATEGIS 2		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Meningkatnya sumbangan hutan konservasi (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara (S2.P1)	hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan (S2.P1.K4)	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun (S2.P1.K4. IKK.b) Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 (S2.P1.K4. IKK.c) Jumlah unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 25 Unit (S2.P1.K4. IKK.d) Jumlah unit pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit (S2.P1.K4. IKK.f)
	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (K6)	
	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan (S2.P1.K6)	Jumlah unit penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan ke luar negeri bersertifikat sebanyak 50 Unit (S2.P1.K6.IKK.l)
		Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp50 M (S2.P1.K6.IKK.m)
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun (S2.P1.K6.IKK.p)
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun (S2.P1.K6. IKK.q)
		Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 (S2.P1.K6.IKK.r)
		Jumlah unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 25 Unit (S2.P1.K6.IKK.s)
		Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit (S2.P1.K6.IKK.u)
	Pengelolaan Taman Nasional (K7)	
	Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional (S2.P1.K7)	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun (S2.P1.K7.IKK.l)
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun (S2.P1.K7.IKK.m)
		Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 (S2.P1.K7.IKK.n)
		Jumlah unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 25 Unit (S2.P1.K7.IKK.o)
		Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant sebanyak minimal 50 unit (S2.P1.K7.IKK.p)
	Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (P2)	
	Penyelenggaraan Pengembangan Persuteraan Alam (K9)	
	Meningkatnya Pengelolaan Persuteraan Alam (S2.P2.K9)	Persentase produksi HHBK sutera alam dari Hutan Lindung meningkat sampai dengan 15% dari tahun 2014 (S2.P2.K9.IKK.a)
	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan (P3)	
	Peningkatan Usaha Hutan Produksi (K2)	
	Meningkatnya Kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman (S2.P3.K2.1)	Jumlah Produksi Kayu Bulat dari Hutan Alam sebesar 29 Juta M3 selama 5 Tahun (S2.P3.K2.1.IKK.a)
		Jumlah Produksi Kayu Bulat dari Hutan Tanaman sebesar 160 Juta M3 selama 5 Tahun (S2.P3.K2.1.IKK.b)
		Luas hutan di Kalimantan yang dibangun dengan silvikultur intensif seluas 11.000 ha (S2.P3.K2.1.IKK.c)
	Seluruh UPHHK HA dan HT aktif beroperasi pada tahun 2019 (S2.P3.K2.2)	Jumlah unit UPHHK HA yang aktif beroperasi melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan produksi sebanyak 220 unit hingga tahun 2019 (S2.P3.K2.2.IKK.a)
		Jumlah unit UPHHK HT yang kinerja usaha pemanfaatannya menjadi "layak dilanjutkan (LD)" bertambah sebanyak 175 unit hingga tahun 2019 (S2.P3.K2.2.IKK.b)
	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK (K3)	
	Meningkatnya Produksi HHBK dan Investasi usaha jasa lingkungan (S2.P3.K3)	Jumlah unit usaha jasa lingkungan/pemanfaatan air/jasa wisata di hutan produksi sebanyak 9 Unit (S2.P3.K3.1.IKK.a)
		Jumlah Produksi HHBK meningkat sebesar 20% selama 5 Tahun dari produksi tahun 2014 sebesar 225.000 ton (S2.P3.K3.1.IKK.b)

SASARAN STRATEGIS 2		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
	Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan (K4)	
	Optimalnya ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan (S2.P3.K4)	Jumlah PNBP dari Investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 15% dari penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp.2,565 Trilyun selama 5 tahun (S2.P3.K4.IKK.a)
		Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan Iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan produksi secara tertib sebanyak 175 unit(S2.P3.K4.IKK.b)
	Peningkatan Usaha Industri Kehutanan (K5)	
	Meningkatnya Investasi dan ekspor produk industri kehutanan (S2.P3.K5)	Jumlah nilai investasi industri kehutanan meningkat sebesar Rp.2,7 Trilyun selama 5 Tahun (S2.P3.K5.IKK.a)
		Jumlah <i>Forest Based Cluster Industry</i> yang terbentuk sebanyak 15 Unit (S2.P3.K5.IKK.b)
		Nilai ekspor produk industri kehutanan sebesar USD40,37 miliar selama 5 tahun (S2.P3.K5.IKK.c)
		Jumlah produk kayu olahan meningkat sebesar 15% dari produksi tahun 2014 sebesar 26,5 Juta M3 yang berasal dari IUIPHHK yang bersertifikat legalitas kayu (S2.P3.K5.IKK.d)
		Jumlah Industri Primer Hasil Hutan yang menggunakan sistem pengendalian bahan baku online meningkat sebesar 50% dari jumlah tahun 2014 sebesar 784 Unit (S2.P3.K5.IKK.e)
	Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan (K6)	
Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan (S2.P5)	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan serta industri kehutanan (S2.P3.K6)	Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi sebanyak 347 KPHP (S2.P3.K6.IKK.a)
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (K7)	
	1. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S2.P3.K7)	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78 (A) (S2.P3.K7.IKK.a)
	Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (P5)	
	Peningkatan Penyuluhan (K5)	
Tersedianya iptek bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian LHK (S2.P8)	Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat (S2.P5.K5)	Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk, 500 unit (S2.P5.K5.IKK.b.)
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P8)	
	Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan (K1)	
	Tersedianya Iptek bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LHK(S2.P8.K1)	Jumlah capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK: Konservasi Keanekaragaman Hayati; Konservasi Sumber Daya Air; Peningkatan Produktivitas Hutan (Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu); Sumber Pangan Alternatif dari Hutan; Sumber Energi; Obat-obatan Tanaman Hutan (6 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% Hasil Penelitian termanfaatkan (S2.P8.K1.IKK.b)
	Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan (K2)	
	Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan (S2.P8.K2.1)	Jumlah capaian IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK: revitalisasi pemanfaatan energi, pangan dan obat-obatan alternative dari hutan; pengolahan hasil hutan; dan keteknikan hutan (3 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% Hasil Penelitian termanfaatkan) (S2.P8.K2.1.IKK.a)
	Terlaksananya Pengembangan IPTEK di bidang Peningkatan Nilai	Jumlah capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (1 Pilot Iptek di KPH dan 1 Paket Pengembangan Iptek)

SASARAN STRATEGIS 2		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
	Tambah Hasil Hutan (S2.P8.K2.2)	(S2.P8.K2.1.IKK.a)



Lanskap Padang Savana di Pantai Kambera di Sumba Timur. Foto oleh Wiratno, Dit. Penyiapan Perhutanan Sosial.

SASARAN STRATEGIS 3		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati (S3.P1)	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (P1)	
	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (K1)	
	Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam (S3.P1.K1)	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok (S3.P1.K1.IKK.a)
		Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K1.IKK.b)
		Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K1.IKK.c)
		Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK (S3.P1.K1.IKK.d)
		Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 dokumen PKS (S3.P1.K1.IKK.e)
	Pengelolaan Kawasan Konservasi (K2)	
	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru (S3.P1.K2)	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70 poin pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K2.IKK.a)
		Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan (S3.P1.K2.IKK.b)
		Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha(S3.P1.K2.IKK.c)
		Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa per tahun(S3.P1.K2.IKK.d)
		Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK(S3.P1.K2.IKK.e)
		Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona pemanfaatan tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha(S3.P1.K2.IKK.f)
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi(S3.P1.K2.IKK.g)
		Kapasitas pengelola KPHK meningkat setiap tahun (S3.P1.K2.IKK.h)
	Konservasi Spesies dan Genetik (K3)	
	Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan genetik(S3.P1.K3)	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013 (S3.P1.K3.IKK.a)
		Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013(S3.P1.K3.IKK.b)
		Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah Biogeografi (sumatra, jawa-bali, kalimantan, nusa tenggara, sulawesi, maluku, dan papua)(S3.P1.K3.IKK.f)
		Jumlah Prior Informed Consent (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC(S3.P1.K3.IKK.g)

SASARAN STRATEGIS 3		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik(S3.P1.K3.IKK.h)
		Terbentuknya dan beroperasinya sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional sebanyak 1 unit per tahun (S3.P1.K3.IKK.i)
		Jumlah unit pusat rehabilitasi dan penyelamatan satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 Unit(S3.P1.K3.IKK.j)
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (K4)	
	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan(S3.P1.K4)	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant sebanyak minimal 50 unit (S3.P1.K4. IKK.e)
		Jumlah unit kawasan konservasi yang teregistrasi atau tersertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit(S3.P1.K4.IKK.g)
	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial (K5)	
	Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial(S3.P1.K5)	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman kehati)(S3.P1.K5.IKK.a)
		Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen(S3.P1.K5.IKK.b)
		Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 paket data(S3.P1.K5.IKK.c)
		Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 kawasan(S3.P1.K5.IKK.d)
		Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 ekoregion(S3.P1.K5.IKK.e)
		Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya sebanyak 300 spesies (S3.P1.K5.IKK.f)
	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (K6)	
	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan(S3.P1.K6)	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70 poin pada minimal 210 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K6.IKK.a)
		Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK (S3.P1.K6.IKK.b)
		Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen RP dan 150 Dokumen Zonasi/Blok (S3.P1.K6.IKK.c)
		Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha (S3.P1.K6.IKK.d)
		Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun (S3.P1.K6.IKK.e)
		Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan konservasi untuk 471 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K6.IKK.f)
		Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona pemanfaatan tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha (S3.P1.K6.IKK.g)
		Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 471 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K6.IKK.h)
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan

SASARAN STRATEGIS 3		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		<p>terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi (S3.P1.K6.IKK.i)</p> <p>Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013 (S3.P1.K6.IKK.j)</p> <p>Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013 (S3.P1.K6.IKK.k)</p> <p>Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah Biogeografi (sumatra, jawa-bali, kalimantan, nusa tenggara, sulawesi, maluku, dan papua) (S3.P1.K6.IKK.n)</p> <p>Jumlah unit pusat (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 Unit (S3.P1.K6.IKK.o)</p> <p>Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant sebanyak minimal 50 unit (S3.P1.K6.IKK.t)</p> <p>Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang (S3.P1.K6.IKK.v)</p> <p>Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S3.P1.K6.IKK.w)</p>
	Pengelolaan Taman Nasional (K7)	
	Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional (S3.P1.K7)	<p>Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70 poin pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K7.IKK.a)</p> <p>Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen RP dan 150 Dokumen Zonasi/Blok (S3.P1.K7.IKK.b)</p> <p>Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha (S3.P1.K7.IKK.c)</p> <p>Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun (S3.P1.K7.IKK.d)</p> <p>Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan konservasi untuk 50 TN di seluruh Indonesia (S3.P1.K7.IKK.e)</p> <p>Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona pemanfaatan tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha (S3.P1.K7.IKK.f)</p> <p>Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 50 TN di seluruh Indonesia (S3.P1.K7.IKK.g)</p> <p>Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi (S3.P1.K7.IKK.h)</p> <p>Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013 (S3.P1.K7.IKK.i)</p> <p>Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah Biogeografi (sumatra, jawa-bali, kalimantan, nusa tenggara, sulawesi, maluku, dan papua) (S3.P1.K7.IKK.j)</p> <p>Jumlah unit (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 Unit (S3.P1.K7.IKK.k)</p> <p>Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard</i> (VCS) atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance</i> (CCBA) REDD+ pada 2 Unit kawasan konservasi (S3.P1.K7.IKK.q)</p> <p>Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang (S3.P1.K7.IKK.r)</p>

SASARAN STRATEGIS 3		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak dan hutan rakyat (S3.P2.2)		Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S3.P1.K7.IKK.s)
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (K8)	
	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (S3.P1.K8)	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 (S3.P1.K8.IKK.a)
	Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (P2)	
	Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air (K1)	
	Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan rakyat (S3.P2.2.K1)	Jumlah produksi kayu dari hutan rakyat menjadi 100 juta M3 di tahun 2019(S3.P2.3.K1.IKK.d)
	Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (K2)	
	Meningkatnya Pengelolaan Hutan Lindung di tingkat tapak secara lestari (S3.P2.K2.2)	Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 Unit KPHL sampai dengan Tahun 2019 (S3.P2.2.K2.IKK.a) Kapasitas pengelola KPHL meningkat setiap tahun (S3.P2.2.K2.IKK.b)
	Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (K6)	
	Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas DAS (S3.P2.K6.1)	Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 KPHL sampai dengan tahun 2019 (S3.P2.2.K6.1.IKK.a)
Meningkatnya pengelolaan hutan Produksi di tingkat tapak secara lestari (S3.P3)	Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Mangrove (K8)	
	Meningkatnya Pengelolaan Hutan Mangrove (S3.P2.K8)	Jumlah wilayah kerja yang memiliki ketersediaan data dan informasi pengelolaan hutan mangrove di dalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun (S3.P2.K8.IKK.a) Jumlah Provinsi yang mengaktifkan Kelompok kerja mangrove daerah sebanyak 31 Provinsi (S3.P2.K8.IKK.b) Jumlah wilayah kerja yang memiliki model pengelolaan hutan mangrove di dalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun (S3.P2.K8.IKK.c)
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (K13)	
	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (S3.P2.2.K13)	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKDASHL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S3.P2.2.K13.IKK.a)
	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan (P3)	
	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi (K1)	
	Areal hutan produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi (S3.P3.K1)	Jumlah KPHP yang beroperasi di Hutan Produksi sebanyak 347 KPHP (S3.P3.K1.IKK.a) Jumlah provinsi yang memiliki arahan pemanfaatan dan investasi di Hutan Produksi yang belum dibebani izin di 27 provinsi (S3.P3.K1.IKK.b) Jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari sebanyak 20 KPHP (S3.P3.K1.IKK.c) Jumlah unit yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di Hutan Produksi sebanyak 35 unit (S3.P3.K1.IKK.d) Kapasitas pengelola KPHP meningkat setiap tahun (S3.P3.K1.IKK.e)
	Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan (K6)	
	Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit	Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi sebanyak 347 KPHP (S3.P3.K6.IKK.a)

SASARAN STRATEGIS 3		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
	usaha pemanfaatan hutan serta industri kehutanan (S3.P3.K6)	Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi hutan produksi sebanyak 18 Wilayah (S3.P3.K6.IKK.b) Jumlah wilayah yang Produksi dan Kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan meningkat di 18 Wilayah (S3.P3.K6.IKK.c) Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan di 18 Wilayah (S3.P3.K6.IKK.d) Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi industri primer hasil hutan di 18 Wilayah (S3.P3.K6.IKK.e)
Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat (S3.P4.1)	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (P4) Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (K1) Meningkatkan luas areal kelola masyarakat (S3.P4..K1)	Luas hutan yang di kelola masyarakat menjadi 12,7 juta ha dalam bentuk HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan (S3.P4.1.K1.IKK.a) Tersedianya regulasi hak dan akses masyarakat atas hutan dan pasar (S3.P4.1.K1.IKK.b) Proporsi kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat meningkat setahun (S3.P4.1.K1.IKK.c) Luas pemanfaatan di bawah tegakan hutan dalam bentuk agroforestry pada kegiatan HD, HKm, HTR, HR seluas 250.000 ha (S3.P4.1.K1.IKK.d)
	Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (K2) Meningkatkan kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan (S3.P4.K2)	Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan menjadi 5.000 kelompok (HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan) (S3.P4.K2.a)
Meningkatnya Perilaku Peduli Lingkungan dan Kehutanan (S3.P4.3)	Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat (K3) Meningkatkan role model komunitas yang berperan serta dalam penyelamatan SDA dan ekosistem serta LHK(S3.P4.K3)	Jumlah komunitas penyelamat SDA & Lingkungan pada kawasan DAS, Danau/Mata Air, Karst, Rawa, Gambut, Pesisir, Laut, & Pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri & pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi(S3.P4.K3.IKK.a) Jumlah unit jejaring dan mitra (ormas, dunia usaha, perguruan tinggi, legislator melalui kaukus LHK dan lembaga lain) yang berperan serta dalam membangun komunitas penyelamatan SDA dan ekosistem serta LHK(S3.P4.K3.IKK.b) Jumlah unit kanal komunikasi yang dibangun untuk meningkatkan akses informasi dan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan(S3.P4.K3.IKK.c) Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang(S3.P4.K3.IKK.d) Luas kawasan hutan yang dikembangkan melalui kemitraan/kerjasama pemerintah swasta (KPS) dengan format baru CSR seluas 1,6 juta ha (S3.P4.K3.IKK.e)
Meningkatnya upaya penyelesaian konflik dan tenurial di kawasan hutan (S3.P4.2)	Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat (K4) Meningkatkan penyelesaian konflik bidang lingkungan hidup dan kemitraan(S3.P4.K4)	Luasan area konflik yang terselesaikan dalam kaitannya dengan pengelolaan HTR, HKm, HD, HR, dan Kemitraan sampai dengan tahun 2019 seluas 12,7 ha(S3.P4.K4.IKK.a) Seluruh hutan adat diidentifikasi, dipetakan dan ditetapkan pengelolaannya oleh masyarakat adat (S3.P4.K4.IKK.b) Tersedianya Standar Operasi penanganan konflik (S3.P4.K4.IKK.c) Jumlah konflik di kawasan hutan turun setiap tahun (S3.P4.K4.IKK.d)
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (K6) Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PSKL (S3.P4.K6)	SAKIP Ditjen PSKL dengan nilai minimal 78,00 (A) di Tahun 2019 (S3.P4.K6.IKK.a)
Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan	Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (P5) Perencanaan dan Pengembangan SDM (K1)	

SASARAN STRATEGIS 3		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
kehutanan (S3.P5)	Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK kompeten (S3.P5.K1)	Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 15.000 orang (S3.P5.K1.IKK.a)
		Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya, 10.400 orang (S3.P5.K1.IKK.b)
	Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK (K2)	
	Meningkatnya kapasitas SDM LHK (S3.P5.K2)	Jumlah kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, 35.000 orang (S3.P5.K2.IKK.a)
		Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 340 orang (S3.P5.K2.IKK.b)
		Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 7 unit KHDTK (S3.P5.K2.IKK.c)
		Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, 15.000 orang (S3.P5.K2.IKK.d)
		Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa - desa hutan meningkat kapasitasnya 5.000 orang (S3.P5.K2.IKK.e)
	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan (K3)	
	Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan (S3.P5.K3)	Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan sebanyak 2.300 orang (S3.P5.K3.IKK.a)
	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup(K4)	
	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan (S3.P5.K4)	Jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya, 11.200 orang (S3.P5.K4.IKK.a)
		Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya, 10.000 orang (S3.P5.K4.IKK.b)
		Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata), 5.000 unit sekolah/kampus (S3.P5.K4.IKK.c)
		Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH, 50.000 orang (S3.P5.K4.IKK.d)
	Peningkatan Penyuluhan (K5)	
	Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat (S3.P5.K5)	Jumlah kelas kelompok tani desa – desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit KTH (S3.P5.K5.IKK.a)
		Jumlah lembaga pelatihan pemagangan usaha kehutanan swadaya (LP2UKS), 250 unit (S2.P5.K5.IKK.c)
		Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa – desa hutan, 5.000 orang (S3.P5.K5.IKK.d)
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (K6)	
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi pada unit Badan P2SDM (S3.P5.K6)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 (A) (S3.P5.K6.IKK.a)
Menurunnya luas areal kebakaran hutan (S3.P6.2)	Pengendalian Perubahan Iklim (P6)	
	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (K5)	
	Terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengendalian karhutla(S3.P6.2.K5)	Presentase penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebesar 10% dari batas toleransi maksimum jumlah hotspot sebesar 32.323 HS menjadi 29.091 HS pada tahun 2019(S3.P6.2.K5.IKK.a)
		Presentase penurunan luas kebakaran hutan non konservasi, dan lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebesar 10% dari batas toleransi maksimum luas kebakaran hutan dan lahan seluas 498.736 Ha menjadi 448.863 Ha pada tahun 2019(S3.P6.2.K5.IKK.b)

SASARAN STRATEGIS 3		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Meningkatnya wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim (S3.P6.3)	Adaptasi Perubahan Iklim (K1)	Jumlah SDM Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditingkatkan kapasitasnya (Manggala Agni dan MPA) sebanyak 5.000 Orang (S3.P6.2.K5.IKK.c)
		Jumlah brigade Pengendalian Kebakaran Hutan pada kesatuan pengelolaan hutan (KPH) yang difasilitasi pembentukannya di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 50 Brigade (S3.P6.2.K5.IKK.d)
		Jumlah wilayah yang difasilitasi pengembangan skenario iklim sebanyak 15 wilayah (S3.P6.3.K1.IKK.a)
		Jumlah wilayah yang difasilitasi dalam pengembangan (downscaling) rencana aksi adaptasi perubahan iklim di daerah sebanyak 15 wilayah (S3.P6.3.K1.IKK.b)
		Jumlah wilayah yang difasilitasi dalam pengembangan adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem di 15 wilayah rentan (S3.P6.3.K1.IKK.c)
Meningkatnya keamanan lingkungan hidup dan kehutanan melalui penegakan hukum (S3.P7)	Penegakan Hukum (P7) Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan (K4)	Fasilitasi inisiatif lokal adaptasi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklam) sebanyak 2000 Desa (S3.P6.3.K1.IKK.e)
		Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Propinsi (S3.P7.K4)
		Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi di 77 lokasi (S3.P7.K4.IKK.a)
		Jumlah Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 2.500 orang/tahun (S3.P7.K4.IKK.b)
		Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya yang terbina sebanyak 34 unit dalam 5 tahun kapasitasnya sebanyak 2.500 orang/tahun (S3.P7.K4.IKK.c)
Tersedianya iptek bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian LHK (S3.P8)	Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P8) Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan (K1)	Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum di 11 Brigade SPORC kapasitasnya sebanyak 2.500 orang/tahun (S3.P7.K4.IKK.d)
		Luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal meningkat setiap tahun (S3.P7.K4.IKK.e)
		Tersedianya regulasi penanganan pengaduan dan sertifikasi penegakan hukum (S3.P7.K4.IKK.f)
		Jumlah rancangan dan pengelolaan stasiun riset Kehati terintegrasi pada 12 TN serta pengelolaan 4 KHDTK (S3.P8.K1.1.IKK.a)
		Persen capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (5 pilot IPTEK di KPH dan 1 Pengembangan IPTEK) (S3.P8.K1.2.IKK.a)
Tersedianya iptek bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian LHK (S3.P8)	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah (K5)	Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Konservasi Sumber Daya Alam; Produktivitas hutan; Hasil Hutan sebagai alternatif sumber pangan, energi dan obat-obatan (S3.P8.K1.1)
		Jumlah bahan sintesa Hasil Penelitian Terintegrasi di Seluruh Satker Balai Besar/ Balai (75 paket) (S3.P8.K5.IKK.a)
		Terlaksananya pengembangan IPTEK di bidang Pengelolaan Hutan
		Persen capaian IPTEK Litbang Unggulan Daerah di Seluruh Satker Balai Besar/ Balai (15 IPTEK) (S3.P8.K5.IKK.b)
		Jumlah Pengelolaan KHDTK di masing-masing unit Litbang LHK di Daerah (30 KHDTK) (S3.P8.K5.IKK.c)

SASARAN STRATEGIS 3		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (K6)	
	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Program dan Kerjasama; Evaluasi dan Diseminasi; Administrasi Umum dan Pengelolaan Sarana/Prasarana dan Perlengkapan; serta Pengelolaan Kepegawaian dan Penguatan Hukum serta Organisasi Tata Laksana pada Badan Litbang LHK (Setbadan, 4 Puslit/Pusbang, 15 Satker Daerah) (S3.P8.K6)	Nilai capaian tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai > 82,00 (memuaskan) di tahun 2019 (S3.P8.K6.IKK.a)
Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual (S3.P9.1)	Planologi dan Tata Lingkungan (P9)	
	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (K1)	
	Terselesainya Penetapan seluruh Kawasan Hutan(S3.P9.1. K1)	Persentase Kawasan Hutan yang ditetapkan sebesar 80% Kawasan Hutan (Kawasan Hutan yang telah ditetapkan s.d. Tahun 2014 mencapai 56%)(S3.P9.K1.IKK.a)
		Seluruh Permohonan Perubahan Fungsi/Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial dapat diselesaikan(S3.P9.1.K1.IKK.b)
		Tersedianya regulasi kepastian kawasan hutan (S3.P9.1.K1.IKK.c)
		Luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk pencetakan sawah baru seluas 1 juta ha (S3.P9.1.K1.IKK.d)
		Luas kawasan hutan untuk pengembangan pertanian hasil reforma agraria seluas 4,1 juta ha (S3.P9.1.K1.IKK.e)
Tersedianya data dan informasi SDH (S3.P9.2)	Pemantapan Kawasan Hutan (K7)	
	Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Pemantapan Kawasan Hutan(S3.P9.1.K7)	Penataan Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km(S3.P9.1.K7.IKK.a)
	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (K2)	
	Data dan informasi SDH yang terbaru di seluruh KPH (S3.P9.2.K2)	Jumlah KPH yang telah memiliki Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan (S3.P9.2.K2.IKK.a)
		Tersedianya regulasi satu peta di lingkungan Kementerian (S3.P9.2.K2.IKK.b)
Terkendalnya penggunaan kawasan hutan (S3.P9.3)	Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (K3)	
	Pembentukan 459 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Propinsi (S3.P9.3.K3.1)	Jumlah provinsi yang memiliki Peta Arahan Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun, 34 Provinsi (S3.P9.3.K3.1.IKK.a)
		Jumlah KPH yang memiliki Peta Penetapan dan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (S3.P9.2.K3.1.IKK.b)
		Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTk (S3.P9.2.K3.1.IKK.c)
		Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP dan RTRWK (S3.P9.2.K3.1.IKK.d)
		Tersedianya regulasi penataan ruang (S3.P9.2.K3.1.IKK.e)
	Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80 % (S3.P9.3.K3.2)	Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan selesai 100% (S3.P9.3.K3.2.IKK.a)
	Pemantapan Kawasan Hutan (K7)	
	Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Pemantapan Kawasan Hutan(S3.P9.3.K7)	Jumlah KPH yang memiliki Rencana Pengelolaan 409 KPH(S3.P9.3.K7.IKK.b)
		Jumlah kluster yang telah diinventarisasi Sumber Daya Hutan-nya sebanyak 1650 Klaster(S3.P9.3.K7.IKK.c)
Meningkatnya upaya pencegahan dampak	Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (K4)	
	Terlaksananya analisis lingkungan bagi	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak

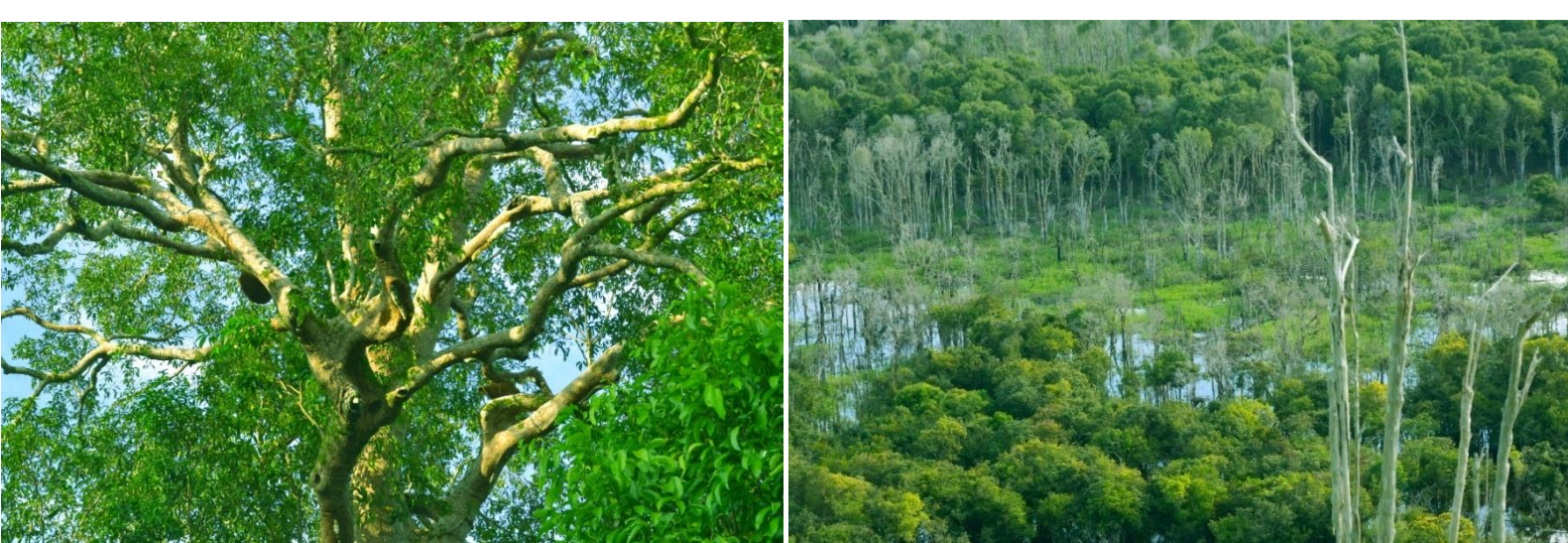
SASARAN STRATEGIS 3			
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung (S3.P9.4)	semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas(S3.P9.4.K4.1)	100 KLHS per tahun(S3.P9.4.K4.IKK.a) Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun(S3.P9.4.K4.IKK.b)	
	Tersusunya RPPLH Nasional dan RPPLH daerah untuk menjadi Acuan dalam RPJMN /RPJMD(S3.P9.4.K4.2)	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yg telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah,1 RPPLH Nasional tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional)(S3.P9.4.K4.2.IKK.a)	
		Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (34 RPPLH PProvinsi)(S3.P9.4.K4.2.IKK.b)	
		Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)(S3.P9.4.K4.2.IKK.c)	
		Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada 6 ekoregion(S3.P9.4.K4.2.IKK.d)	
		Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000(S3.P9.4.K4.2.IKK.e)	
		Jumlah Prov/Kab/Kot yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau(S3.P9.4.K4.3.IKK.a)	
	Tersusunnya neraca SDA LH Prov/Kab/Kot dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA nasional dan PDB Hijau(S3.P9.4.K4.3)		
	Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (K5)		
	Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yg efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan(S3.P9.4.K5)	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100%)(S3.P9.4.K5.IKK.a)	
		Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100%)S3.P9.4.K5.IKK.b)	
		umlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah)(100%) (S3.P9.4.K5.IKK.c)	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (K6)			
Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019(S3.P9.3.K6)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point) (S3.P9.3.K6.IKK.a)		
Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut (S3.P10.1)	Pengendalian Pencemaran Lingkungan (P10)		
	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut(K3)		
	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015 (S3.P10.1.K3)	Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD, Semarang, dan Bali) meningkat setiap tahun (S3.P10.1.K3.IKK.a)	
Jumlah pilot project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit (S3.P10.1.K3.IKK.b)			
Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut (S3.P10.2)	Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut (S3.P10.2.K3)	Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 85 kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, <i>seagrass</i> , terumbu karang (S3.P10.2.K3.IKK.a)	
		Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut (K5)	
	Meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan (S3.P10.2. K5)	Jumlah ekosistem gambut yang dipetakan kesatuan hidrologis gambutnya (S3.P10.2. K5.IKK.a)	
		Jumlah ekosistem Gambut Ditetapkan Sebagai Fungsi Lindung (S3.P10.2.K5.IKK.b)	
		Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun (S3.P10.2.K5.IKK.c)	
		Luas lahan gambut yang rusak (<i>degraded peatland</i>) yang terpulihkan meningkat setiap tahun (S3.P10.2.K5.IKK.d)	
Pengawasan yang berkualitas dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P12)		
	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja		

SASARAN STRATEGIS 3		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Bidang LHK (S3.P12)	Itwil I (K1)	
	Pengawasan internal yang berkualitas (S3.P12.K1.1)	Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangnya (S3.P12.K1.1.IKK.a)
	Mempertahankan opini WTP (S3.P12.K1.2)	Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir) (S3.P12.K1.2.IKK.a)
	Peningkatan nilai implementasi SAKIP (S3.P12.K1.3)	Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A (S3.P12.K1.3.IKK.a)
	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II (K2)	
	Pengawasan internal yang berkualitas (S3.P12.K2.1)	Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangnya (S3.P12.K2.1.IKK.a)
	Mempertahankan opini WTP (S3.P12.K2.2)	Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir) (S3.P12.K2.2.IKK.a)
	Peningkatan nilai implementasi SAKIP (S3.P12.K2.3)	Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A (S3.P12.K2.3.IKK.a)
	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III (K3)	
	Pengawasan internal yang berkualitas (S3.P12.K3.1)	Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangnya (S3.P12.K3.1.IKK.a)
	Mempertahankan opini WTP (S3.P12.K3.2)	Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir) (S3.P12.K3.2.IKK.a)
	Peningkatan nilai implementasi SAKIP (S3.P12.K3.3)	Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A (S3.P12.K3.3.IKK.a)
	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV (K4)	
	Pengawasan internal yang berkualitas (S3.P12.K4.1)	Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangnya (S3.P12.K4.1.IKK.a)
	Mempertahankan opini WTP (S3.P12.K4.2)	Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir) (S3.P12.K4.2.IKK.a)
	Peningkatan nilai implementasi SAKIP (S3.P12.K4.2)	Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A (S3.P12.K4.1.IKK.a)
	Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN (K5)	
	Pengawasan kasus yang berindikasi KKN (S3.P12.K5.1)	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif (S3.P12.K5.1.IKK.a)
	Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) (S3.P12.K5.2)	Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan (S3.P12.K5.2.IKK.a)
	Pengembangan unit kerja menuju wilayah bebas korupsi (WBK) (S3.P12.K5.2)	Jumlah rekomendasi unit kerja yang WBK (3 satker/tahun) (S3.P12.K5.2.IKK.a)
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK (K6)	
	Penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal (S3.P12.K6.1)	Jumlah Rekomendasi hasil audit internal yang ditindaklanjuti secara tuntas (S3.P12.K6.1.IKK.a)
	Terselenggaranya sistem pengendalian intern di satker lingkup KLHK (S3.P12.K6.2)	Nilai Tingkat kematangan implementasi SPIP (S3.P12.K6.1.IKK.a)
	Mendukung kegiatan tugas teknis Itjen (S3.P12.K6.3)	Nilai Implementasi SAKIP Itjen (S3.P12.K6.3.IKK.a)
		Nilai Tingkat kapabilitas APIP (S3.P12.K6.3.IKK.b)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (S3.P13)	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (P13)	
	Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK (K1)	

SASARAN STRATEGIS 3		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
	Tercapainya penyiaran dan penyebarluasan informasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (S3.P13.K1.1)	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan Kementerian LHK dalam rangka <i>Awareness Campaign</i> sebanyak 20 media massa (S3.P13.K1.1.IKK.a)
		Jumlah publikasi proses perencanaan anggaran Kementerian LHK kepada masyarakat (S3.P13.K1.1.IKK.b)
		Jumlah publikasi penggunaan anggaran Kementerian LHK (S3.P13.K1.1.IKK.c)
		Jumlah pemberitaan positif bidang LHK di media massa sebanyak 3.000 pemberitaan setiap tahun (S3.P13.K1.1.IKK.d)
		Layanan PPID berdasarkan penilaian KIP (Komisi Informasi Publik) meningkat 200 poin atau 40 poin setiap tahun atau (<i>baseline</i> tahun 2013 untuk eks KLH 650)(S3.P13.K1.1.IKK.e)
	Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan(S3.P13.K1.2)	Jumlah kampanye PPLHK melalui media cetak, elektronik, tradisional dan sosial meningkat setiap tahun (S3.P13.K1.2.IKK.a)
		Jumlah wilayah yang terpapar kampanye dan publikasi PPLHK meningkat setiap tahun (S3.P13.K1.2.IKK.b)
	Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK (K2)	
	Termanfaatkannya Informasi Kualitaas Lingkungan Hidup untuk pengukuran kinerja KLHK dan pengambilan kebijakan (S3.P13.K2.1)	Analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional setiap tahun diperbaharui dan didiseminasikan (S3.P13.K2.1.IKK.a)
		Jumlah daerah yang difasilitasi pembentukan Sistem informasi LHK Daerah (SIL LHKD) (S3.P13.K2.1.IKK.b)
	Tercapainya peningkatan kapasitas layanan data, informasi, dan infrastruktur sistem informasi LHK (S3.P13.K2.2)	Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) tersedia setiap tahun (S3.P13.K2.1.IKK.c)
		Jumlah sistem informasi KLHK yang terbangun dan beroperasi (S3.P13.K2.2.IKK.a)
		Jumlah satker yang memiliki struktur jaringan dan teknologi informasi berfungsi memenuhi standar minimal (S3.P13.K2.2.IKK.b)
	Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi (K3)	
	Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK (S3.P13.K3)	Persentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK 95% (S3.P13.K3.IKK.a)
		Nilai SAKIP KLHK Minimal A (minimal 78 poin) (S3.P13.K3.IKK.b)
		Mekanisme pengelolaan dan penyaluran pendanaan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan (S3.P13.K3.IKK.c)
	Penyelenggaraan Kebijakan Strategis bidang lingkungan hidup dan kehutanan (K4)	
	Tersedianya rancangan kebijakan strategis bidang lingkungan hidup dan kehutanan (S3.P13.K4)	Jumlah rancangan kebijakan strategis (S3.P13.K4.IKK.a)
	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK (K5)	
	Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan KLHK (S3.P13.K5)	Jumlah manajemen aset (S3.P13.K5.IKK.a)
	Kegiatan penyelenggaraan keteknikan lingkungan hidup dan kehutanan (K6)	
	Terselenggaranya pengelolaan sarana, prasarana dan peralatan teknis kehutanan dan lingkungan efektivitas dan efisien (S3.P13.K6)	Jumlah satker yang memiliki NSPK baru/hasil evaluasi (S3.P13.K6.IKK.a)
		Jumlah satker yang memiliki sarana dan peralatan LHK terdistribusi di 280 satker dan berfungsi baik sesuai NSPK (S3.P13.K6.IKK.b)
	Pembiayaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K7)	
	Nilai komitmen pembiayaan fasilitas dana bergulir minimal sebesar 2 T untuk mitra pembangunan hutan pada KPH dan non KPH (HKm, HD, HR dan Hutan Tanaman) serta investasi lingkungan (S3.P13.K7)	Jumlah dana yang terdistribusi kepada mitra kerja KPH dan non KPH (HKm, HD, HR, dan hutan tanaman rakyat) serta investasi lingkungan sebesar Rp. 2 T (S3.P13.K7.IKK.a)
		Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Pendapatan BLU Pusat P2H (S3.P13.K7.IKK.b)
	Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri (K8)	

SASARAN STRATEGIS 3		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
	Meningkatnya kerja sama luar negeri bidang lingkungan hidup dan kehutanan (S3.P13.K8)	Jumlah kerja sama baru Bilateral, Regional, Multilateral dan Organisasi Internasional Non Pemerintah yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebanyak 30 kerja sama (S3.P13.K8.IKK.a)
		Seluruh kerja sama Luar Bilateral, Regional, Multilateral dan Organisasi Internasional Non Pemerintah terlaksana sesuai dengan kepentingan nasional (S3.P13.K8.IKK.b)
		Pemanfaatan dana <i>Global Environmental Fund (GEF)</i> meningkat setiap tahun (S3.P13.K8.IKK.c)
	Pengendalian Ekoregion Jawa (K9)	
	Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Jawa (S3.P13.K9)	Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Jawa 95% (S3.P13.K9.IKK.a)
		Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Jawa selama 5 tahun (S3.P13.K9.IKK.b)
	Pengendalian Ekoregion Bali-Nusra (K10)	
	Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Bali Nusra (S3.P13.K10)	Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali Nusra 95% (S3.P13.K10.IKK.a)
		Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Bali-Nusra selama 5 tahun (S3.P13.K10.IKK.b)
	Pengendalian Ekoregion Kalimantan (K11)	
	Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Kalimantan (S3.P13.K11.IKK.a)	Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan 95% (S3.P13.K11.IKK.a)
		Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Kalimantan selama 5 tahun (S3.P13.K11.IKK.b)
	Pengendalian Ekoregion Sulawesi (K12)	
	Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Sulawesi (S3.P13.K12)	Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Sulawesi 95% (S3.P13.K12.IKK.a)
		Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Sulawesi selama 5 tahun (S3.P13.K12.IKK.b)
	Pengendalian Ekoregion Maluku (K13)	
	Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Maluku (S3.P13.K13)	Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Maluku 95% (S3.P13.K13.IKK.a)
		Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Maluku selama 5 tahun (S3.P13.K13.IKK.b)
	Pengendalian Ekoregion Papua (K14)	
	Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Papua (S3.P13.K14)	Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Papua 95% (S3.P13.K14.IKK.a)
		Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Papua selama 5 tahun (S3.P13.K14.IKK.b)
	Pengendalian Ekoregion Sumatera (K15)	
	Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Sumatera (S3.P13.K15)	Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Sumatera 95% (S3.P13.K15.IKK.a)

SASARAN STRATEGIS 3		
SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Sumatera selama 5 tahun (S3.P13.K15.IKK.b)
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK (K16)	
Meningkatnya administrasi keuangan KLHK secara efektif (S3.P13.K16)		Opini WTP untuk Laporan Keuangan (S3.P13.K16.IKK.a)
		Jumlah PNBP meningkat sebesar 10% dari penerimaan PNBP tahun 2013 (S3.P13.K16.IKK.b)
		Jumlah perusahaan yang menyelesaikan piutang negara di bidang LHK, 25 perusahaan (S3.P13.K16.IKK.c)
	Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian Kementerian LHK (K17)	
Meningkatnya kesesuaian penempatan pegawai dan kompetensi pegawai Kementerian LHK (S3.P13.K17.1)		Jumlah pegawai untuk memenuhi kebutuhan KPH sekurang-kurangnya 4000 orang sesuai hasil analisis Kemenpan RB (S3.P13.K17.1.IKK.a)
		Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya pada setiap jabatan (S3.P13.K17.1.IKK.2.b)
		Tersedianya regulasi seleksi dan pengangkatan pejabat (S3.P13.K17.1.IKK.2.c)
Tersusunnya struktur Organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif, dan efisien (S3.P13.K17.2)		Peningkatan RB di KemenLHK di 13 satker pusat menjadi >60 (dari nilai evaluasi 57,71 tahun 2014) (S3.P13.K17.2.IKK.a)
	Pembinaan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K18)	
Tersedianya RSNI, RSNI Harmonisasi dan standar khusus (S3.P13.K18.1)		Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia dan Standar Nasional Indonesia harmonisasi, standar khusus (lingkup standar: sistem manajemen, produk, proses, metode uji/verifikasi, barang/jasa/teknologi ramah lingkungan) (S3.P13.K18.1.IKK.a)
Terjaminnya penerapan SNI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S3.P13.K18.2)		Jumlah penerapan SNI meningkat setiap tahun (S3.P13.K18.2.IKK.a)
		Jumlah pemanfaatan barang dan jasa/teknologi ramah lingkungan meningkat (S3.P13.K18.2.IKK.b)
		Jumlah jenis standar pelayanan masyarakat dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan ditetapkan (S3.P13.K18.2.IKK.c)
	Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K19)	
Tersedianya regulasi dengan prioritas mendorong hasil produksi dan nilai ekspor hasil hutan (kayu, HHBK, TSL), HKm, HD, HR, HTR, Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), perubahan iklim dan kebijakan LHK lainnya (S3.P13.K19.1)		Jumlah naskah akademik dan RUU terkait dengan perjanjian bidang lingkungan hidup dan kehutanan (S3.P13.K19.1.IKK.a)
		Jumlah rancangan Peraturan Pemerintah sebagai amanat UU dan revisi PP (S3.P13.K19.1.IKK.b)
		Jumlah rancangan Peraturan Menteri turunan PP yang difasilitasi penelaahan, penulisan, dan penerbitannya (S3.P13.K19.1.IKK.c)
		Jumlah RPERPRES, RKEPPRES, RINPRES, RKepMen, RPerDa Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S3.P13.K19.1.IKK.d)
Penanganan bantuan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan (S3.P13.K19.2)		Terselesaikannya perkara perdata, TUN, uji materi dan pendampingan perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan (S3.P13.K19.2.IKK.a)
		Jumlah rancangan Peraturan Pemerintah sebagai amanat UU dan revisi PP (S3.P13.K19.2.IKK.b)
		Jumlah rancangan Peraturan Menteri turunan PP yang difasilitasi penelaahan, penulisan, dan penerbitannya (S3.P13.K19.2.IKK.c)
		Jumlah RPERPRES, RKEPPRES, RINPRES, RKepMen, RPerDa Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S3.P13.K19.2.IKK.d)



Skenario pendanaan Kementerian berdasarkan Program dan Sasaran Strategis tahun 2015-2019 per tahunnya sebagaimana digambarkan tabel di bawah ini. Skenario tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan organisasi, SDM, kebijakan baru potensi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah serta pengembangan wilayah, dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN 2009-2014. Diperkirakan total alokasi dana tahun 2015-2019 mencapai Rp 147.495.141.390,-. Angka pada tahun 2015 termasuk belanja gaji dan operasional perkantoran, sedangkan pada tahun 2016-2019, angka yang ada diluar belanja gaji dan operasional perkantoran

Pohon Lalau, salah satu pohon sarang lebah madu di TN. Danau Sentarum, Kalimantan Barat. Foto oleh Lidia Lilly, staf Balai TN. Danau Sentarum (foto sebelah kiri). Foto sebelah kanan adalah lanskap TN. Danau Sentarum. Foto oleh Sandi Kusuma, staf Biro Perencanaan.

NO	PROGRAM	ALOKASI TOTAL (RENSTRA) (Rp.Ribu)
1	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	13.992.433.009
2	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	48.848.916.294
3	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	17.683.907.895
4	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	15.684.529.586
5	Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	3.273.695.193
6	Pengendalian Perubahan Iklim	6.474.447.970
7	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.116.769.080
8	Penelitian dan Pengembangan LHK	2.222.095.783
9	Planologi dan Tata Lingkungan	2.903.078.200
10	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	3.982.724.990
11	Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	20.267.295.819
12	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	248.000.000
13	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	8.797.247.571
	TOTAL	147.495.141.390

V. PENUTUP

Hasil utama pembangunan Kementerian harus diyakini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kinerja secara numerik, namun demikian perbaikan kondisi tapaklah yang memberikan gambaran sesungguhnya keberhasilan pembangunan. Lebih dari itu, harapan para pihak sebagai pengguna jasa Kementerian yang tertuang di dalam RPJMN 2015-2019 akan dijadikan *brancmarking* utama, untuk menilai keberhasilan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Tahun 2015- 2019, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta jajaran pelaksana pada seluruh unit-unit kerja, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut, maka secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan termasuk pelaporan hasil audit kinerja.

Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan keterkaitan antara perbaikan administrasi dengan perbaikan kondisi di tingkat tapak, diharapkan kepada seluruh unit kerja untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2015-2019, sebagai langkah-langkah strategis dalam pencapaian target yang telah dirumuskan di dalam Renstra Kementerian ini.

Pada akhirnya, kiranya Allah, SWT, memberikan karunia-NYA kepada kita semua, sehingga seluruh harapan yang diletakkan pada Kementerian ini dapat dipenuhi dan membawa kemaslahatan untuk rakyat Indonesia dan negeri yang kita cintai ini.

Jakarta,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN

LAMPIRAN MATRIK RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (P1)								1,547.01	910.15	965.98	1,023.94	1,085.37	Direktorat Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem
	Meningkatnya penerimaan devisa dan PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati (S2.P1)												
		Sumbangan hutan konservasi pada devisa dan penerimaan negara (termasuk industri) meningkat setiap tahun											
	Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati (S3.P1)												
		Nilai indeks efektivitas kawasan konservasi meningkat setiap tahun											
Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (K1)								8.00	9.89	10.49	11.12	11.79	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam							8.00	9.89	10.49	11.12	11.79	
		a. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok (S3.P1.K1.IKK.a)	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen						
		b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K1.IKK.b)	100 Unit	200 Unit	310 Unit	420 Unit	521 Unit						
		c. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K1.IKK.c)	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data						
		d. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK (S3.P1.K1.IKK.d)	20 KPHK	50 KPHK	100 KPHK	100 KPHK	100 KPHK						
		e. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 dokumen PKS (S3.P1.K1.IKK.d)	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Pengelolaan Kawasan Konservasi (K2)								16.24	34.11	36.16	38.33	40.63	Direktorat Kawasan Konservasi
	1. Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru							16.24	34.11	36.16	38.33	40.63	
		a. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K2.IKK.a)	50 Unit	100 Unit	150 Unit	200 Unit	260 Unit						
		b. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan (S3.P1.K2.IKK.b)	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen						
		c. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha (S3.P1.K2.IKK.c)	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha						
		d. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa per tahun (S3.P1.K2.IKK.d)	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		e. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK (S3.P1.K2.IKK.e)	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit						
		f. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha (S3.P1.K2.IKK.f)		25.000 hektar	50.000 hektar	75.000 hektar	100.000 hektar						
		g. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi (S3.P1.K2.IKK.g)	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		h. Kapasitas pengelola KPHK meningkat setiap tahun (S3.P1.K2.IKK.h)	20 KPHK	50 KPHK	100 KPHK	100 KPHK	100 KPHK						
Konservasi Spesies dan Genetik (K3)								25.18	16.24	17.21	18.25	19.34	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
	1. Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan genetik							25.18	16.24	17.21	18.25	19.34	
		a. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013 (S3.P1.K3.IKK.a)	2%	4%	6%	8%	10%						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung -jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013 (S3.P1.K3.IKK.b)	2 Spesies	4 Spesies	6 Spesies	8 Spesies	10 Spesies						
		c. Jumlah unit penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan ke luar negeri bersertifikat sebanyak 50 Unit (S2.P1.K3.IKK.c)	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit						
		d. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp25 Trilyun (S2.P1.K3.IKK.b)	Rp5 T	Rp10 T	Rp15 T	Rp20 T	Rp25 T						
		e. Besaran PNBK dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp50 M (S2.P1.K3.IKK.d)	Rp10 M	Rp20 M	Rp30 M	Rp40 M	Rp50 M						
		f. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah Biogeografi (sumatra, jawa-bali, kalimantan, nusa tenggara, sulawesi, maluku, dan papua) (S3.P1.K3.IKK.f)	7 Wilayah	7 Wilayah	7 Wilayah	7 Wilayah	7 Wilayah						
		g. Jumlah <i>Prior Informed Consent</i> (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC (S3.P1.K3.IKK.g)	1 PIC	3 PIC	5 PIC	7 PIC	10 PIC						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		h. Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik (S3.P1.K3.IKK.h)	4 Assesment	8 Assesment	12 Assesment	16 Assesment	20 Assesment						
		i. Terbentuknya dan beroperasinya sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional sebanyak 1 unit per tahun (S3.P1.K3.IKK.i)	10 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit						
		j. Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 Unit. (S3.P1.K3.IKK.j)	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit						
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (K4)								19.99	9.06	10.82	11.47	12.16	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
	1. Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan							19.99	9.06	10.82	11.47	12.16	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun (S2.P1.K4.IKK.a)	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.150.000 Orang	1.500.000 Orang						
		b. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun (S2.P1.K4.IKK.b)	3,5 Juta Orang	7,5 Juta Orang	11,5 Juta Orang	15,5 Juta Orang	20 Juta Orang						
		c. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 (S2.P1.K4.IKK.c)	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit						
		d. Jumlah unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 25 Unit (S2.P1.K4.IKK.d)	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit						
		e. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant sebanyak minimal 50 unit (S3.P1.K4.IKK.e)	5 unit	15 unit	25 unit	35 unit	50 unit						
		f. Jumlah unit pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit (S2.P1.K4.IKK.f)	1 Unit	1 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		g. Jumlah unit kawasan konservasi yang teregistrasi atau tersertifikasi <i>Verified Carbon Standard</i> (VCS) atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance</i> (CCBA) REDD+ pada 2 Unit (S3.P1.K4.IKK.g)	-	-	-	1 unit	2 unit						
Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial (K5)								21.59	17.45	18.50	19.61	20.78	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
	1. Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial							21.59	17.45	18.50	19.61	20.78	
		a. Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman kehati) (S3.P1.K5.IKK.a)	3 KEE	10 KEE	19 KEE	33 KEE	48 KEE						
		b. Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen (S3.P1.K5.IKK.b)	3 Dokumen	10 Dokumen	19 Dokumen	33 Dokumen	48 Dokumen						
		c. Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 paket data (S3.P1.K5.IKK.c)	1 Ekoregion	2 Ekoregion	4 Ekoregion	6 Ekoregion	7 Ekoregion						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		d. Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 kawasan (S3.P1.K5.IKK.d)	-	2 kawasan	4 kawasan	5 kawasan	6 kawasan						
		e. Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 ekoregion (S3.P1.K5.IKK.e)	-	1 ekoregion	2 ekoregion	4 ekoregion	6 ekoregion						
		f. Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 spesies (S3.P1.K5.IKK.f)	50 Spesies	100 Spesies	150 Spesies	225 Spesies	300 Spesies						
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (K6)								641.16	434.75	460.84	488.49	517.79	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
	1. Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan							641.16	434.75	460.84	488.49	517.79	
		a. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 210 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K6.IKK.a)		80 Unit KK	120 Unit KK	160 Unit KK	210 Unit KK						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK (S3.P1.K6.IKK.b)	20 KPHK	50 KPHK	100 KPHK	100 KPHK	100 KPHK						
		c. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen RP dan 150 Dokumen Zonasi/Blok (S3.P1.K6.IKK.c)	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen						
		d. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha (S3.P1.K6.IKK.d)		10.000 hektar	20.000 hektar	30.000 hektar	40.000 hektar						
		e. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun (S3.P1.K6.IKK.e)		27 Desa	27 Desa	27 Desa	27 Desa						
		f. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan konservasi untuk 471 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K6.IKK.f)		180 Unit KK	270 Unit KK	380 Unit KK	471 Unit KK						
		g. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona pemanfaatan tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha (S3.P1.K6.IKK.g)		25.000 hektar	50.000 hektar	75.000 hektar	100.000 hektar						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		h. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 471 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K6.IKK.h)		471 Paket Data	471 Paket Data	471 Paket Data	471 Paket Data						
		i. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi (S3.P1.K6.IKK.i)		34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		j. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013 (S3.P1.K6.IKK.j)	2%	4%	6%	8%	10%						
		k. Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013 (S3.P1.K6.IKK.k)	2 Spesies	4 Spesies	6 Spesies	8 Spesies	10 Spesies						
		l. Jumlah unit penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan ke luar negeri bersertifikat sebanyak 50 Unit (S2.P1.K6.IKK.l)	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit						
		m. Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp50 M (S2.P1.K6.IKK.m)	Rp10 M	Rp20 M	Rp30 M	Rp40 M	Rp50 M						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		n. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah Biogeografi (sumatra, jawa-bali, kalimantan, nusa tenggara, sulawesi, maluku, dan papua) (S3.P1.K6.IKK.n)	7 Wilayah	7 Wilayah	7 Wilayah	7 Wilayah	7 Wilayah						
		o. Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 Unit (S3.P1.K6.IKK.o)		6 Unit	9 Unit	12 Unit	15 Unit						
		p. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun (S2.P1.K6.IKK.p)	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.150.000 Orang	1.500.000 Orang						
		q. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun (S2.P1.K6.IKK.q)	3,5 Juta Orang	7,5 Juta Orang	11,5 Juta Orang	15,5 Juta Orang	20 Juta Orang						
		r. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 (S2.P1.K6.IKK.r)	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		s. Jumlah unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 25 Unit (S2.P1.K6.IKK.s)	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit						
		t. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant sebanyak minimal 50 unit (S3.P1.K6.IKK.t)	5 Unit	15 unit	25 unit	35 unit	50 unit						
		u. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit (S2.P1.K6.IKK.u)		1 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit						
		v. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang (S3.P1.K6.IKK.v)	1.200 Orang	2.400 Orang	3.600 Orang	4.800 Orang	6.000 Orang						
		w. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S3.P1.K6.IKK.w)	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin						
Pengelolaan Taman Nasional (K7)								775.83	368.50	390.61	414.05	438.89	Balai Taman Nasional
	1. Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional							775.83	368.50	390.61	414.05	438.89	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia (S3.P1.K7.IKK.a)	10 Unit KK	20 Unit KK	30 Unit KK	40 Unit KK	50 Unit KK						
		b. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen RP dan 150 Dokumen Zonasi/Blok (S3.P1.K7.IKK.b)	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen						
		c. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha (S3.P1.K7.IKK.c)	10.000 hektar	30.000 hektar	40.000 hektar	50.000 hektar	60.000 hektar						
		d. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun (S3.P1.K7.IKK.d)	50 Desa	50 Desa	50 Desa	50 Desa	50 Desa						
		e. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan konservasi untuk 50 TN di seluruh Indonesia (S3.P1.K7.IKK.e)	20 TN	20 TN	30 TN	40 TN	50 TN						
		f. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha (S3.P1.K7.IKK.f)	10.000 hektar	25.000 hektar	50.000 hektar	75.000 hektar	100.000 hektar						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		g. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 50 TN di seluruh Indonesia (S3.P1.K7.IKK.g)	50 Paket Data	50 Paket Data	50 Paket Data	50 Paket Data	50 Paket Data						
		h. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi (S3.P1.K7.IKK.h)	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
		i. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai <i>The IUCN Red List of Threatened Species</i> sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013 (S3.P1.K7.IKK.i)	2%	4%	6%	8%	10%						
		j. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah Biogeografi (sumatra, jawa-bali, kalimantan, nusa tenggara, sulawesi, maluku, dan papua) (S3.P1.K7.IKK.j)	7 Wilayah	7 Wilayah	7 Wilayah	7 Wilayah	7 Wilayah						
		k. Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 Unit (S3.P1.K7.IKK.k)	10 Unit	14 Unit	21 Unit	28 Unit	35 Unit						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung -jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		l. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun (S2.P1.K7.IKK.l)	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.150.000 Orang	1.500.000 Orang						
		m. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun (S2.P1.K7.IKK.m)	3,5 Juta Orang	7,5 Juta Orang	11,5 Juta Orang	15,5 Juta Orang	20 Juta Orang						
		n. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013 (S2.P1.K7.IKK.n)	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit						
		o. Jumlah unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak 25 Unit (S2.P1.K7.IKK.o)	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit						
		p. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant sebanyak minimal 50 unit (S2.P1.K7.IKK.p)	5 Unit	15 unit	25 unit	35 unit	50 unit						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		q. Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard</i> (VCS) atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance</i> (CCBA) REDD+ pada 2 Unit kawasan konservasi (S3.P1.K7.IKK.q)	-	-	-	1 unit	2 unit						
		r. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang (S3.P1.K7.IKK.m)	1.200 Orang	2.400 Orang	3.600 Orang	4.800 Orang	6.000 Orang						
		s. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S3.P1.K7.IKK.m)	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (K8)								39.01	20.14	21.35	22.63	23.99	Sekretariat Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
	1. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem							39.01	20.14	21.35	22.63	23.99	
		a. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 (S3.P1.K8.IKK.a)	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (P2)								1,088.27	1,831.90	881.75	934.66	990.74	Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
	Meningkatnya tutupan hutan di hutan lindung dan lahan (S1.P2.1)												
		Luas tutupan hutan lindung dan lahan meningkat setiap tahun											
	Kualitas air di DAS prioritas meningkat setiap tahun (S1.P2.2)												
		Kualitas air di DAS prioritas meningkat setiap tahun											
	Meningkatnya sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara (S2 P2.3)												
		Sumbangan hutan lindung (dan industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun											
	Meningkatkan daya dukung DAS serta internalisasi RPDAST kedalam RTRW (S3.P2.3)												
		Kesehatan DAS prioritas serta internalisasi RPDAST kedalam RTRW meningkat setiap tahun											

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak (S3.P2.2)												
		Jumlah unit pengelolaan hutan lindung meningkat setiap tahun											
Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air (K1)								62.06	17.35	22.63	23.99	25.43	Direktorat Konservasi Tanah dan Air
	1. Pulihnya Kesehatan DAS kritis							62.06	17.35	22.63	23.99	25.43	
		a. Jumlah lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS (S1.P2.K1.IKK.a)	1,25 jt ha	2,5 jt ha	3,75 jt ha	5 jt ha	5,5 jt ha						
		b. Jumlah DAS prioritas yang melakukan pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah di daerah hulu selama 5 tahun di 15 DAS prioritas (S3.P2.K7.IKK.b)	5 DAS	7 DAS	10 DAS	12 DAS	15 DAS						
		c. Tanaman Hutan Kota seluas 5.000 Ha (S1.P2.K1.IKK.c)		200 ha	3.000 ha	4.000 ha	5.000 ha						
		d. Jumlah produksi kayu dari hutan rakyat menjasi 100 juta M3 di tahun 2019 (S3.P2.K1.IKK.d)	20 juta M3	20 juta M3	20 juta M3	20 juta M3	20 juta M3						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (K2)								6.25	3.50	3.71	3.93	4.17	Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
	1. Meningkatnya Pengelolaan Hutan Lindung di tingkat tapak secara lestari							6.25	3.50	3.71	3.93	4.17	
		a. Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 Unit KPHL sampai dengan Tahun 2019 (S3.P2.2.K2.IKK.a)	40 KPHL	80 KPHL	120 KPHL	160 KPHL	182 KPHL						
		b. Kapasitas pengelola KPHL meningkat setiap tahun (S3.P2.2.K2.IKK.b)	40 KPHL	80 KPHL	120 KPHL	160 KPHL	182 KPHL						
Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS (K3)								7.12	8.50	9.01	9.55	10.12	Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS
	1. Menurunnya Kekritisitas DAS Prioritas							7.12	8.50	9.01	9.55	10.12	
		a. Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki MoU/status sebanyak 19 DAS Lintas Negara (S3.P2.K3.IKK.a)	3 DAS	9 DAS	11 DAS	15 DAS	19 DAS						
		b. Jumlah DAS prioritas yang memiliki data dan Informasi penurunan Qmax/Qmin, kadar BOD, dan peningkatan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas selama 5 tahun (S3.P2.K3.IKK.b)	5 DAS	7 DAS	10 DAS	12 DAS	15 DAS						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		c. Jumlah RPDAST yang di internalisasi ke dalam RTRW sebanyak 108 RDAST (S3.P2.K3.IKK.c)	20 RPDAST	40 RPDAST	60 RPDAST	80 RPDAST	108 RPDAST						
Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan (K4)								6.96	7.72	8.19	8.68	9.20	Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan
	1. Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan							6.96	7.72	8.19	8.68	9.20	
		a. Luas sumber benih berkualitas yang dibangun melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 490 Ha (S1.P2.K4.IKK.a)	170 ha	250 ha	330 ha	410 ha	490 ha						
		b. Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan didistribusikan dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya sebanyak 187,5 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019 (S1.P2.K4.IKK.b)	37,5 jt bibit	75 jt bibit	112,5 jt bibit	150 jt bibit	187,5 jt bibit						
		c. Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha (S1.P2.K4.IKK.c)	10.500 ha	10.500 ha	10.500 ha	10.500 ha	10.500 ha						
Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (K5)								23.40	72.80	25.00	27.00	30.00	Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Terpulihkannya fungsi ekosistem di segmen sungai pada 15 DAS Prioritas												
		a. Jumlah segmen sungai serta mata air yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 15 DAS Prioritas (S3.P2.K5.1..IKK.a)		3 Sungai	6 Sungai	10 sungai	15 Sungai		50.80				
	2. Meningkatnya kualitas ekosistem danau di 15 danau prioritas								22.00				
		a. Jumlah danau yang diturunkan laju sedimentasi atau erosinya pada 15 danau (S3.P2.K5.2.IKK.a)	1 danau	5 danau	9 danau	12 danau	15 danau						
		b. Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya pada 15 danau (S3.P2.K5.2.IKK.b)	1 danau	5 danau	9 danau	12 danau	15 danau						
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat (K6)								835.42	1,645.42	752.77	797.94	845.81	Balai Pengelolaan DAS
	1. Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas DAS								914.92	657.05	696.48	738.26	
		a. Jumlah KPHL yang beroperasi sebanyak 182 KPHL sampai dengan tahun 2019 (S3.P2.K6.1.IKK.a)	40 KPHL	80 KPHL	120 KPHL	160 KPHL	182 KPHL						
		b. Luas Hutan Kota dan pemeliharannya seluas 5.000 Ha (S1.P2.K1.1.IKK.b)		200 ha	3.000 ha	4.000 ha	5.000 ha						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		c. Lahan kritis berkurang seluas 5,5 juta hektar melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS (S1.P2.K6.1.IKK.c)	1,25 jt ha	2,5 jt ha	3,75 jt ha	5 jt ha	5,5 jt ha						
		d. Jumlah RPDAST yang di Internalisasi ke dalam RTRW sebanyak 108 RPDAST (S3.P2.K6.1.IKK.d)	20 RPDAST	40 RPDAST	60 RPDAST	80 RPDAST	108 RPDAST						
		e. Jumlah DAS Lintas Negara yang memiliki MoU/status sebanyak 19 DAS Lintas Negara (S3.P2.K6.1.IKK.e)	3 DAS	7 DAS	11 DAS	15 DAS	19 DAS						
		f. Produksi dan distribusi bibit sebanyak 135 juta bibit berkualitas (S1.P2.K6.1.IKK.f)		54 jt bibit	81 jt bibit	108 jt bibit	135 jt bibit						
	2. Pulihnya Kesehatan DAS kritis								730.50	95.72	101.46	107.55	
		a. Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah di daerah hulu sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019 (S3.P2.K6.2.IKK.a)	5 DAS	7 DAS	10 DAS	12 DAS	15 DAS						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air secara vegetatif, pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan, dan gully plug di daerah hulu DAS serta sumur resapan sebanyak 15 DAS Prioritas sampai dengan tahun 2019 (S3.P2.K6.2.IKK.b)	5 DAS	7 DAS	10 DAS	12 DAS	15 DAS						
		c. Jumlah DAS prioritas yang memiliki Data dan Informasi penurunan Qmax/Qmin, kadar BOD, dan peningkatan tutupan lahan di 15 DAS Prioritas selama 5 tahun (S1.P2.K6.2.IKK.c)	5 DAS	7 DAS	10 DAS	12 DAS	15 DAS						
Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (K7)								65.39	38.21	40.50	42.93	45.51	Balai Perbenihan Tanaman Hutan
	1. Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan							65.39	38.21	40.50	42.93	45.51	
		a. Luas sumber benih berkualitas yang terbangun melalui kebun benih semai/kebun benih klon dan areal sumber daya genetik seluas 490 Ha (S1.P2.K7.IKK.a)	170 ha	250 ha	330 ha	410 ha	490 ha						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Jumlah bibit berkualitas yang disediakan dan didistribusikan dari 50 unit persemaian permanen dan sumber lainnya sebanyak 52,5 juta bibit secara kumulatif sampai tahun 2019 (S1.P2.K7.IKK.b)	37,5 jt bibit	21 jt bibit	31,5 jt bibit	42 jt bibit	52,5 jt bibit						
		c. Luas areal pengelolaan sumber benih sepanjang tahun sampai dengan tahun 2019 seluas 10.500 Ha (S1.P2.K7.IKK.c)	10.500 ha	10.500 ha	10.500 ha	10.500 ha	10.500 ha						
Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan Mangrove (K8)								13.34	6.70	7.10	7.53	7.98	Balai Pengelolaan Hutan Mangrove
	1. Meningkatnya Pengelolaan Hutan Mangrove							13.34	6.70	7.10	7.53	7.98	
		a. Jumlah wilayah kerja yang memiliki ketersediaan data dan informasi pengelolaan hutan mangrove di dalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun (S3.P2.K8.IKK.a)	2 wil kerja	2 wil kerja	2 wil kerja	2 wil kerja	2 wil kerja						
		b. Jumlah Provinsi yang mengaktifkan Kelompok kerja mangrove daerah sebanyak 31 Provinsi (S3.P2.K8.IKK.b)	31 prov	31 prov	31 prov	31 prov	31 prov						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		c. Jumlah wilayah kerja yang memiliki model pengelolaan hutan mangrove di dalam kawasan hutan sebanyak 2 wilayah kerja sepanjang tahun selama 5 tahun (S3.P2.K8.IKK.c)	2 wil kerja	2 wil kerja	2 wil kerja	2 wil kerja	2 wil kerja						
Penyelenggaraan Pengembangan Persuteraan Alam (K9)								9.20	4.20	4.45	4.72	5.00	Balai Pengembangan Persuteraan Alam
	1. Meningkatnya Pengelolaan Persuteraan Alam							9.20	4.20	4.45	4.72	5.00	
		a. Persentase produksi HHBK sutera alam dari Hutan Lindung meningkat sampai dengan 15% dari tahun 2014 (S2.P2.K9.IKK.a)	3%	6%	9%	12%	15%						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (K10)								59.13	27.50	29.68	31.46	33.35	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
	1. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung							59.13	27.50	29.68	31.46	33.35	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PKDASHL sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S3.P2.K10.IKK.a)	70 poin	72 poin	74 poin	76 poin	78 poin						
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan (P3)								570.45	511.30	827.26	1,204.81	1,692.12	Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan
	Meningkatnya tutupan hutan di hutan produksi (S1.P3)												
		Luas restorasi ekosistem di hutan prouksi meningkat setiap tahun											
	Meningkatnya sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara (S2.P3)												
		Sumbangan hutan produksi (termasuk industri) pada devisa dan penerimaan negara meningkat setiap tahun											
	Meningkatnya pengelolaan hutan Produksi di tingkat tapak secara lestari (S3.P3)	Jumlah unit pengelolaan hutan meningkat setiap tahun											

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung -jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		Jumlah unit pemanfaatan di hutan produksi yang bersertifikasi PHPL meningkat setiap tahun											
Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi (K1)								10.66	9.56	10.51	11.56	12.72	Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi
	1. Areal hutan produksi tertata dalam KPHP dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi							10.66	9.56	10.51	11.56	12.72	
		a. Jumlah KPHP yang beroperasi di Hutan Produksi sebanyak 347 KPHP (S3.P3.K1.IKK.a)		149 KPHP	209 KPHP	269 KPHP	347 KPHP						
		b. Jumlah provinsi yang memiliki arahan pemanfaatan dan investasi di Hutan Produksi yang belum dibebani izin di 27 provinsi (S3.P3.K1.IKK.b)		27 Provinsi	27 Provinsi	27 Provinsi	27 Provinsi						
		c. Jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari sebanyak 20 KPHP (S3.P3.K1.IKK.c)		3 KPHP	5 KPHP	5 KPHP	5 KPHP						
		d. Jumlah unit yang memenuhi syarat untuk diberikan IUPHHK HA/RE/HTI di Hutan Produksi sebanyak 35 unit (S3.P3.K1.IKK.d)		6 Unit	8 Unit	8 Unit	7 Unit						
		e. Kapasitas pengelola KPHP meningkat setiap tahun (S3.P3.K1.IKK.e)		149 KPHP	209 KPHP	269 KPHP	347 KPHP						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Peningkatan Usaha Hutan Produksi (K2)								37.74	20.27	22.29	24.52	26.97	Direktorat Usaha Hutan Produksi
	1. Meningkatnya Kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman							37.74	20.27	22.29	24.52	26.97	
		a. Jumlah Produksi Kayu Bulat dari Hutan Alam sebesar 29 Juta M3 selama 5 Tahun (S2.P3.K2.1.IKK.a)		5,7 Jt M3	5,8 Jt M3	5,9 Jt M3	6 Jt M3						
		b. Jumlah Produksi Kayu Bulat dari Hutan Tanaman sebesar 160 Juta M3 selama 5 Tahun (S2.P3.K2.1.IKK.a)		32 Jt M3	33 Jt M3	34 Jt M3	35 Jt M3						
		c. Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi seluas 100.000 Ha (S1.P3.K2.1.IKK.b)		20 Ribu Ha	20 Ribu Ha	20 Ribu Ha	20 Ribu Ha						
		d. Luas hutan di Kalimantan yang dibangun dengan silvikultur intensif seluas 11.000 ha (S2.P3.K2.1.IKK.c)		2.000 Ha	4.000 Ha	8.000 Ha	11.000 Ha						
	2. Seluruh UPHHK-HA dan HT aktif beroperasi pada tahun 2019	a. Jumlah unit UPHHK HA yang aktif beroperasi melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan produksi sebanyak 220 unit hingga tahun 2019 (S2.P3.K2.2.IKK.a)		188 Unit	199 Unit	210 Unit	220 Unit						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Jumlah unit UPHHK-HT yang kinerja usaha pemanfaatannya menjadi "Layak Dilanjutkan (LD)" bertambah sebanyak 175 unit hingga Tahun 2019 (S2.P3.K2.2.IKK.b)		34 Unit	36 Unit	36 Unit	37 Unit						
Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan HHBK (K3)								5.86	5.76	6.33	6.97	7.66	Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi
	1. Meningkatnya Produksi HHBK dan Investasi usaha jasa lingkungan							5.86	5.76	6.33	6.97	7.66	
		a. Jumlah unit usaha jasa lingkungan/pemanfaatan air/jasa wisata di hutan produksi sebanyak 9 Unit (S2.P3.K3.IKK.a)		2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit						
		b. Jumlah Produksi HHBK meningkat sebesar 20% selama 5 Tahun dari produksi tahun 2014 sebesar 225.000 ton (S2.P3.K3.IKK.b)		243.000 Ton	252.000 Ton	261.000 Ton	270.000 Ton						
		c. Luas Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem meningkat di Tahun 2019 seluas 500.000 Ha (S1.P3.K3.IKK.c)		100.000 Ha	100.000 Ha	100.000 Ha	100.000 Ha						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan (K4)								8.49	13.43	14.77	16.25	17.87	Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Kayu
	1. Optimalnya ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan							8.49	13.43	14.77	16.25	17.87	
		a. Jumlah PNBK dari Investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar 15% dari penerimaan Tahun 2014 sebesar Rp.2,565 Trilyun selama 5 tahun (S2.P3.K4.IKK.a)		Rp.2,719 T	Rp.2,796 T	Rp.2,958 T	Rp.3,127 T						
		b. Jumlah unit yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan Iuran Kehutanan dalam rangka pemanfaatan hutan produksi secara tertib sebanyak 175 unit (S2.P3.K4.IKK.b)		145 Unit	155 Unit	165 Unit	175 Unit						
Peningkatan Usaha Industri Kehutanan (K5)								16.00	14.81	16.29	17.92	19.72	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	1. Meningkatnya Investasi dan ekspor produk industri kehutanan							16.00	14.81	16.29	17.92	19.72	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung -jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Jumlah nilai investasi industri kehutanan meningkat sebesar Rp.2,7 Trilyun selama 5 Tahun (S2.P3.K5.IKK.a)		Rp.540 M	Rp.540 M	Rp.540 M	Rp.540 M						
		b. Jumlah <i>Forest Based Cluster Industry</i> yang terbentuk sebanyak 15 Unit (S2.P3.K5.IKK.b)		2 Unit	4 Unit	4 Unit	3 Unit						
		c. Nilai ekspor produk industri kehutanan sebesar USD40,37 miliar selama 5 tahun (S2.P3.K5.IKK.b)		USD 7,47 M	USD 8,03 M	USD 8,64 M	USD 9,28 M						
		d. Jumlah produk kayu olahan meningkat sebesar 15% dari produksi tahun 2014 sebesar 26,5 Juta M3 yang berasal dari IUIPHHK yang bersertifikat legalitas kayu (S2.P3.K5.IKK.c)		28,4 Juta M3	29,2 Juta M3	30,0 Juta M3	30,8 Juta M3						
		e. Jumlah Industri Primer Hasil Hutan yang menggunakan sistem pengendalian bahan baku online meningkat sebesar 50% dari jumlah tahun 2014 sebesar 784 Unit (S2.P3.K5.IKK.d)		940 Unit	1.018 Unit	1.096 Unit	1.174 Unit						
Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan (K6)								440.87	428.95	736.67	1,105.16	1,582.51	Balai Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan serta industri kehutanan							440.87	428.95	736.67	1,105.16	1,582.51	
		a. Jumlah KPHP yang beroperasi di hutan produksi sebanyak 347 KPHP (S3.P3.K6.IKK.a)		149 Unit	209 Unit	269 Unit	347 Unit						
		b. Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi hutan produksi sebanyak 18 Wilayah (S3.P3.K6.IKK.b)		18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah						
		c. Jumlah wilayah yang Produksi dan Kinerja usaha pemanfaatan hasil hutan meningkat di 18 Wilayah (S3.P3.K6.IKK.c)		18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah						
		d. Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan di 18 Wilayah (S3.P3.K6.IKK.d)		18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah						
		e. Jumlah wilayah yang memiliki data dan informasi industri primer hasil hutan di 18 Wilayah (S3.P3.K6.IKK.e)		18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah	18 Wilayah						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (K7)								50.83	18.53	20.38	22.42	24.67	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari							50.83	18.53	20.38	22.42	24.67	
		a. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal : SAKIP dengan nilai minimal 78 (A) (S2.P3.K7.IKK.a)		72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 Poin						
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (P4)								308.16	299.76	329.73	362.70	398.97	Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat (S3.P4.1)												
		Luas hutan yang dikelola masyarakat meningkat setiap tahun											
	Meningkatnya upaya penyelesaian konflik dan tenurial di kawasan hutan (S3.P4.2)												
		Luas hutan yang diselesaikan konfliknya meningkat setiap tahun											

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Meningkatnya Perilaku Peduli Lingkungan dan Kehutanan (S3.P4.3)												
		Jumlah role model peduli lingkungan hidup dan kehutanan meningkat setiap tahun											
Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (K1)								51.55	68.10	23.10	24.20	23.20	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
	1. Meningkatnya luas areal kelola masyarakat			5.080.000 ha	7.620.000 Ha	10.160.000 Ha	12.700.000 Ha						
		a. Luas hutan yang di kelola masyarakat menjadi 12,7 juta HA dalam bentuk HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan (S3.P4.K1.IKK.a)		5.080.000 ha	7.620.000 Ha	10.160.000 Ha	12.700.000 Ha						
		b. Tersedianya regulasi hak dan akses masyarakat atas hutan dan pasar (S3.P4.1.K1.IKK.b)			1 Paket								
		c. Proporsi kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat meningkat setiap setahun (S3.P4.1.K1.IKK.c)	0.18%	4.23%	6.35%	8.47%	10.58%						
		d. Luas pemanfaatan di bawah tegakan hutan dalam bentuk agroforestry pada kegiatan HD, HKm, HTR, HR seluas 250.000 ha (S3.P4.1.K1.IKK.d)		50.000 ha	100.000 ha	200.000 ha	250.000 ha						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (K2)								86.34	100.60	25.40	26.60	25.50	Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat
	1. Meningkatnya kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan			2.000 kelompok	3.000 kelompok	4.000 kelompok	5.000 kelompok						
		a. Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan menjadi 5.000 kelompok (HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat dan Kemitraan) (S3.P4.K2.IKK.a)		2.000 kelompok	3.000 kelompok	4.000 kelompok	5.000 kelompok						
Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat (K3)								7.95	23.72	28.80	30.20	29.00	Direktorat Kemitraan Lingkungan
	1. Meningkatnya role model komunitas yang berperan serta dalam penyelamatan SDA dan ekosistem serta LHK			850 komunitas dan 88.00 orang	1400 komunitas dan 13.200 orang	1950 komunitas dan 21.800 orang	2500 komunitas dan 22.000 orang		23.72				
		a. Jumlah komunitas penyelamat SDA & Lingkungan pada kawasan DAS, Danau/Mata Air, Karst, Rawa, Gambut, Pesisir, Laut, & Pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri & pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi. (S3.P4.K3.IKK.a)		850 komunitas dan 88.000 orang	1400 komunitas dan 13.200 orang	1950 komunitas dan 21.800 orang	2500 komunitas dan 22.000 orang						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Jumlah unit jejaring dan mitra (ormas, dunia usaha, perguruan tinggi, legislator melalui kaukus LHK dan lembaga lain) yang berperan serta dalam membangun komunitas penyelamatan SDA dan ekosistem serta LHK. (S3.P4.K3.IKK.b)		80 jejaring dan mitra	120 jejaring dan mitra	160 jejaring dan mitra	200 jejaring dan mitra						
		c. Jumlah unit kanal komunikasi yang dibangun untuk meningkatkan akses informasi dan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan (S3.P4.K3.IKK.c)		110 kanal komunikasi	160 kanal komunikasi	210 kanal komunikasi	260 kanal komunikasi						
		d. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang (S3.P4.K3.IKK.d)		2.400 Orang	3.600 Orang	4.800 Orang	6.000 Orang						
		e. Luas kawasan hutan yang dikembangkan melalui kemitraan/kerjasama pemerintah swasta (KPS) dengan format baru CSR seluas 1,6 juta ha (S3.P4.K3.IKK.e)		400.000 ha	800.000 ha	1,2 juta ha	1,6 juta ha						
Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat (K4)								14.36	32.40	40.30	42.30	40.60	Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial dan Hutan Adat

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Meningkatnya penyelesaian konflik bidang lingkungan hidup dan kemitraan			5.080.00 0 ha	7.620.000 Ha	10.160.0 00 Ha	12.700.0 00 Ha						
		a. Luasan area konflik yang terselesaikan dalam kaitannya dengan pengelolaan HTR, HKm, HD, HR, dan Kemitraan sampai dengan tahun 2019 seluas 12,7 ha (S3.P4.K4.IKK.a)		5.080.00 0 ha	7.620.000 Ha	10.160.0 00 Ha	12.700.0 00 Ha						
	-	b. Seluruh hutan adat diidentifikasi, dipetakan dan ditetapkan pengelolaannya oleh masyarakat adat (S3.P4.K4.IKK.b)		25%	50%	75%	100%						
	-	c. Tersedianya Standar Operasi penanganan konflik (S3.P4.K4.IKK.c)		1 NSPK									
	-	d. Jumlah konflik di kawasan hutan turun setiap tahun (S3.P4.K4.IKK.d)		25%	50%	75%	100%						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (K5)								147.96	28.10	11.50	12.10	11.60	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
	1. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PSKL			72 poin	74 poin	76 poin	78 poin						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. SAKIP Ditjen PSKL dengan nilai minimal 78,00 (A) di Tahun 2019 (S3.P4.K5.IKK.a)		72 poin	74 poin	76 poin	78 poin						
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (P5)								444.45	316.90	348.59	366.02	384.32	
	Meningkatnya daya saing SDM lingkungan hidup dan kehutanan (S2.P5), (S3.P5)												
Perencanaan dan Pengembangan SDM (K1)								57.11	66.00	72.60	76.23	80.04	Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	1. Tersedianya tenaga bakti rimbawan dalam mendukung pengelolaan hutan tingkat tapak dan SDM LHK kompeten			1,900	5,600	6,100	6,364	57.11	66.00	72.60	76.23	80.04	
		a. Jumlah Tenaga Bakti Rimbawan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola KPH, 15.000 orang (S3.P5.K1.IKK.b)		300	3,500	3,500	3,264						
		b. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya, 10.400 orang (S3.P5.K1.IKK.b)		1,600	2,100	2,600	3,100						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK (K2)								210.59	101.41	111.55	117.13	122.99	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	1. Meningkatnya kapasitas SDM LHK			8,172	11,577	11,777	11,746	210.59	101.41	111.55	117.13	122.99	
		a. Jumlah kapasitas SDM Aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya, 35.000 orang (S3.P5.K2.IKK.a)		7,000	7,000	7,000	7,000						
		b. Jumlah SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa (S2 dan S3), 340 orang (S3.P5.K2.IKK.b)		70	75	75	75						
		c. Jumlah unit KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan, 7 unit KHDTK (S3.P5.K2.IKK.c)		2	2	2	7						
		d. Jumlah tenaga bakti rimbawan yang meningkat kapasitasnya, 15.000 orang (S3.P5.K2.IKK.d)		300	3,500	3,500	3,264						
		e. Jumlah tenaga pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa - desa hutan meningkat kapasitasnya 5.000 orang (S3.P5.K2.IKK.e)		800	1,000	1,200	1,400						
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan (K3)								60.36	77.45	85.20	89.46	93.93	Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Tersedianya tenaga teknis menengah kehutanan			700	420	450	450	60.36	77.45	85.20	89.46	93.93	
		a. Jumlah tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan sebanyak 2.300 orang (S3.P5.K3.IKK.a)		700	420	450	450						
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup(K4)								23.75	16.37	18.01	18.91	19.86	Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan
	1. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan			12,560	14,140	17,920	20,600	23.75	16.37	18.01	18.91	19.86	
		a. Jumlah kader Lingkungan Hidup meningkat kapasitasnya, 11.200 orang (S3.P5.K4.IKK.a)		1,760	2,240	2,720	3,200						
		b. Jumlah generasi muda LH meningkat kapasitasnya, 10.000 orang (S3.P5.K4.IKK.b)		2,000	2,000	2,000	2,000						
		c. Jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adhiyaya), 5.000 unit sekolah/kampus (S3.P5.K4.IKK.c)		800	900	1,200	1,400						
		d. Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH, 50.000 orang (S3.P5.K4.IKK.d)		8,000	9,000	12,000	14,000						
Peningkatan Penyuluhan (K5)								29.58	27.99	30.79	32.33	33.94	Pusat Penyuluhan

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat			2,052	2,270	2,380	2,690	29.58	27.99	30.79	32.33	33.94	
		a. Jumlah kelas kelompok tani desa – desa hutan dari tingkatan pemula ke madya, 5.000 unit KTH (S3.P5.K5.IKK.a)		1,100	1,100	1,000	1,100						
		b. Jumlah unit koperasi KTH yang dibentuk, 500 unit (S2.P5.K5.IKK.b)		105	120	120	130						
		c. Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS), 250 unit (S3.P5.K5.IKK.c)		47	50	60	60						
		d. Jumlah tenaga pendamping handal bagi KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa – desa hutan, 5.000 orang (S3.P5.K5.IKK.d)		800	1,000	1,200	1,400						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (K6)								63.06	27.67	30.44	31.96	33.56	Sekretariat Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi birokrasi pada unit Badan P2SDM			81	82	83	84	63.06	27.67	30.44	31.96	33.56	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung -jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan P2SDM sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai minimal 84,00 (A) (S3.P5.K6.IKK.a)		81	82	83	84						
Program Pengendalian Perubahan Iklim (P6)								153.48	150.10	172.34	202.50	227.56	Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
	Meningkatnya efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan (S1.P6.1)												
		Penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan, gambut dan limbah sebesar 21,7%											
	Menurunnya luas areal kebakaran hutan (S3.P6.1)												
		Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun setiap tahun											
	Meningkatnya wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim (S3.P6.2)												
		Jumlah wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim meningkat setiap tahun											

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Adaptasi Perubahan Iklim (K1)								6.44	7.85	11.98	13.77	15.84	Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
	1. Meningkatnya kemampuan adaptasi perubahan iklim di 15 wilayah			5 Wilayah	10 Wilayah	15 Wilayah	15 Wilayah	6.44	7.85				
		a. Jumlah wilayah yang difasilitasi pengembangan skenario iklim sebanyak 15 wilayah (S1.P6.K1.IKK.a)		5 Wilayah	10 Wilayah	15 Wilayah	15 Wilayah						
		b. Jumlah wilayah yang difasilitasi dalam pengembangan (downscaling) rencana aksi adaptasi perubahan iklim di daerah sebanyak 15 wilayah (S1.P6.K1.IKK.b)		5 Wilayah	10 Wilayah	15 Wilayah	15 Wilayah						
		c. Jumlah wilayah yang difasilitasi dalam pengembangan adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem di 15 wilayah rentan (S1.P6.K1.IKK.c)		2 wilayah	5 wilayah	10 Wilayah	15 Wilayah						
		d. Pengembangan dan Operasionalisasi SIDIK yang terintegrasi dengan data iklim dan data kerentanan sektor prioritas (S1.P6.K1.IKK.d)		100% Data sosek	100% Data sosek dan data iklim	2 sektor prioritas	4 sektor prioritas						
		e. Fasilitasi inisiatif lokal adaptasi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (Proklam) sebanyak 2000 Desa (S1.P6.K1.IKK.e)		200 Desa	1.000 Desa	1.500 Desa	2.000 Desa						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Mitigasi Perubahan Iklim (K2)								19.09	9.36	10.76	13.50	14.23	Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim
	1. Ketersediaan kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim di bidang kehutanan, lahan gambut, dan limbah			5	7	7	7	19.09	5.80	6.67	8.80	8.82	
		a. Jumlah kebijakan yang termutakhirkan dalam penurunan emisi GRK di bidang kehutanan, lahan gambut, dan limbah (S1.P6.K2.1.IKK.a)		2 kebijakan	2 kebijakan	review 2 kebijakan	review 2 kebijakan						
		b. Jumlah perangkat mitigasi perubahan iklim yang termutakhirkan di bidang kehutanan dan lahan gambut: baseline, faktor emisi, data aktivitas, skenario mitigasi, safeguards (S1.P6.K2.1.IKK.b)		3 perangkat	5 Perangkat	5 Perangkat	5 Perangkat						
		c. Jumlah provinsi yang menerapkan RAD-GRK di bidang kehutanan dan lahan gambut (S1.P6.K2.1.IKK.c)		16 provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
	2. Penurunan konsumsi bahan perusak ozon			141.36	188.47	235.59	282.71		3.56	4.09	4.70	5.41	
		a. Persentase tingkat penurunan konsumsi bahan perusak ozon jenis HCFC dari 403,9 ODP ton tahun 2013 menjadi 282,71 ODP ton atau 30% (S1.P6.K2.2.IKK.a)		15%	20%	25%	30%						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (K3)								4.00	8.88	6.72	11.22	8.89	Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi
	1. Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK, serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan secara berkala setiap tahun			3 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	4.00	8.88	6.72	11.22	8.89	
		a. Jumlah laporan hasil inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (S1.P6.K3.IKK.a)		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
		b. Jumlah laporan Komunikasi nasional perubahan iklim (S1.P6.K3.IKK.b)		1 Dokumen Laporan Third National Communication	1 Dokumen Laporan BUR ke-2		1 Dokumen Laporan BUR ke-3						
		c. Jumlah bidang mitigasi yang ter Measurement Reporting and Verification (MRV) (S1.P6.K3.IKK.c)		5 bidang	5 bidang	5 bidang	5 bidang						
		d. Jumlah bidang aksi mitigasi yang terdaftar dalam Sistem Registry Nasional (S1.P6.K3.IKK.d)		5 bidang	5 bidang	5 bidang	5 bidang						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Kegiatan Mobilisasi Sumber Daya untuk perubahan iklim (K4)								6.50	9.11	10.75	12.05	13.86	Direktorat Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional
	1. Meningkatnya ketersediaan pendanaan dan kapasitas pengembangan sains perubahan iklim dan teknologi rendah karbon, sebesar 60% dari kebutuhan dengan baseline 2015			18%	38%	48%	60%	6.50	9.11	10.75	12.05	13.86	
		a. Diterapkannya mekanisme pengembangan manfaat dan penanganan deforestasi dan degradasi hutan di 25 lokasi (S1.P6.K4.IKK.a)		Mekanisme Benefit sharing terbentuk	13 Lokasi	18 Lokasi	25 Lokasi						
		b. Jumlah kerjasama dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga lainnya terkait perdagangan carbon, teknologi rendah karbon dan Sains perubahan iklim sebanyak 15 kerja sama (S1.P6.K4.IKK.b)		6 Kerjasama	9 Kerjasama	12 Kerjasama	15 kerjasama						
		c. Jumlah kegiatan/proyek yang mendapat rekomendasi teknis untuk investasi penurunann emisi GRK di bidang energi, dan limbah sebanyak 200 yang akan dibiayai melalui pusat pembiayaan pembangunan hutan dan lingkungan (S1.P6.K4.IKK.c)		35 Keg.	75 Keg.	150 Keg	200 Keg						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung -jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		d. Persentase Posisi Indonesia dalam perjanjian dan forum internasional bidang perubahan iklim diterima sebesar 80% per tahun (S1.P6.K4.IKK.d)		80%	90%	80%	80%						
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (K5)								111.04	108.60	124.89	143.62	165.17	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan
	1. Terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengendalian karhutla							111.04	108.60	124.89	143.62	165.17	
		a. Presentase penurunan jumlah hotspot pada kawasan hutan non konservasi dan lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebesar 10% dari batas toleransi maksimum jumlah hotspot sebesar 32.323 HS menjadi 29.091 HS pada tahun 2019 (S1.P6.K5.IKK.a)		4%	6%	8%	10%						
		b. Presentase penurunan luas kebakaran hutan non konservasi, dan lahan di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebesar 10% dari batas toleransi maksimum luas kebakaran hutan dan lahan seluas 498.736 Ha menjadi 448.863 Ha pada tahun 2019 (S1.P6.K5.IKK.b)		4%	6%	8%	10%						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		c. Jumlah SDM Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang ditingkatkan kapasitasnya (Manggala Agni dan MPA) sebanyak 5.000 Orang (S1.P6.K5.IKK.c)		2.000 orang	3.000 orang	4.000 orang	5.000 orang						
		d. Jumlah brigade Pengendalian Kebakaran Hutan pada kesatuan pengeolaan hutan (KPH) yang difasilitasi pembentukannya di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 50 Brigade (S1.P6.K5.IKK.d)		30 Brigade	40 Brigade	45 Brigade	50 Brigade						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (K6)								6.41	6.30	7.25	8.33	9.58	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
	1. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPI			72	74	76	78	6.41	6.30				
		a. SAKIP Ditjen PPI dengan nilai minimal 78 (A) di tahun 2019 (S1.P6.K6.IKK.a)		72	74	76	78						
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P7)								212.43	246.31				Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Meningkatnya keamanan lingkungan hidup dan kehutanan melalui penegakan hukum (S1.P7) dan (S3.P7)												
		Persentase pelanggaran hukum yang berkenaan dengan lingkungan hidup dan kehutanan menurun setiap tahun											
Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi (K1)								96.54	36.30				Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
	1. Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan; Pengawasan izin lingkungan Izin PPLH, dan PUU; ketaatan terhadap sanksi administrasi.			50%	50,6%	56,67%	58,3%	96.54	36.30				
		a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (S1.P6.K1.IKK.a)	100%	100%	100%	100%	100%						
		b. Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH sebesar 100% per tahun dari izin yang diterbitkan oleh KLH (S1.P6.K1.IKK.b)	100%	100%	100%	100%	100%						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		c. Persentase sanksi administrasi yang ditaati oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan meningkat tiap tahun (S1.P6.K1.IKK.c)	60%	60%	75%	85%	90%						
		d. Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum sebanyak 120 PPLH per tahun (S1.P6.K1.IKK.d)	120 PPLH	120 PPLH	120 PPLH	120 PPLH	120 PPLH						
		e. Jumlah Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 100 orang PPLH (S1.P6.K1.IKK.e)	100 orang PPLH	100 orang PPLH	100 orang PPLH	100 orang PPLH	100 orang PPLH						
Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH) (K2)								15.55	16.85				Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
	1. Meningkatnya efektivitas PSLH		75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi	75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi	75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi	75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi	75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi	15.55	16.85				
		a. Persentase PSLH di luar pengadilan sebesar 75% per tahun dari jumlah sengketa lingkungan hidup yang terjadi (S1.P7.K2.IKK.a)	75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi	75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi	75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi	75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi	75% dari jumlah sengketa LH yang terjadi						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan minimal sebanyak 10 gugatan per tahun (S1.P7.K2.IKK.b)	10 gugatan	10 gugatan	10 gugatan	10 gugatan	10 gugatan						
Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K3)								26.65	53.31				Direktorat Penegakan Hukum Pidana
	1. Meningkatnya efektifitas penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan		75%	75%	75%	75%	75%	26.65	53.31				
		a. Persentase penyelesaian tindak pidana sampai dengan P21 sebesar 75% per tahun dari jumlah kasus (S1.P7.K3.IKK.a)	75%	75%	75%	75%	75%						
		b. Jumlah verifikasi perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebanyak 200 kasus lingkungan hidup dan kehutanan per tahun (S1.P7.K3.IKK.b)	200 kasus lingkungan hidup dan kehutanan	200 kasus lingkungan hidup dan kehutanan	200 kasus lingkungan hidup dan kehutanan	200 kasus lingkungan hidup dan kehutanan	200 kasus lingkungan hidup dan kehutanan						
		c. Persentase barang bukti yang ditangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani (S1.P7.K3.IKK.c)	100%	100%	100%	100%	100%						
		d. Jumlah pelaksanaan eksaminasi kasus TPLH sebesar 100% (S1.P7.K3.IKK.d)	100%	100%	100%	100%	100%						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		e. Fasilitasi penegakan hukum pidana dalam rangka penegakan hukum terpadu sebanyak 100% per tahun (S1.P7.K3.IKK.e)	100%	100%	100%	100%	100%						
		f. Jumlah PPNS yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 orang/tahun (S1.P7.K3.IKK.f)	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang						
		h. Persentase penurunan kasus penyelundupan limbah B3 dan limbah B3 ilegal lintas batas minimal 75% (S1.P7.K3.IKK.g)		20%	35%	55%	75%						
		i. Persentase penurunan kasus pembuangan dan dumping B3 dan limbah B3 ilegal ke laut minimal 75% (S1.P7.K3.IKK.g)		20%	35%	55%	75%						
Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan (K4)								50.84	128.85				Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan
	1. Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Propinsi		77 lokasi	77 lokasi	77 lokasi	77 lokasi	77 lokasi	50.84	128.85				
		a. Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi di 77 lokasi utamanya di 15 DAS prioritas (S3.P7.K4.IKK.a)	77 lokasi	77 lokasi	77 lokasi	77 lokasi	77 lokasi						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Jumlah Polhut yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 2.500 orang/tahun (S3.P7.K4.IKK.b)	2.500 orang	2.500 orang	2.500 orang	2.500 orang	2.500 orang						
		c. Jumlah Masyarakat Mitra Polhut (MMP), Tenaga Pengamanan Hutan Lainnya (TPHL) dan penggiat lingkungan lainnya yang terbina sebanyak 34 unit dalam 5 tahun (S3.P7.K4.IKK.c)	34 unit MMP/TPHL/LSM/Mitra	34 unit MMP/TPHL/LSM/Mitra	34 unit MMP/TPHL/LSM/Mitra	34 unit MMP/TPHL/LSM/Mitra	34 unit MMP/TPHL/LSM/Mitra						
		d. Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum yang memenuhi standar minimum di 11 Brigade SPORC (S3.P7.K4.IKK.d)	11 Brigade	11 Brigade	11 Brigade	11 Brigade	11 Brigade						
		e. Luas kawasan hutan yang dapat dilindungi dari kegiatan ilegal meningkat setiap tahun (S3.P7.K4.IKK.e)	20%	40%	60%	80%	100 %						
		f. Tersedianya regulasi penanganan pengaduan dan sertifikasi penegakan hukum (S3.P7.K4.IKK.f)	20%	40%	60%	80%	100 %						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (K5)								22.86	11.00				Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan		70 Poin	72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 Poin		11.00				
		a. SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S3.P7.K5.IKK.a)	70 Poin	72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 Poin						
Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P8)								389.81	206.80	472.00	516.00	566.50	Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi
	Tersedianya iptek bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian LHK (S1.P8.1),(S2.P8)dan (S3.P8)												
Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan (K1)								40.67	36.00	83.20	98.50	113.00	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan
	1. Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Konservasi Sumber Daya Alam; Produktivitas hutan; Hasil Hutan sebagai alternatif sumber pangan, energi dan obat-obatan		20%	40%	60%	80%	100%		20.50	66.00	79.50	93.00	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Jumlah rancangan dan pengelolaan stasiun riset Kehati terintegrasi pada 12 TN serta pengelolaan 4 KHDTK (S3.P8.K1.1.IKK.a)	3 TN - 4 KHDTK	6 TN - 4 KHDTK	8 TN - 4 KHDTK	10 TN - 4 KHDTK	12 TN - 4 KHDTK						
		b. Jumlah capaian paket IPTEK dan persen pemanfaatan IPTEK: Konservasi Keanekaragaman Hayati; Konservasi Sumber Daya Air; Peningkatan Produktivitas Hutan (Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu); Sumber Pangan Alternatif dari Hutan; Sumber Energi; Obat-obatan Tanaman Hutan (6 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% Hasil Penelitian termanfaatkan) (S2.P8.K1.1.IKK.b)	6 Sintesa IPTEK; 40%	6 Sintesa IPTEK; 40%	6 Sintesa IPTEK; 50%	6 Sintesa IPTEK; 60%	6 Sintesa IPTEK; 70%						
	2. Terlaksananya Pengembangan IPTEK di bidang Pengelolaan Hutan		20%	40%	60%	80%	100%		15.50	17.20	19.00	20.00	
		a. Persen capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (5 Pilot Iptek di KPH dan 1 Paket Pengembangan Iptek) (S3.P8.K1.2.IKK.a)	20%	40%	60%	80%	100%						
Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan (K2)								28.14	14.40	39.00	45.50	51.00	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan
	1. Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan		20%	40%	60%	80%	100%		10.40	34.00	38.50	43.00	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Jumlah capaian IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK: revitalisasi pemanfaatan energi, pangan dan obat-obatan alternative dari hutan; pengolahan hasil hutan; dan keteknikan hutan (3 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% Hasil Penelitian termanfaatkan) (S2.P8.K2.1.IKK.a)	3 Sintesa IPTEK; 20%	3 Sintesa IPTEK; 40%	3 Sintesa IPTEK; 50%	3 Sintesa IPTEK; 60%	3 Sintesa IPTEK; 70%						
	2. Terlaksananya Pengembangan IPTEK di bidang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan		20%	40%	60%	80%	100%		4.00	5.00	7.00	8.00	
		a. Jumlah capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (1 Pilot Iptek di KPH dan 1 Paket Pengembangan Iptek) (S2.P8.K2.2.IKK.a)	20%	40%	60%	80%	100%						
Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (K3)								27.12	21.66	48.40	55.50	68.50	Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan
	1. Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Kualitas Lingkungan		20%	40%	60%	80%	100%		8.20	21.50	23.50	30.50	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Jumlah capaian paket IPTEK dan persen pemanfaatan IPTEK: Kualitas Lingkungan (air, tanah, udara dan kebisingan) untuk IKLH; Kualitas Lingkungan untuk indeks pembangunan berkelanjutan; dan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan (3 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% Hasil Penelitian termanfaatkan) (S1.P8.K3.1.IKK.a)	3 Sintesa IPTEK; 20%	3 Sintesa IPTEK; 40%	3 Sintesa IPTEK; 50%	3 Sintesa IPTEK; 60%	3 Sintesa IPTEK; 70%						
	2. Pengelolaan Laboratorium Rujukan Nasional		20%	40%	60%	80%	100%		11.96	24.50	28.00	32.00	
		a. Jumlah pengelolaan laboratorium rujukan (pengembangan metode pengujian kualitas lingkungan dan metodologi lingkungan) (S1.P8.K3.2.IKK.a)	1	1	1	1	1						
		b. Peningkatan kapasitas pengembangan laboratorium lingkungan di daerah pada 15 provinsi (S1.P8.K3.2.IKK.B)	5	5	10	10	15						
	3. Terlaksananya Pengembangan IPTEK di bidang Kualitas Lingkungan		20%	40%	60%	80%	100%	-	1.50	2.40	4.00	6.00	
		a. Persen capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (1 Paket Pengembangan Iptek) (S1.P8.K3.3.IKK.a)		25%	50%	75%	100%						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Penelitian dan Pengembangan Sosekjak dan Perubahan Iklim (K4)								20.83	15.60	34.40	43.00	55.00	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim
	1. Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Sosekjak dan Perubahan Iklim		20%	40%	60%	80%	100%		8.50	24.00	30.00	40.00	
		a. Jumlah capaian paket IPTEK dan persen pemanfaatan IPTEK Sosekjak dan Perubahan Iklim: Sosek, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat dan resolusi konflik kawasan hutan; Keekonomian dan daya saing industri serta Kebijakan Tata Kelola LHK; Politik dan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; (3 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% Hasil Penelitian termanfaatkan)(S1.P8.K4.1.I KK.a)	3 Sintesa IPTEK; 20%	3 Sintesa IPTEK; 40%	3 Sintesa IPTEK; 50%	3 Sintesa IPTEK; 60%	3 Sintesa IPTEK; 70%						
	2.Terlaksananya Pengembangan IPTEK di bidang Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim		20%	40%	60%	80%	100%		7.10	10.40	13.00	15.00	
		a. Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang LHK (5 Paket Rekomendasi) (S1.P8.K4.2.IKK.a)	1 Paket	2 Paket	3 Paket	4 Paket	5 Paket						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Persen capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (1 Pilot Iptek di KPH, 1 Paket Pengembangan Iptek, serta Demonstration Activity di 10 ekosistem) (S1.P8.K5.1.IKK.b)	20%	40%	60%	80%	100%						
Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah (K5)								188.37	104.54	102.30	232.50	236.00	Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
	1. Tersedianya bahan sintesa hasil Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah		20%	40%	60%	80%	100%	188.37	104.54	102.30	232.50	236.00	
		a. Jumlah bahan sintesa Hasil Penelitian Terintegrasi di Seluruh Satker Balai Besar/ Balai (75 paket) (S3.P8.K5.IKK.a)	15	30	45	60	75						
		b. Persen capaian IPTEK Litbang Unggulan Daerah di Seluruh Satker Balai Besar/ Balai (15 IPTEK) (S3.P8.K5.IKK.b)	20%	40%	60%	80%	100%						
		c. Jumlah Pengelolaan KHDTK di masing-masing unit Litbang LHK di Daerah (30 KHDTK) (S3.P8.K5.IKK.c)	30	30	30	30	30						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (K6)								84.67	14.60	40.00	41.00	43.00	Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Program dan Kerjasama; Evaluasi dan Diseminasi; Administrasi Umum dan Pengelolaan Sarana/Prasarana dan Perlengkapan; serta Pengelolaan Kepegawaian dan Penguatan Hukum serta Organisasi Tata Laksana pada Badan Litbang LHK (Setbadan, 4 Puslit/Pusbang, 15 Satker Daerah)		76	78	80	82	83	84.67	14.60	40.00	41.00	43.00	
		a. Nilai capaian tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: "SAKIP" dengan nilai > 82,00 (memuaskan) di tahun 2019 (S3.P8.K6.IKK.a)	76	78	80	82	83						
Program Planologi dan Tata Lingkungan (P9)		510,525,297						510.53	461.40	481.35	505.34	486.48	Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan
	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual (S3.P9.1)	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan											
	Tersedianya Data dan Informasi SDH (S3.P9.2)												
		Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi											

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan (S3.P9.3)												
		Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi dan Air 100 %											
	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung (S3.P9.4)												
		Terlaksananya seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan											
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (K1)								12.53	14.5	15.0	15.7	15.1	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
	1. Terselesaikannya Penetapan seluruh Kawasan Hutan								14.5				
		a. Persentase Kawasan Hutan yang ditetapkan sebesar 80% Kawasan Hutan (Kawasan Hutan yang telah ditetapkan s.d. Tahun 2014 mencapai 56%) (S3.P9.1.K1.IKK.a)		10%	5%	10%	10%						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Seluruh Permohonan Perubahan Fungsi/Peruntukan Kawasan Hutan Secara Parsial dapat diselesaikan (S3.P9.1.K1.IKK.b)		100%	100%	100%	100%						
		c. Tersedianya regulasi kepastian kawasan hutan (S3.P9.1.K1.IKK.c)	20%	40%	60%	80%	100%						
		d. Luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk pencetakan sawah baru seluas 1 juta ha (S3.P9.1.K1.IKK.d)		1 juta ha									
		e. Luas kawasan hutan untuk pengembangan pertanian hasil reforma agraria seluas 4,1 juta ha (S3.P9.1.K1.IKK.e)		4,1 juta ha									
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (K2)								11.14	12	23.1	24.2	23.2	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan
	1. Data dan informasi SDH yang terbaru di seluruh KPH								12				
		a. Jumlah KPH yang telah memiliki Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan (S3.P9.2.K2.IKK.a)		358 KPH	458 KPH	600 KPH	600 KPH		12				
		b. Tersedianya regulasi satu peta di lingkungan Kementerian (S3.P9.2.K2.IKK.b)		100%									
Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (K3)	-	-	-	-	-	-	-	53.79	23	23.1	24.2	23.2	Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
													Hutan
	1. Pembentukan 459 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Propinsi								18.1				
		a. Jumlah provinsi yang memiliki Peta Arahana Pemanfaatan yang terupdate setiap tahun, 34 Provinsi (S3.P9.3.K3.1.IKK.a)		34 Prov (Update)	34 Prov (Update)	34 Prov (Update)	34 Prov (Update)						
		b. Jumlah KPH yang memiliki Peta Penetapan dan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (S3.P9.3.K3.1.IKK.b)		209 KPH	309 KPH	409 KPH	409 KPH						
		c. Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTK (S3.P9.3.K3.1.IKK.c)		358 KPH	458 KPH	600 KPH	600 KPH (Update)						
		d. Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP dan RTRWK (S3.P9.3.K3.1.IKK.d)		358 KPH	458 KPH	600 KPH	600 KPH (Update)						
		e. Tersedianya regulasi penataan ruang (S3.P9.3.K3.1.IKK.e)		50%	100%								
	2. Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80 %								4.9				

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan selesai 100% (S3.P9.3.K3.2.IKK.a)		100%	100%	100%	100%						
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (K4)								6.20	6.5	7	7.5	8	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor
	1. Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas								6.5				
		a. Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun (S3.P9.4.K4.1.IKK.a)	10 KLHS	100 KLHS	100 KLHS	100 KLHS	100 KLHS						
		b. Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun (S3.P9.4.K4.1.IKK.b)	10 KLHS	100 KLHS	100 KLHS	100 KLHS	100 KLHS						
	2. Tersusunya RPPLH Nasional dan RPPLH daerah untuk menjadi Acuan dalam RPJMN /RPJMD												

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yg telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah, 1 RPPLH Nasional tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional) (S3.P9.4.K4.2.IKK.a)	1 RPPLH 2015-2019 Nasional	-	1 laporan Midterm Reviu RPPLH Nas	-	1 RPPLH 2020-2024 Nasional						
		b. Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (34 RPPLH Povinsi) (S3.P9.4.K4.2.IKK.b)	2 RPPLH Provinsi pada Ekoregion Jawa	6 RPPLH Provinsi pada Ekoregion Sumatera dan 4 RPPLH Provinsi pada Ekoregion Jawa	5 RPPLH Provinsi pada Ekoregion Kalimantan dan 3 RPPLH Provinsi pada Ekoregion	6 RPPLH Provinsi pada Ekoregion Sulawesi	7 RPPLH Provinsi pada Ekoregion Maluku, Papua dan Bali-Nusra						
		c. Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)(S3.P9.4.K4.2.IKK.c)		10 RPPLH Kab/Kota pada Ekoregion Jawa	5 RPPLH Kab/Kota pada Ekoregion Jawa dan 5 RPPLH Kab/Kota pada Ekoregion Bali-Nusra	10 RPPLH Kab/Kota pada Ekoregion Kalimantan	10 RPPLH Kab/Kota pada Ekoregion Sulawesi						
		d. Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada 6 ekoregion (S3.P9.4.K4.2.IKK.d)		6 ekoregion (update)	6 ekoregion (update)	6 ekoregion (update)	6 ekoregion (update)						
		e. Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000 (S3.P9.4.K4.2.IKK.e)		9 satuan peta ekoregion sulawesi	12 satuan peta ekoregion Jawa dan 27 satuan peta Bali Nusra	5 satuan peta ekoreg Maluku dan 50 satuan peta ekoreg Papua	51 satuan peta ekoregion Sumatera dan 51 satuan peta						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
							Kalimantan						
	3.Tersusunnya neraca SDA LH Prov/Kab/Kot dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA nasional dan PDB Hijau												
		Jumlah Prov/Kab/Kot yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau (S3.P9.K4.3.IKK.a)	1 Neraca SDALH dan PDRB Hijau provinsi pada ekoregion Jawa	10 Neraca SDALH dan PDRB Hijau Kab/Kota pada ekoregion Jawa	10 Neraca SDALH dan PDRB Hijau Kab/Kota pada ekoregion Kalimantan	10 Neraca SDALH dan PDRB Hijau Kab/Kota pada ekoregion Sumatera	10 Neraca SDALH dan PDRB Hijau Kab/Kota pada ekoregion Sumatera						
Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (K5)								-	6	7	7.5	8	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
	1. Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yg efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan								6				

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung -jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100%) (S3.P9.K5.IKK.a)		100%	100%	100%	100%						
		b. Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100%) (S3.P9.K5.IKK.b)		100%	100%	100%	100%						
		c. Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah) (S3.P9.K5.IKK.c)		60 KPA dan 20 LPJP	150 KPA dan 40 LPJP	200 KPA dan 50 LPJP	250 KPA dan 150 LPJP						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (K6)								100.35	43.7	11.5	12.1	11.6	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019								43.7				
		a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (78 point) (S3.P9.K6.IKK.a)		73 Poin	75 Poin	77 Poin	78 Poin						
Pemantapan Kawasan Hutan (K7)								326.52	355.7	394.7	414.2	397.4	Balai Pemantapan Kawasan Hutan
	1. Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Pemantapan Kawasan Hutan								355.7				
		a. Penataan Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km (S3.P9.3.K7.IKK.a)		8.000 Km	8.000 Km	10.000 Km	8.000 Km						
		b. Jumlah KPH yang memiliki Rencana Pengelolaan 409 KPH (S3.P9.3.K6.IKK.b)		100 KPH	100 KPH	100 KPH	0 KPH						
		c. Jumlah kluster yang telah dinventarisasi Sumber Daya Hutan-nya sebanyak 1650 Klaster (S3.P9.3.K6.IKK.c)		330 Klaster	330 Klaster	330 Klaster	330 Klaster						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (P10)		126,009,571						126.01	212.10	619.17	494.24	359.91	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
	Meningkatnya kualitas udara (S1.P10.1)												
		Indeks Kualitas Udara minimal 84											
	Meningkatnya kualitas air (S1.P10.2)												
		Indeks kualitas Air minimal 55											
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan (S1.P10.3)												
		Indeks Tutupan Lahan minimal 62											
	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut (S3.P10.1)												
		Kualitas pesisir dan laut meningkat setiap tahun											
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut (S3.P10.2)	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan meningkat setiap tahun											
Pengendalian Pencemaran Udara (K1)								25.28	88.00	194.00	119.00	126.00	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Menurunnya beban emisi pencemaran udara sebesar 15% dari basis data 2014		3%	7%	10%	13%	15%		88.00	194.00	119.00	126.00	-
		a. Persentasi Penurunan beban pencemaran ke udara sebesar 15 % dari basis data 2014 (S1.P10.K1.IKK.a)	3%	7%	10%	13%	15%						
		b. Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi secara kontinyu sejumlah 45 Kota (S1.P10.K1.IKK.b)	-	9 kota	12 kota	12 kota	12 kota						
		c. Jumlah Kota yang menerapkan "green transportation" sebanyak 45 kota (S1.P10.K1.IKK.c)	3 kota	3 kota	19 kota	11 kota	12 kota						
		d. Jumlah Kota yang memenuhi baku mutu Kualitas Udara Ambien (dari 45 Kota yang dipantau) (S1.P10.K1.IKK.d)	3 kota	9 kota	18 kota	27 kota	36 kota						
Pengendalian Pencemaran Air (K2)								26.50	40.25	96.25	116.00	47.00	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air
	1. Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30% dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas (124.950,73 ton BODe)			5%	20%	25%	30%		40.25	96.25	116.00	47.00	
		a. Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu (S1.P10.K2.IKK.a)	-	5 sungai	8 sungai	15 sungai	15 sungai						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya (S1.P10.K2.IKK.b)	-	3 sungai	6 sungai	3 sungai	3 sungai						
		c. Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli) (S1.P10.K2.IKK.c)	-	6 sungai	9 sungai	12 sungai	15 sungai						
		d. Beban Pencemaran Air turun 16% melalui pilot project dan pembinaan sumber pencemar (S1.P10.K2.IKK.d)	1%	5%	10%	13%	16%						
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (K3)								25.25	25.25	217.00	140.50	41.00	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
	1. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut sebesar 20% dari basis data 2015			5%	10%	15%	20%		25.25	217.00	140.50	41.00	
		a. Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD, Semarang, dan Bali) meningkat setiap tahun (S1.P10.1.K3.1.IKK.a)	1 Kawasan pesisir (NCICD)	1 Kawasan pesisir (NCICD)	2 Kawasan pesisir (NCICD dan Semarang)	3 Kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Benoa-Bali)	3 Kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Benoa-Bali)						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Jumlah pilot project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit (S1.P10.1.K3.1.IKK.b)		2 unit	16 unit	20 unit	-						
	2. Menurunnya tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut	c. Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 85 kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, seagrass, terumbu karang (S1.P10.1.K3.2.IKK.a)	3 kawasan	10 kawasan	40 kawasan	60 kawasan	85 kawasan						
Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka (K4)								17.16	17.00	47.00	44.00	42.00	Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka
	1. Meningkatnya luas lahan terlantar yang terpulihkan sebesar 25% dari basis data yang terinventarisir			10%	15%	20%	25%		17.00	47.00	44.00	42.00	
		a. Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access) (S1.P10.K4.IKK.a)	3 provinsi	3 provinsi	11 provinsi	11 provinsi	update						
		b. Luas Lahan terlantar (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014 (S1.P10.K4.IKK.b)	5%	10%	15%	20%	25%						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung -jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Pengendalian Kerusakan Lahan Gambut (K5)								27.00	31.90	54.25	63.00	91.00	Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut
	1. Meningkatnya luasan lahan gambut yang terpulihkan sebesar 5% dari luas KHG yang sudah ditentukan			75 ha	200 ha	300 ha	500 ha		31.90	54.25	63.00	91.00	
		a. Jumlah ekosistem gambut yang dipetakan kesatuan hidrologis gambutnya (S1.P10.2.K5.IKK.a)		3 KHG	173 KHG	353 KHG	504 KHG						
		b. Jumlah ekosistem Gambut Ditetapkan Sebagai Fungsi Lindung (S1.P10.2.K5.IKK.b)		3 KHG	173 KHG	353 KHG	504 KHG						
		c. Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun (S1.P10.2.K5.IKK.c)		3 KHG	173 KHG	353 KHG	504 KHG						
		d. Luas lahan gambut yang rusak (<i>degraded peatland</i>) yang terpulihkan meningkat setiap tahun (S1.P10.2.K5.IKK.d)		100 ha	200 ha	300 ha	500 ha						
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (K6)								4.82	9.70	10.67	11.74	12.91	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH		71 Poin	73 Poin	75 Poin	77 Poin	78 Poin		9.70	10.67	11.74	12.91	
		a. SAKIP Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019 (S1.P10.K6.IKK.a)	71 Poin	73 Poin	75 Poin	77 Poin	78 Poin						
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (P11)		133,290,342						133.29	405.70	126.10	132.60	127.20	Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya risiko akibat paparan B3, limbah B3 dan sampah (S1.P11)												
		Jumlah sampah yang dikelola sebesar 124.6 juta ton di 380 kota											
		Jumlah bahan berbahaya dan beracun yang dikelola sebesar 3 juta ton dalam 5 tahun											
		Jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dikelola sebesar 755.595.000 ton dalam 5 tahun											

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Pengelolaan Sampah (K1)								40.00	207.60	27.50	28.70	27.70	Direktorat Pengelolaan Sampah
	1. Berkurangnya jumlah timbunan sampah pada sumbernya sebesar 20% dari 124.6 juta ton atau sebesar 24.5 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota			6,23 Juta Ton	12,46 Juta ton	18,68 Juta Ton	24,5 Juta Ton		192.10				
		a. Jumlah timbunan sampah yang berkurang melalui penerapan EPR sebesar 85 ton dalam 5 tahun (S1.P11.K1.1.IKK.a)		30	51	68	85						
		b. Jumlah timbunan sampah yang berkurang melalui pusat daur ulang (recycle center) kapasitas 20 ton/hari sebesar 124.100 ton dalam 5 tahun -- > 2 unit (S1.P11.K1.1.IKK.b)		-	1,839,510	1,912,510	1,985,510						
		c. Jumlah timbunan sampah yang berkurang melalui pusat daur ulang (recycle center) kapasitas 10 ton/hari sebesar 131.400 ton dalam 5 tahun -- > 4 unit (S1.P11.K1.1.IKK.c)		1,766,510	1,821,260	1,876,010	1,930,760						
		d. Pengurangan jumlah timbunan sampah melalui bank sampah kapasitas 1 ton/hari sebesar 113.150 ton dalam 5 tahun --> 50 unit (S1.P11.K1.1.IKK.d)		705,250	1,070,250	1,435,250	1,800,250						
		e. Jumlah kota berwawasan lingkungan berbasis 3 R sebagai destinasi wisata sebanyak 20 kota (S1.P11.K1.IKK.e)		5 kota	10 kota	15 kota	20 kota						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	2. Tertanganinya jumlah sampah sebesar 75% dari 124.6 juta ton atau sebesar 97.8 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota			37,38 Juta Ton	49,84 Juta ton	74,76 Juta Ton	97, 8 Juta Ton		15.50				
		a. Jumlah sampah tertangani di 380 kota melalui pemantaun dan evaluasi kota bersih, teduh, dan sehat berkelanjutan (S1.P11.K1.2.IKK.a)		15,547,9 47	16,700,46 9	17,874,4 87	19,070,3 16						
		b. Jumlah sampah yang tertangani melalui kegiatan komposting yang terpadu dengan pertanian perkotaan kapasitas 0,5 ton/hari --> 6 lokasi (S1.P11.K1.2.IKK.b)		402	767	1,132	1,497						
		c. Jumlah timbunan sampah yang terkelola menjadi energi terbarukan di 380 kota (S1.P11.K1.2.IKK.c)		365,000	730,000	1,095,00 0	1,460,00 0						
		d. Jumlah kota yang membangun urban farming sebanyak 100 kota (S1.P11.K1.2.IKK.d)		40 kota	60 kota	80 kota	100 kota						
		e. Persentase produksi biomassa dari industri sebagai sumber energi sebesar 80% (S1.P11.K1.2.IKK.e)		20 %	40 %	60 %	80 %						
Pengelolaan B3 (K2)								26.00	15.90	22.20	23.00	22.20	Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional mengenai B3 sebesar 100%			100%	100%	100%	100%		15.90				
		a. Persentase jumlah dan Jenis B3 yang beredar dan digunakan melalui registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100 % (S1.P11.K2.1.IKK.a)		100%	100%	100%	100%						
		b. Presentase kapasitas layanan registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan sebesar 100 % (S1.P11.K2.1.IKK.b)		100%	100%	100%	100%						
	2. Meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan menjadi 100%			40%	60%	80%	100%						
		a. Persentase jumlah dan jenis B3 yang dipantau peredaran dan/atau pemanfaatannya meningkat setiap tahun (S1.P11.K2.2.IKK.a)		40%	60%	80%	100%						
		b. Jumlah Jenis B3 yang dibatasi peredaran dan penggunaannya (S1.P11.K2.2.IKK.b)		2 jenis B3	2 jenis B3	2 jenis B3	2 jenis B3						
		c. Jumlah Jenis B3 yang dihapuskan (S1.P11.K2.2.IKK.c)		2 jenis B3	2 jenis B3	2 jenis B3	2 jenis B3						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Kegiatan Verifikasi Pengelolaan Limbah B3, dan Limbah non B3 (K3)								15.50	15.60	19.00	20.80	19.10	Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3
	1. Meningkatnya penetapan limbah B3 dan limbah non B3 melalui kegiatan pelayanan pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 menjadi 100%			100%	100%	100%	100%		15.60				
		a. Persentase layanan perizinan pengumpulan limbah B3 nasional 100% (S1.P11.K3.1.IKK.a)		100%	100%	100%	100%						
		b. Persentase layanan perizinan pengangkutan limbah B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.b)		100%	100%	100%	100%						
		c. Persentase layanan perizinan pemanfaatan limbah B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.c)		100%	100%	100%	100%						
		d. Persentase layanan usaha pengolahan limbah B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.d)		100%	100%	100%	100%						
		e. Persentase layanan perizinan penimbunan limbah B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.e)		100%	100%	100%	100%						
		f. Persentase layanan perizinan dumping limbah B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.f)		100%	100%	100%	100%						
		g. Persentase layanan perizinan ekspor limbah B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.g)		100%	100%	100%	100%						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		h. Persentase layanan perizinan impor limbah Non B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.h)		100%	100%	100%	100%						
		i. Persentase layanan penetapan status limbah B3 dan limbah Non B3 100% (S1.P11.K3.1.IKK.i)		100%	100%	100%	100%						
		j. Persentase penanganan kegiatan limbah lintas batas ilegal dan pembuangan limbah B3 ke laut ilegal (S1.P11.K3.1.IKK.j)		100%	100%	100%	100%						
	2. Meningkatnya pemanfaatan limbah B3 dan limbah non B3 yang dikelola sebagai sumber daya sebesar 30% melalui fasilitasi			32,1 juta ton	34,3 juta ton	36,7 juta ton	39,7 juta ton						
		a. Volume dan jenis limbah yang dimanfaatkan sebagai sumber daya meningkat setiap tahun (S1.P11.K3.2.IKK.a)		32,1 juta ton	34,3 juta ton	36,7 juta ton	39,7 juta ton						
Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 (K4)								15.50	50.70	26.60	27.70	26.80	Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3
	1. Meningkatnya jumlah limbah B3 dan Limbah Non B3 yang dipantau pengelolaannya			156,1 Juta Ton	156,1 Juta Ton	156,1 Juta Ton	156,1 Juta Ton		50.70				

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Persentase peningkatan limbah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional sebesar 100% dari baseline 2014 (S1.P11.K4.IKK.a)		100%	100%	100%	100%						
		b. Jumlah limbah B3 yang dikelola sebesar 80% dari baseline 2014 (S1.P11.K4.IKK.b)		175 juta ton	175 juta ton	175 juta ton	175 juta ton						
		c. Jumlah limbah B3 cair dan padat (oli bekas dan sludge oil) yang dimanfaatkan mencapai 1,014,000 ton sebagai bahan bakar alternatif (setara penurunan emisi Gas rumah kaca sebesar 121 ribu ton CO ₂ e/tahun) (S1.P11.K4.IKK.c)		1,1 juta ton	1,1 juta ton	1,1 juta ton	1,1 juta ton						
Kegiatan Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 (K5)								26.00	99.10	26.00	27.30	26.10	Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3
	1. Meningkatnya Volume lahan terkontaminasi yang terpulihkan			91.000 Ton	120 ribu Ton	130 ribu Ton	140 ribu Ton		99.10				
		a. Sistem dan mekanisme inventarisasi dan identifikasi lahan terkontaminasi limbah B3 tersedia (S1.P11.K5.IKK.a)		100%	-	-	-						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Lahan terkontaminasi limbah B3 terinventarisasi dan teridentifikasi setiap tahun (S1.P11.K5.IKK.b)		Inventarisasi dan Identifikasi lahan terkontaminasi di Sumatera (1 ekoregion)	Inventarisasi dan Identifikasi lahan terkontaminasi di Kalimantan (1 ekoregion)	Inventarisasi dan Identifikasi lahan terkontaminasi di Sulawesi dan Maluku (2 ekoregion)	Inventarisasi dan Identifikasi lahan terkontaminasi di Papua (1 ekoregion)						
		c. Lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan oleh penanggung jawab Usaha /kegiatan meningkat setiap tahun (S1.P11.K5.IKK.c)		90.000 ton	100.000 ton	110.000 ton	110.000 ton						
		d. Lahan terkontaminasi limbah B3 yang difasilitasi pemulihannya meningkat setiap tahun (S1.P11.K5.IKK.b)		4500 ton	20.000 ton	20.000 ton	30.000 ton						
		e. Sistem dan mekanisme tanggap darurat Limbah B3 tersedia dan beroperasi (S1.P11.K5.IKK.c)		100%	100%	100%	100%						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (K6)								10.29	16.80	4.80	5.10	5.30	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
	1. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Sampah, Limbah dan B3			72	74	76	78		16.80				

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 (S1.P11.K6.IKK.a)		72	74	76	78						
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P12)								63.63	40.40	43.71	48.09	52.89	Inspektorat Jenderal
	Pengawasan yang berkualitas dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang LHK (S3.P12)												
		a. Tingkat Kapabilitas APIP KLHK	1	2	2	3	3						
		b. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	1	2	2	3	3						
		c. Instansi KLHK yang Akuntabel (Skor LAKIP)	B	B	B	A	A						
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I (K1)								3.54	4.90	5.39	5.93	6.52	Inspektorat Wilayah I
	1. Pengawasan internal yang berkualitas								0.40	0.44	0.48	0.53	
		a. Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangnya (S3.P12.K1.1.IKK.a)	3	3	3	3	3						
	2. Mempertahankan opini WTP								4.10	4.51	4.96	5.46	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir) (S3.P12.K1.2.IKK.a)	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M						
	3. Peningkatan nilai implementasi SAKIP								0.40	0.44	0.48	0.53	
		a. Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A (S3.P12.K1.3.IKK.a)	70 poin	72	74	76	78						
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II (K2)								3.60	4.90	5.39	5.93	6.52	Inspektorat Wilayah II
	1. Pengawasan internal yang berkualitas								0.40	0.44	0.48	0.53	
		a. Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangannya (S3.P12.K2.1.IKK.a)	3	3	3	3	3						
	2. Mempertahankan opini WTP								4.10	4.51	4.96	5.46	
		a. Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir) (S3.P12.K2.2.IKK.a)	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M						
	3. Peningkatan nilai implementasi SAKIP								0.40	0.44	0.48	0.53	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A (S3.P12.K2.3.IKK.a)	70 poin	72	74	76	78						
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III (K3)								3.76	4.95	5.45	5.99	6.59	Inspektorat Wilayah III
	1. Pengawasan internal yang berkualitas								0.45	0.50	0.54	0.60	
		a. Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangannya (S3.P12.K3.1.IKK.a)	3	3	3	3	3						
	2. Mempertahankan opini WTP								4.10	4.51	4.96	5.46	
		a. Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir) (S3.P12.K3.2.IKK.a)	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M						
	3. Peningkatan nilai implementasi SAKIP								0.40	0.44	0.48	0.53	
		a. Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A (S3.P12.K3.3.IKK.a)	70 poin	72	74	76	78						
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV (K4)								3.99	2.92	3.21	3.53	3.89	Inspektorat Wilayah IV
	1. Pengawasan internal yang berkualitas								0.50	0.55	0.61	0.67	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Jumlah Satker yang berkurang temuan berulangnya (S3.P12.K4.1.IKK.a)	3	3	3	3	3						
	2. Mempertahankan opini WTP								1.71	1.88	2.07	2.28	
		a. Nilai maksimum temuan Kerugian Negara (APBN) hasil pemeriksaan BPK-RI (rata-rata lima tahun terakhir) (S3.P12.K4.2.IKK.a)	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M	Rp 3,1 M						
	3. Peningkatan nilai implementasi SAKIP								0.71	0.78	0.86	0.95	
		a. Nilai akuntabilitas kinerja Eselon I dengan kategori A (S3.P12.K4.3.IKK.a)	70 poin	72	74	76	78						
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN (K5)								2.92	21.33	22.94	25.23	27.75	Inspektorat Investigasi
	1. Pengawasan kasus yang berindikasi KKN								0.58	0.64	0.70	0.77	
		a. Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pengawasan investigatif (S3.P12.K5.1.IKK.a)	20 kasus	20 kasus	20 kasus	20 kasus	20 kasus						
	2. Penanganan pengaduan masyarakat (Dumas)								18.09	19.37	21.31	23.44	
		a. Jumlah pengaduan masyarakat (Dumas) yang diselesaikan (S3.P12.K5.2.IKK.a)	20 Dumas	20 Dumas	20 Dumas	20 Dumas	20 Dumas						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	3. Pengembangan unit kerja menuju wilayah bebas korupsi (WBK)								2.66	2.93	3.22	3.54	
		a. Jumlah rekomendasi unit kerja yang WBK (3 satker/tahun) (S3.P12.K5.3.IKK.a)	3 rekom	3 rekom	3 rekom	3 rekom	3 rekom						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK (K6)								45.83	1.40	1.34	1.48	1.62	
	1. Penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal								0.18	-	-	-	
		a. Jumlah Rekomendasi hasil audit internal yang ditindaklanjuti secara tuntas (S3.P12.K6.1.IKK.a)	2.500 saran	3000 saran	3500 saran	4000 saran	4500 saran						
	2. Terselenggaranya sistem pengendalian intern di satker lingkup KLHK								1.22	1.34	1.48	1.62	
		a. Nilai Tingkat kematangan implementasi SPIP (S3.P12.K6.2.IKK.a)	1	2	2	3	3						
	3. Mendukung kegiatan tugas teknis Itjen												
		a. Nilai Implementasi SAKIP Itjen (S3.P12.K6.3.IKK.a)	70	72	74	76	78						
		b. Nilai Tingkat kapabilitas APIP (S3.P12.K6.3.IKK.c)	1	2	2	3	3						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (P13)		1,120,316,835						1120.316835	822.67	995.74	1,141.94	1,292.14	Sekretariat Jenderal
	1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (S3.P13)	1,120					-						
		a. Keterbukaan Informasi dan komunikasi publik meningkat setiap tahun											
		b. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan meningkat setiap tahun											
		c. Kapasitas Birokrasi melalui Reformasi Birokrasi											
		d. Kualitas Pelayanan Publik Meningkatn setiap Tahun											
		e. Nilai SAKIP KLHK Minimal A (minimal 78 poin)	70 poin	72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 Poin						
Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK (K1)								18.59	18.57	19.47	22.55	25.85	Biro Hubungan Masyarakat
	1. Tercapainya penyiaran dan penyebarluasan informasi pembangunan lingkung hidup dan kehutanan												

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Jumlah media massa yang bekerja sama dengan Kementerian LHK dalam rangka <i>Awareness Campaign</i> sebanyak 20 media massa (S3.P13.K1.1.IKK.a)	10 media massa	12 media massa	15 media massa	18 media massa	20 media massa						
		b. Jumlah publikasi proses perencanaan anggaran Kementerian LHK kepada masyarakat (S3.P13.K1.1.IKK.b)	1 publikasi	1 publikasi	1 publikasi	1 publikasi	1 publikasi						
		c. Jumlah publikasi penggunaan anggaran Kementerian LHK (S3.P13.K1.1.IKK.c)	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali						
		d. Jumlah pemberitaan positif bidang LHK di media massa sebanyak 3.000 pemberitaan setiap tahun (S3.P13.K1.1.IKK.d)	3.000 Pemberitaan	3.000 Pemberitaan	3.000 Pemberitaan	3.000 Pemberitaan	3.000 Pemberitaan						
		e. Layanan PPID berdasarkan penilaian KIP (Komisi Informasi Publik) meningkat 200 poin atau 40 poin setiap tahun atau (<i>baseline</i> tahun 2013 untuk eks KLH 650) (S3.P13.K1.1.IKK.e)	40 poin	40 poin	40 poin	40 poin	40 poin						
Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK (K2)								14.00	15.00	15.89	18.28	21.02	Pusat Data dan Informasi
	1. Termanfaatkannya Informasi Kualitaas Lingkungan Hidup untuk pengukuran kinerja KLHK dan pengambilan kebijakan								4.46	3.78	4.34	4.99	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Analisis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional setiap tahun diperbaharui dan didiseminasikan (S3.P13.K2.1.IKK.a)	1 IKLH	1 IKLH	1 IKLH	1 IKLH	1 IKLH						
		b. Jumlah daerah yang difasilitasi pembentukan Sistem informasi LHK Daerah (SIL LHKD) (S3.P13.K2.1.IKK.b)	10 Daerah	10 Daerah	10 Daerah	15 Daerah	15 Daerah						
		c. Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) tersedia setiap tahun (S3.P13.K2.1.IKK.c)	1 SLHI	1 SLHI	1 SLHI	1 SLHI	1 SLHI						
	2. Tercapainya peningkatan kapasitas layanan data, informasi, dan infrastruktur sistem informasi LHK								10.54	12.12	13.93	16.02	
		a. Jumlah sistem informasi KLHK yang terbangun dan beroperasi (S3.P13.K2.2.IKK.a)	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem						
		b. Jumlah satker yang memiliki struktur jaringan dan teknologi informasi berfungsi memenuhi standar minimal (S3.P13.K2.2.IKK.b)	280 satker	280 satker	280 satker	280 satker	280 satker						
Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi (K3)								351.32	422.63	486.02	558.93	642.76	Biro Perencanaan
	1. Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi LHK								418.36	481.12	553.28	636.27	

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		a. Persentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK 95% (S3.P13.K3.1.IKK.a)	90%	91%	92%	93%	95%						
		b. Nilai SAKIP KLHK Minimal A (minimal 78 poin) (S3.P13.K3.1.IKK.b)	70 Poin	72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 poin						
		c. Mekanisme pengelolaan dan penyaluran pendanaan pengurangan deforestasi dan degradasi hutan (S3.P13.K3.1.IKK.c)	1 mekanis me terbentuk	10 % dana tersalurk an	40 % dana tersalurka n	60 % dana tersalurk an	95 % dana tersalurk an						
Penyelenggaraan Kebijakan Strategis bidang lingkungan hidup dan kehutanan (K4)	2. Tersedianya rancangan kebijakan strategis bidang lingkungan hidup dan kehutanan							-	4.27	4.91	5.64	6.49	Pusat Kebijakan Strategis
		a. Jumlah rancangan kebijakan strategis (S3.P13.K4.2.IKK.a)	11 rancanga n	11 rancang an	11 rancanga n	11 rancanga n	11 rancanga n						
Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK (K5)								402.90	179.50	206.43	237.39	273.00	Biro Umum
	1. Terselenggaranya pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan KLHK								179.50	206.43	237.39	273.00	
		Jumlah manajemen aset (S3.P13.K5.1.IKK.a)	400 satker	400 satker	400 satker	400 satker	400 satker						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Kegiatan penyelenggaraan keteknikan lingkungan hidup dan kehutanan (K6)	Terselenggaranya pengelolaan sarana, prasarana dan peralatan teknis kehutanan dan lingkungan efektivitas dan efisien	a. Jumlah satker yang memiliki NSPK baru/hasil evaluasi (S3.P13.K6.1.IKK.a)		112 Satker	168 Satker	224 Satker	280 satker	0.30					Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		b. Jumlah satker yang memiliki sarana dan peralatan LHK terdistribusi di 280 satker dan berfungsi baik sesuai NSPK (S3.P13.K6.1.IKK.b)		112 Satker	168 Satker	224 Satker	280 satker						
Pembiayaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K7)								100.84	30.64	38.30	49.78	54.76	Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan
	1. Nilai komitmen pembiayaan fasilitas dana bergulir minimal sebesar 2 T untuk mitra pembangunan hutan pada KPH dan non KPH (HKm, HD, HR dan Hutan Tanaman) serta investasi lingkungan								30.64	38.30	49.78	54.76	
		a. Jumlah dana yang terdistribusi kepada mitra kerja KPH dan non KPH (HKm, HD, HR, dan hutan tanaman rakyat) serta investasi lingkungan sebesar Rp. 2 T (S3.P13.K7.1.IKK.a)	Rp0,4 T	Rp0,4 T	Rp0,4 T	Rp0,4 T	Rp0,4 T						
		b. Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/Pendapatan BLU Pusat P2H (S3.P13.K7.1.IKK.b)	Rp114 M	Rp114 M	Rp110 M	Rp104 M	Rp83,2 M						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Pembinaan dan Koordinasi Kerjasama Luar Negeri (K8)								12.59	10.59	12.18	14.01	16.11	Biro Kerjasama Luar Negeri
	1. Meningkatnya kerja sama luar negeri bidang lingkungan hidup dan kehutanan								10.59	12.18	14.01	16.11	
		a. Jumlah kerja sama baru Bilateral, Regional, Multilateral dan Organisasi Internasional Non Pemerintah yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebanyak 30 kerja sama (S3.P13.K8.1.IKK.a)	6 kerja sama	6 kerja sama	6 kerja sama	6 kerja sama	6 kerja sama						
		b. Seluruh kerja sama Luar Bilateral, Regional, Multilateral dan Organisasi Internasional Non Pemerintah terlaksana sesuai dengan kepentingan nasional (S3.P13.K8.1.IKK.b)	23 kerja sama	25 kerja sama	27 kerja sama	29 kerja sama	31 kerja sama						
		c. Pemanfaatan dana <i>Global Environmental Fund (GEF)</i> meningkat setiap tahun (S3.P13.K8.1.IKK.c)	\$US10 juta	\$US20 juta	\$US40 juta	\$US60 juta	\$US89 juta						
Pengendalian Ekoregion Jawa (K9)								23.19	17.88	32.00	32.50	32.50	Pusat Pengendalian Ekoregion Jawa

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Jawa		80%	85%	90%	90%	95%		17.88	32.00	32.50	32.50	
		a. Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Jawa 95% (S3.P13.K9.1.IKK.a)	80%	85%	90%	90%	95%						
		b. Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Jawa selama 5 tahun (S3.P13.K9.1.IKK.b)	1 tematik	2 tematik	4 tematik	6 tematik	8 tematik						
Pengendalian Ekoregion Bali-Nusra (K10)								16.71	10.56	18.00	19.25	20.50	Pusat Pengendalian Ekoregion Bali-Nusra
	1. Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Bali Nusra		80%	85%	90%	90%	95%		10.56	18.00	19.25	20.50	
		a. Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Bali Nusra 95% (S3.P13.K10.1.IKK.a)	80%	85%	90%	90%	95%						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Bali-Nusra selama 5 tahun (S3.P13.K10.1.IKK.b)	1 tematik	2 tematik	4 tematik	6 tematik	8 tematik						
Pengendalian Ekoregion Kalimantan (K11)								19.89	15.29	33.00	38.00	43.00	Pusat Pengendalian Ekoregion Kalimantan
	1. Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Kalimantan		80%	85%	90%	90%	95%		15.29	33.00	38.00	43.00	
		a. Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Kalimantan 95% (S3.P13.K11.1.IKK.a)	80%	85%	90%	90%	95%						
		b. Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Kalimantan selama 5 tahun (S3.P13.K11.1.IKK.b)	1 tematik	2 tematik	4 tematik	6 tematik	8 tematik						
Pengendalian Ekoregion Sulawesi (K12)								21.64	12.60	22.00	25.50	22.50	Pusat Pengendalian Ekoregion Sulawesi-Maluku

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Sulawesi		80%	85%	90%	90%	95%		12.60	22.00	25.50	22.50	
		a. Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Sulawesi 95% (S3.P13.K13.1.IKK.a)	80%	85%	90%	90%	95%						
		b. Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Sulawesi selama 5 tahun (S3.P13.K12.1.IKK.b)	1 tematik	2 tematik	4 tematik	6 tematik	8 tematik						
Pengendalian Ekoregion Maluku (K13)								-	2.81	4.50	6.00	7.50	
	1. Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Maluku		80%	85%	90%	90%	95%		2.81	4.50	6.00	7.50	
		a. Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Maluku 95% (S3.P13.K13.1.IKK.a)	80%	85%	90%	90%	95%						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		b. Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Maluku selama 5 tahun (S3.P13.K13.1.IKK.b)	1 tematik	2 tematik	4 tematik	6 tematik	8 tematik						
Pengendalian Ekoregion Papua (K14)								11.83	7.64	12.00	12.25	12.50	Pusat Pengendalian Ekoregion Papua
	1. Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Papua		80%	85%	90%	90%	95%		7.64	12.00	12.25	12.50	
		a. Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Papua 95% (S3.P13.K14.1.IKK.a)	80%	85%	90%	90%	95%						
		b. Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Papua selama 5 tahun (S3.P13.K14.1.IKK.b)	1 tematik	2 tematik	4 tematik	6 tematik	8 tematik						
Pengendalian Ekoregion Sumatera (K15)								27.92	20.37	28.56	30.00	31.00	Pusat Pengendalian Ekoregion Sumatera

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	1. Meningkatnya pengendalian pembangunan LH dan kehutanan di Ekoregion Sumatera		80%	85%	90%	90%	95%		20.37	28.56	30.00	31.00	
		a. Persentase capaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Sumatera 95% (S3.P13.K15.1.IKK.a)	80%	85%	90%	90%	95%						
		b. Jumlah rencana pengelolaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan 8 isu strategis di Ekoregion Sumatera selama 5 tahun (S3.P13.K15.1.IKK.b)	1 tematik	2 tematik	4 tematik	6 tematik	8 tematik						
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK (K16)								52.81	19.18	22.05	25.36	29.17	Biro Keuangan
	1. Meningkatnya administrasi keuangan KLHK secara efektif								19.18	22.05	25.36	29.17	
		a. Opini WTP untuk Laporan Keuangan (S3.P13.K16.1.IKK.a)	1 opini WTP	1 opini WTP	1 opini WTP	1 opini WTP	1 opini WTP						
		b. Jumlah PNBPN meningkat sebesar 10% dari penerimaan PNBPN tahun 2013 (S3.P13.K16.1.IKK.b)	Rp3 T	Rp6 T	Rp9 T	Rp12 T	Rp15 T						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
		c. Jumlah perusahaan yang menyelesaikan piutang negara di bidang LHK, 25 perusahaan (S3.P13.K16.1.IKK.c)	5 perusahaan	5 perusahaan	5 perusahaan	5 perusahaan	5 perusahaan						
Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian Kementerian LHK (K17)								20.16	18.66	21.46	24.68	28.38	Biro Kepegawaian
	1. Meningkatnya kesesuaian penempatan pegawai dan kompetensi pegawai Kementerian LHK								18.66	21.46	24.68	28.38	
		a. Jumlah pegawai untuk memenuhi kebutuhan KPH sekurang-kurangnya 4000 orang sesuai hasil analisis Kemenpan RB (S3.P13.K17.1.IKK.a)	900 orang	1.660 orang	2.420 orang	3.170 orang	4.000 orang						
		b. Jumlah pegawai yang meningkat kompetensinya pada setiap jabatan (S3.P13.K17.1.IKK.b)	1.500 Orang	4.500 Orang	7.000 Orang	9.500 Orang							
		c. Tersedianya regulasi seleksi dan pengangkatan pejabat (S3.P13.K17.1.IKK.c)		1 regulasi									
	2. Tersusunnya struktur Organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif, dan efisien												
		a. Peningkatan RB di KemenLHK di 13 satker pusat menjadi >60 (dari nilai evaluasi 57,71 tahun 2014) (S3.P13.K17.2.IKK.a)	13 unit eselon I	13 unit eselon I	13 unit eselon I	13 unit eselon I	13 unit eselon I						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Pembinaan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K18)								11.39	8.27	9.51	10.94	12.58	Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan
	1. Tersedianya RSNI, RSNI Harmonisasi dan standar khusus								2.90	3.34	3.84	4.41	
		a. Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia dan Standar Nasional Indonesia harmonisasi, standar khusus (lingkup standar: sistem manajemen, produk, proses, metode uji/verifikasi, barang/jasa/teknologi ramah lingkungan) (S3.P13.K18.1.IKK.a)	25 standar	25 standar	25 standar	25 standar	25 standar						
	2. Terjaminnya penerapan SNI Lingkungan Hidup dan Kehutanan								5.37	6.18	7.10	8.17	
		a. Jumlah penerapan SNI meningkat setiap tahun (S3.P13.K18.2.IKK.a)	45 SNI	45 SNI	45 SNI	45 SNI	45 SNI						
		b. Jumlah pemanfaatan barang dan jasa/teknologi ramah lingkungan meningkat (S3.P13.K18.2.IKK.b)	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis						
		c. Jumlah jenis standar pelayanan masyarakat dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan ditetapkan (S3.P13.K18.2.IKK.c)	2 jenis standar pelayanan publik	2 jenis standar pelayanan publik	2 jenis standar pelayanan publik	2 jenis standar pelayanan publik	2 jenis standar pelayanan publik						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung-jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Pengembangan Telaahan Kebijakan, Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K19)								14.23	12.49	14.36	16.52	19.00	Biro Hukum
	1. Tersedianya regulasi dengan prioritas mendorong hasil produksi dan nilai ekspor hasil hutan (kayu, HHBK, TSL), HKm, HD, HR, HTR, Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), perubahan iklim dan kebijakan LHK lainnya												
		a. Jumlah naskah akademik dan RUU terkait dengan perjanjian bidang lingkungan hidup dan kehutanan (S3.P13.K19.1.IKK.a)		1 RUU									
		b. Jumlah rancangan Peraturan Pemerintah sebagai amanat UU dan revisi PP (S3.P13.K19.IKK.b)		10 RPP dan PP	10 RPP dan PP	10 RPP dan PP	10 RPP dan PP						
		c. Jumlah rancangan Peraturan Menteri turunan PP yang difasilitasi penelaahan, penulisan, dan penerbitannya (S3.P13.K19.1.IKK.c)		10 Rpermen	10 Rpermen	10 Rpermen	10 Rpermen						
		d. Jumlah RPERPRES, RKEPPRES, RINPRES, RKepMen, RPerDa Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (S3.P13.K19.1.IKK.d)		10 Rancangan Peraturan Perundangan	10 Rancangan Peraturan Perundangan	10 Rancangan Peraturan Perundangan	10 Rancangan Peraturan Perundangan						

Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Miliar)					Penanggung -jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	2. Penanganan bantuan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan												
		a. Terelesaikannya perkara perdata, TUN, uji materi dan pendampingan perkara pidana bidang lingkungan hidup dan kehutanan (S3.P13.K19.2.IKK.a)		80% putusan perkara menang									
	3.											
TOTAL								6,667.84	6,415.47	6,263.72	6,932.82	7,664.20	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

Jakarta,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA